



LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2018



H. M. IDAHAM SH, M.Si.
Walikota Binjai



H. TIMBAS TARIGAN, SE
Wakil Walikota Binjai



Jl. Jend. Sudirman No. 6 Binjai
Sumatera Utara



**BINJAI
2019**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018 sebagai bentuk Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah selama

Tahun 2018. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018.

Pemerintah Kota Binjai telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016 - 2021 untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi “ ***Terwujudnya Kota Cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan Lingkungan menuju Binjai yang Sejahtera*** „ dan **Misi Kota Binjai** untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*).
2. Membangun sumber daya manusia berkualitas (*Smart People*).
3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*).
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (*Smart*). *Economy dan Smart Environment*).
5. Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*).

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai 2018 ini telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Walikota Binjai, namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai.


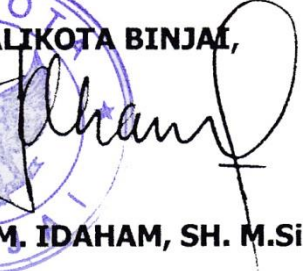
Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kami menyadari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai 2018 ini masih perlu penyempurnaan dan pembenahan, meskipun di dalam proses penyusunannya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan saran maupun kritik yang membangun dalam rangka menuju ke arah kesempurnaan perencanaan selanjutnya.

Dengan harapan Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai.

Binjai, Maret 2019

 **WALIKOTA BINJAI,**

H. M. IDAHAM, SH. M.Si.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tertuang dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2016 - 2021 adalah “*TERWUJUDNYA KOTA CERDAS YANG LAYAK HUNI, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU BINJAI YANG SEJAHTERA*,, Pemerintah daerah yang katalistik berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) Misi pembangunan daerah, yaitu a). Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (**Smart Governance**) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, b). Membangun sumber daya manusia berkualitas (**Smart People**) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera, c). Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (**Smart Mobility**) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, d). Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang Terampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (**Smart Economy dan Smart Environment**), e). Meningkatkan kualitas standar hidup (**Smart Living**) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Tema pembangunan tahun 2018 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2016 - 2021 adalah Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (**Smart Governance**) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Adapun prioritas pembangunan Kota Binjai Tahun 2018 untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Binjai dalam lima tahun kedepan akan diprioritaskan kepada **6 Prioritas Pembangunan** yakni:

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dalam rangka mewujudkan *Pemerintahan yang Cerdas (Smart Governance)*;
2. Peningkatan Kualitas dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dalam

rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia *yang Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera (SmartPeople)*;

3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan *Mobilitas Masyarakat yang produktif (SmartMobility)*, *Kota Layak huni (Smart Living)* dan *berwawasan lingkungan (SmartEnvironment)*
4. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat dalam rangka mewujudkan *pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah (Smart Economy dan Smart Prosperity)*;
5. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk Industri, Perdagangan dan Jasa;
6. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional dan Provinsi. Untuk mendukung 6 (enam) prioritas, Pemerintah Kota Binjai menentukan Sasaran strategis, yakni :
 1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan Terpercaya.
 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
 3. Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan.
 4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat kecamatan dan kelurahan.
 5. Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama.
 6. Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya.
 7. Terciptanya daya saing Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya.
 8. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.
 9. Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan RTRW.
 10. Meningkatnya produktifitas perekonomian kota
 11. Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan.
 12. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
 13. Pengurangan tingkat resiko akibat bencana.Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan,



dapat dikatakan cukup berhasil, dengan perhitungan capaian **Sasaran Strategis 15 (lima belas)** dan **145 (Seratus empat puluh lima) Program** yang ditetapkan, dengan persentase rata rata capaian Kinerja **76 %**,.

Dengan tercapainya capaian kinerja tersebut diatas didukung Alokasi dana dari APBD Kota Binjai Tahun 2018 sebesar **Rp. 434.738.248.089,00** atau **75,21%** dari pagu sebesar **Rp. 577.997.877.311,00** selisih dana **(143.887.761.672,00)**, Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi / penghematan penggunaan anggaran apabila di bandingkan dengan capaian kinerja sebesar **24,79%**, Dengan adanya efisiensi / penghematan, karena adanya dilakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dari Program dan kegiatan.

Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) akan terus melakukan upaya peningkatan SDM aparatur di bidang Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Bidang Pembangunan, dan Pengelolaan Administrasi Bidang Pelayanan Publik secara efisien dan efektif yang bersinergi, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2000 - 2025 Pemerintah Kota Binjai.

Tingkat pencapaian kinerja yang baik ini akan dipertahankan dan akan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang.

Binjai, Maret 2019

 **WALIKOTA BINJAI,**

H. M. IDAHAM, SH. M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Ikhtisar Eksekutif | iii |
| Pernyataan telah direviu..... | vi |
| Checklist Reviu..... | vii |
| Daftarisi..... | ix |

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| BAB I | PENDAHULUAN..... | 1 |
| | A Latar Belakang | 1 |
| | B Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| | C Gambaran Umum Pemenrintah Kota Binjai..... | 3 |
| | D Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2018..... | 13 |
| BAB II | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 15 |
| | A Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | 15 |
| | 1. Pernyataan Visi..... | 16 |
| | 2. Pernyataan Misi..... | 18 |
| | 3. Tujuan dan Sasaran..... | 66 |
| | 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Binjai | 66 |
| | B Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018..... | 66 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA..... | 81 |
| | Capaian Kinerja Pemerintah Kota BinjaiTahun 2018..... | 83 |
| | Evaluasi dan Analisis Capaian Kerja..... | 95 |
| | Akuntabilitas Keuangan..... | 152 |
| BAB IV | PENUTUP | 165 |
| | LAMPIRAN | |



B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Terwujudnya *good governance and clean government* merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Tuntutan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan roda Pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah semakin tidak bisa dihindari. Kondisi Pemerintahan yang masih belum mampu memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat membuat Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan belum memberikan perubahan yang signifikan.

Penerapan pencapaian *good governance* berlandaskan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan Peraturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan ditindaklanjuti



dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pengukuran Kinerja sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Utama.

Dengan dilatar belakangi maksud tersebut, Pemerintah Kota Binjai melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2017 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021;
2. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2019 (lembaran daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 22);
3. Peraturan Walikota Binjai Nomot 51 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 52);
4. Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-172/K/Tahun 2018 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP bagi Pemerintah Kota Binjai adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kota Binjai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintah Kota Binjai untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan strategik Pemerintah Kota Binjai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan Visi, Misi, dan Tujuan/Sasaran Strategis Pemerintah Kota Binjai. Secara selaras, setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan Visi, Misi, dan Tujuan/Sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja Pemerintah Kota Binjai yang berhasil dan kegagalan diperoleh.

C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA BINJAI.

1. Profil Daerah.

Secara Geografis Kota Binjai berada pada 30 31'40" Lintang Utara dan 98° 27'3" - 98° 32'32" Bujur Timur dan terletak 28 m diatas permukaan



laut. Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 Km dikelilingi oleh Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Secara administratif Pemerintah Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamperan Perak Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sie Bingei Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

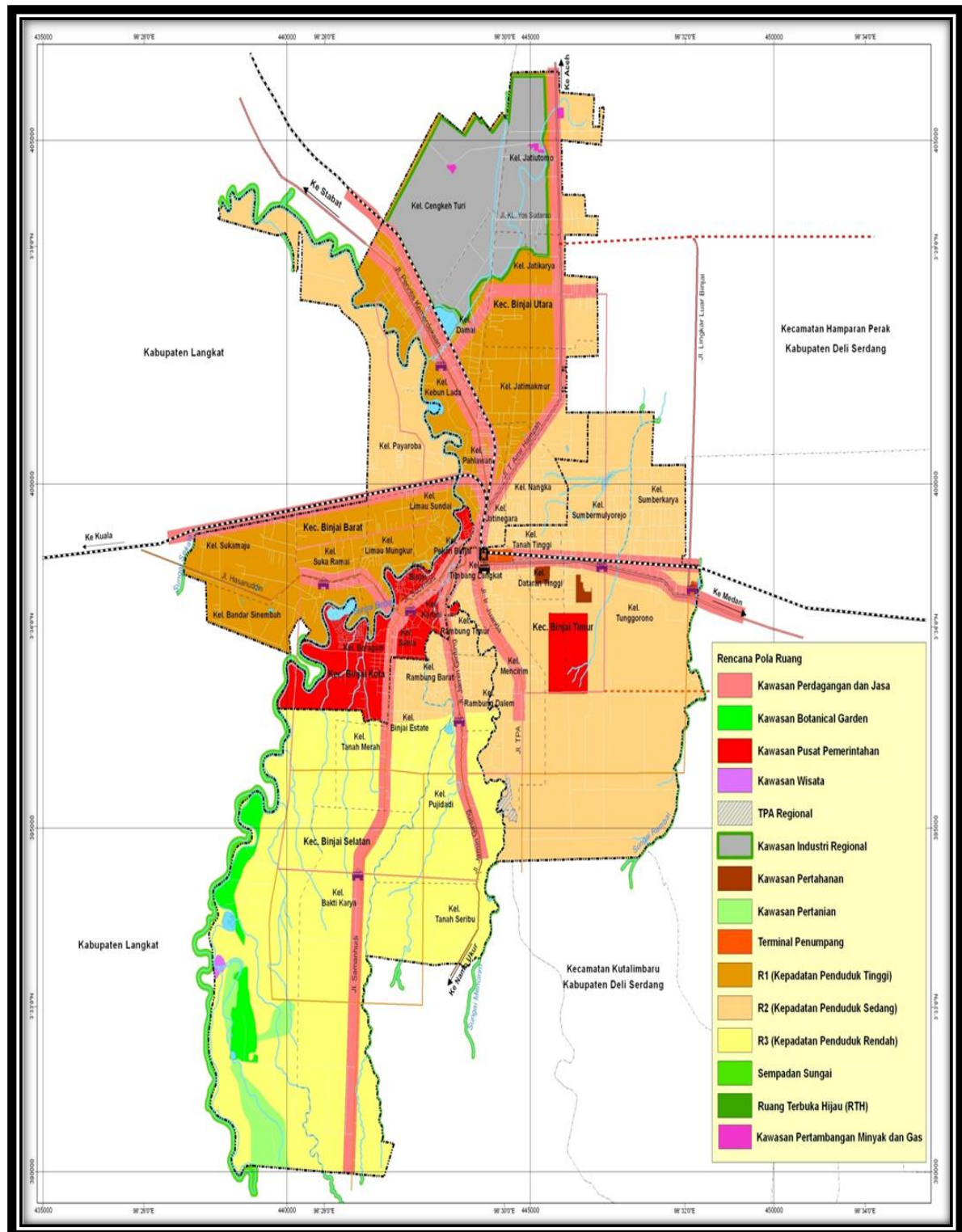
Luas wilayah kota Binjai adalah 90.23 km² dengan kecamatan Binjai Selatan sebagai wilayah yang paling luas seluas 29.96 km², sedangkan wilayah kecamatan yang paling kecil yaitu kecamatan Binjai Kota dengan luas 4,12 Km². Secara administrasi kota Binjai terdiri dari 5 (lima) kecamatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan dan 284 SLS/lingkungan. Adapun kecamatan yang terdapat di Kota Binjai yaitu Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Utara, dan Kecamatan Binjai Barat. Berikut rincian jumlah kecamatan dan kelurahan di kota Binjai.

Tabel 1.1. Wilayah Administratif Kota Binjai

| No. | Kecamatan | Luas (km ²) | Kelurahan | Jumlah Lingkungan |
|-----|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Binjai Utara | 23,59 | Pahlawan Jatinegara Nangka Jati Makmur Damai Kebun Lada Cengkeh Turi Jati Karya Jati utomo | 64 |
| 2. | Binjai Timur | 21,70 | Mencirim Tunggorono Timbang Langkat | |



| | | | | |
|----|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | Tanah Tinggi Sumber Mulyorejo Dataran Tinggi Sumber Karya | 65 |
| 3. | Binjai Kota | 4,12 | Berngam Satria Setia Kartini Tangsi Binjai Pekan Binjai | 51 |
| 4. | Binjai Barat | 10,86 | Bandar Senembah Limau Mungkur Limau Sundai Paya Roba Suka Maju Suka Ramai | 43 |
| 5. | Binjai Selatan | 29,96 | Tanah Merah Bhakti Karya Binjai Estate Tanah Seribu Pujidadi Rambung Barat Rambung Dalam Rambung Timur | 61 |

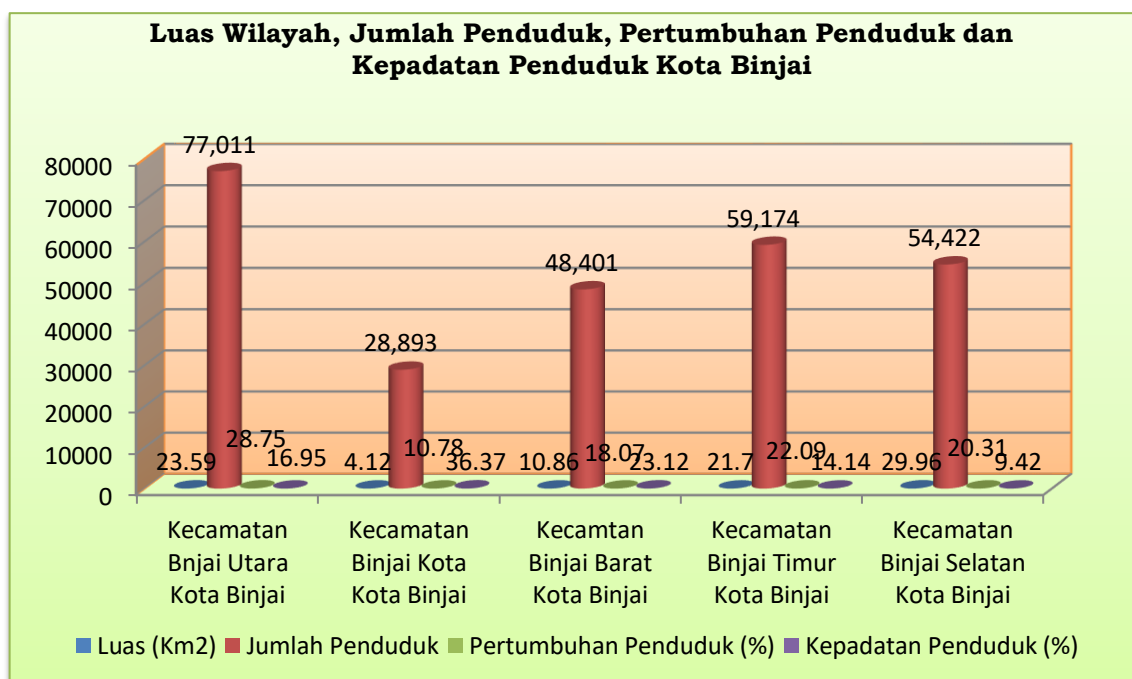


Gambar 1.1. Peta Kota Binjai

2. Kependudukan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai bahwa jumlah Penduduk Kota Binjai 267.901 jiwa, terbanyak berada di Kecamatan Binjai Utara yaitu 77.011 jiwa dengan luas daerah 23,59 km² sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Binjai Kota dengan jumlah penduduk 28.893 jiwa dengan luas daerah 4,12 km². Data luas wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Binjai Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah :

Gambar 1.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Binjai



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, 2017.

3. Kondisi Makro Ekonomi Kota Binjai.

Tabel 1.2.

Kondisi Makro Ekonomi Kota Binjai ditinjau dari PDRB Perkapita

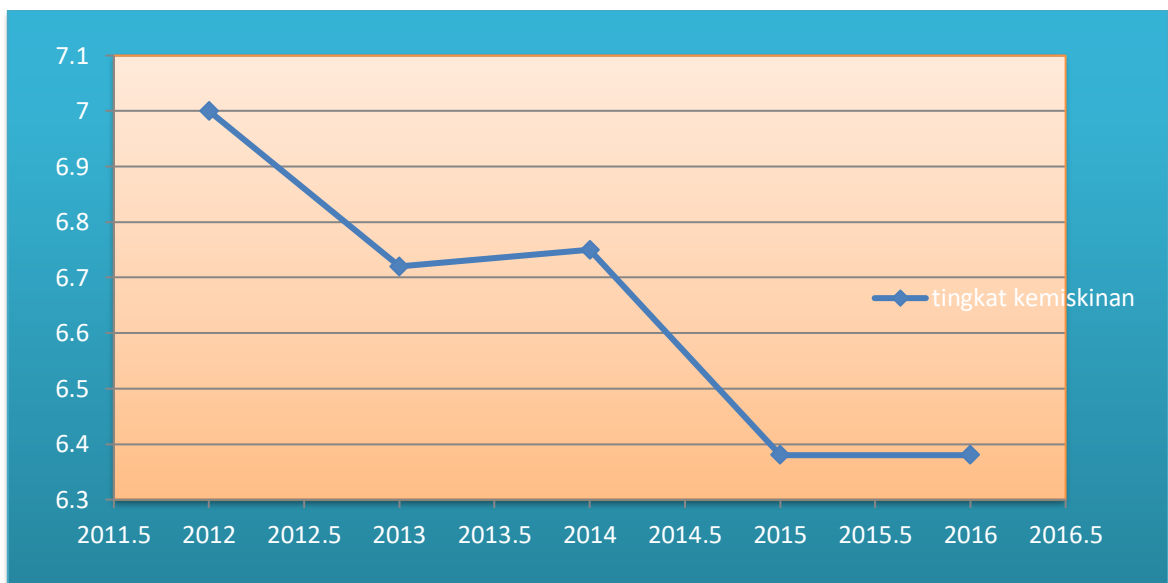
| No | Uraian | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---------------------|-----------------|------|------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 6,45 | 6,07 | 5,83 | 5,29% | 5,54% |



| | | | | | | |
|---|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | PDRB Perkapita Harga Berlaku (Ribu Rupiah) | 24.574,84 | 27.227,36 | 29.251,83 | 31.669,12 | 33.960,38 |
| 3 | PDRB Perkapita Harga Konstan (Ribu Rupiah) | 22.192,13 | 23.352,48 | 23.841,40 | 24.826,32 | 25.947,09 |

5. Kondisi Makro Sosial Kota Binjai.

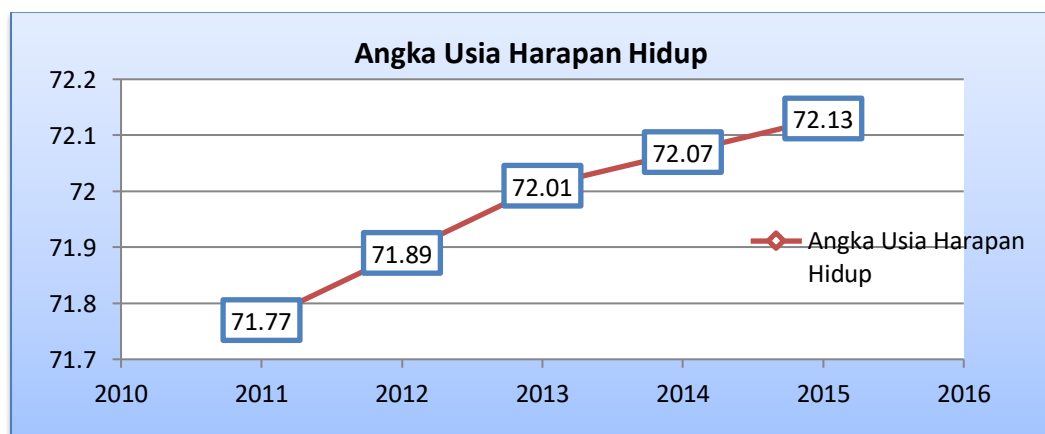
4a. Menurunnya angka kemiskinan di Kota Binjai.



Gambar 1.3. Grafik angka kemiskinan di Kota Binjai

Sumber : BPS Kota Binjai Tahun 2016.

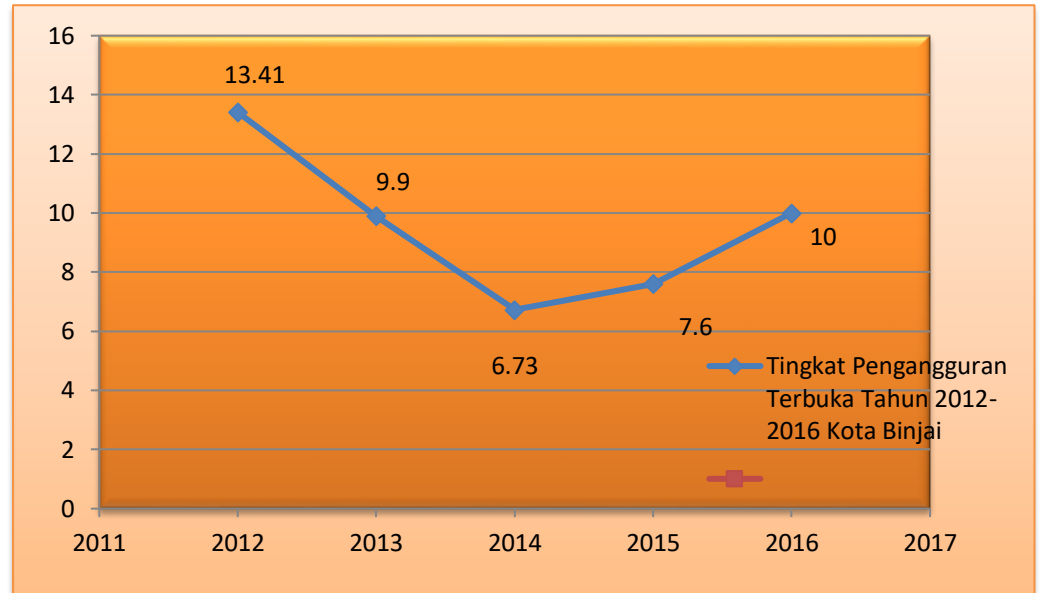
4b. Pencapaian Angka Usia Harapan di Kota Binjai.



Gambar 1.4. Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Binjai

Sumber : BPS Kota Binjai Tahun 2016.

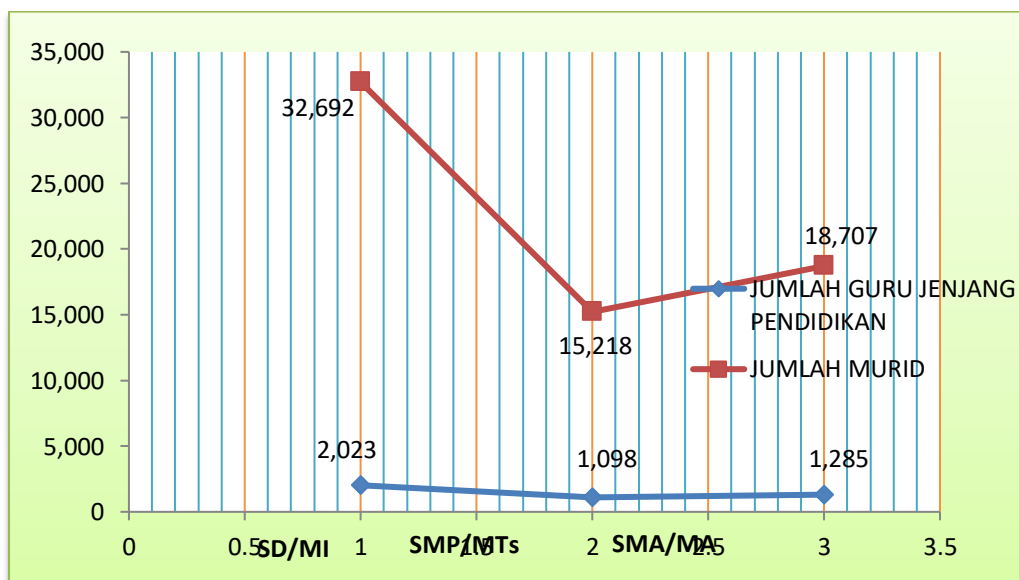
4c. Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Binjai



Gambar 1.5. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Binjai

Sumber : BPS Kota Binjai Tahun 2016.

4d. Perkembangan Siswa dan Tenaga Pengajar di Kota Binjai



Gambar 1.5. Grafik Perkembangan Siswa dan Tenaga Pengajar di Kota Binjai

Sumber : BPS Kota Binjai Tahun 2016.



6. Tugas dan Wewenang .

Sesuai pasal 65 pada Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perdatentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil Kepala Daerah; dan,
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Sedangkan wewenangnya adalah :

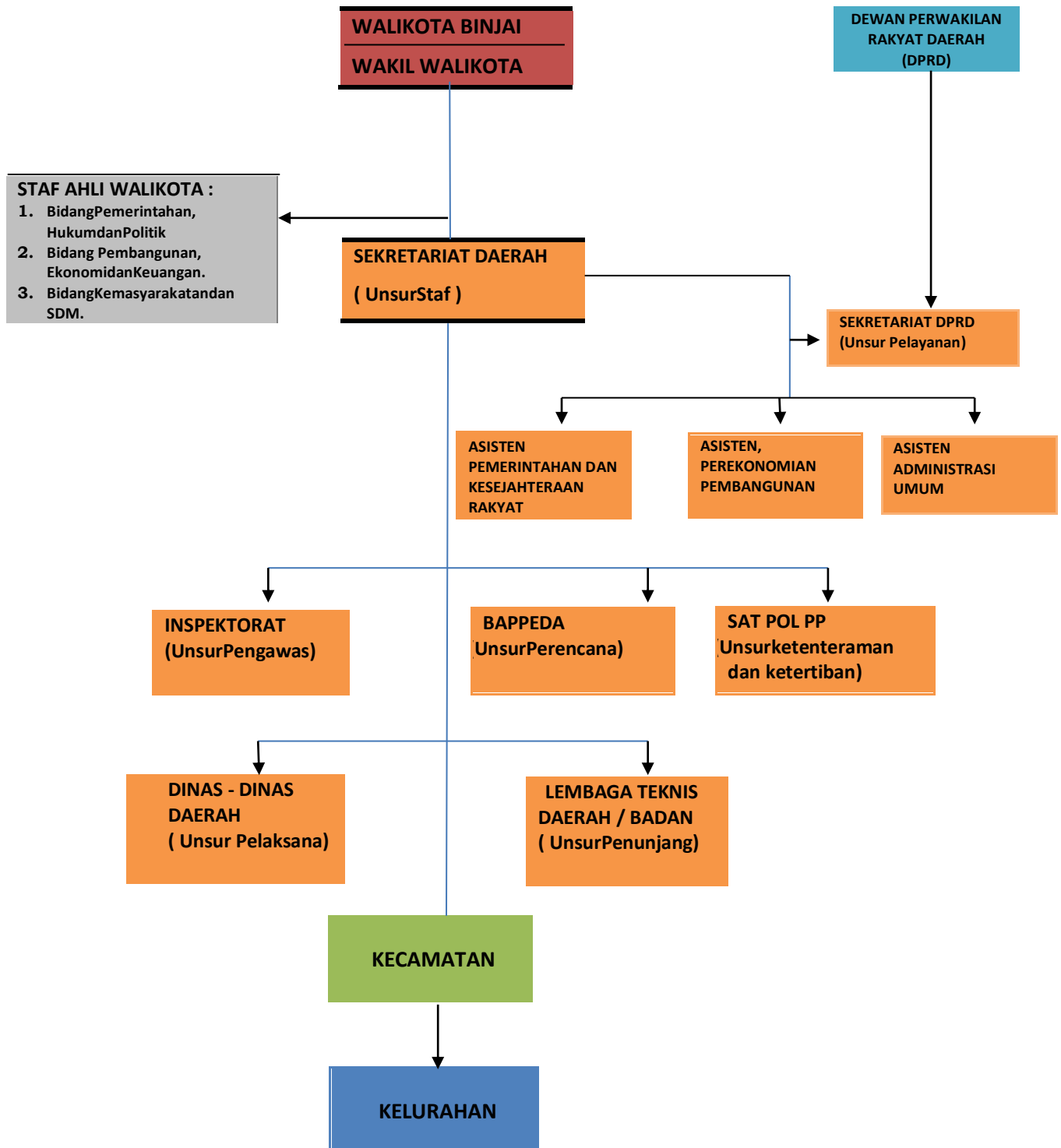
- a. Mengajukan rancangan Perda,
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD,
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang perubahan APBD

6. Struktur Organisasi.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Binjai



Keterangan: ————— = Garis Struktural. = Garis Koordinasi.



Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai.

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- i. Dinas Lingkungan Hidup.
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu;
- o. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- p. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- q. Badan Kepegawaian Daerah;
- r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- t. RSUD.dr. Djoelham Binjai.

D. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA 2018.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menjelaskan pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Binjai selama tahun anggaran 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance plan*) 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.



Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut ini. Uraian singkat masing - masing Laporan Kinerja (LKj) ini, adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan** : Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2018, Gambaran Daerah Kota Binjai Umum Pemerintah Daerah Kota Binjai, dan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Binjai.
- Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja** : Menjelaskan secara ringkas yang meliputi rencana strategis yang berisi ringkasan RPJMD, yaitu Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja yang menyangkut rencana pencapaian target indikator sasaran.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja.** : Menjelaskan pencapaian sasaran - sasaran kinerja menyeluruh dari Pemerintah Kota Binjai selama tahun 2017 sebagai berikut:
1. Pencapaian Kinerja masing - masing indikator kinerja sasaran tahun 2018.
 2. Target dan realisasi kinerja Tahun 2018.
 3. Kendala / Hambatan dalam pencapaian .
 4. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang ada di Rencana Strategis (Renstra).
 5. Menjelaskan Akuntabilitas Keuangan antara target dan realisasi anggaran sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV Penutup.** :



B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RJMD)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021.

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian pelaksanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPPD) sebagai suatu dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Kota Binjai yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD dalam mewujudkan cita-cita Pembangunan Kota Binjai. Berikut akan dijabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Binjai yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Visi dan Misi



1. PERNYATAAN VISI.

VISI merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Mengacu pada batasan tersebut, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021 Visi Pembangunan Daerah Kota Binjai dijabarkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Cerdas yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahtera”

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap III Kota Binjai Tahun 2016-2020, ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada Visi yakni : **“Kota Binjai Sebagai Pusat Permukiman, Pelayanan Jasa, Perdagangan Dan Industri Yang Berwawasan Lingkungan”**.

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan RPJMD, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat Visi tersebut di atas, sebagai berikut:

- Kota Cerdas (Smart City)** bermakna bahwa pembangunan Kota Binjai dalam 5 tahun kedepan akan dibangun dalam totalitas perwujudan Kota Cerdas yang melingkupi Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Governance*), Sumber Daya Manusia yang Cerdas (*Smart People*), Infrastruktur pendukung Mobilitas Masyarakat yang produktif (*Smart Mobility*), Perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan (*Smart Economy dan Smart Environment*);
- Kota Layak Huni (Smart Living)** mengandung pengertian bahwa optimalisasi pembangunan aspek fisik fasilitas perkotaan, prasarana, tata



ruang dan lain-lain dan aspek non fisik (interaksi sosial, ekonomi, hukum dan politik) yang terwujud melalui indikator :

- (1) terwujudnya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih dan listrik);
 - (2) tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah dan kesehatan);
 - (3) tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi, keamanan dengan bebas dari rasa takut;
 - (4) Mendukung fungsi ekonomi, sosial, budaya dan
 - (5) Sanitasi lingkungan yang baik serta keindahan lingkungan fisik.
- c. **Berdaya Saing** mengandung pengertian bahwa kemajuan Kota Binjai diarahkan kepada peningkatan daya saing pada sektor permukiman, jasa, perdagangan dan industri dengan target capaian berada diatas capaian Provinsi Sumatera Utara dan meningkatnya investasi.
- d. **Berwawasan Lingkungan** mengandung pengertian bahwa pembangunan kedepan diarahkan dalam tindaklanjut pembangunan Kota Binjai *Eco-Green City* yang telah dimulai sejak 5 tahun terakhir.
- e. **Sejahtera mengandung** pengertian terwujudnya peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja, dengan capaian yang lebih baik dari Sumatera Utara.

2. PERNYATAAN MISI.

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kota Binjai menjabarkannya ke dalam misi pembangunan daerah Kota Binjai sebagai berikut:

Misi Pertama, Mewujudkan pemerintah yang cerdas (**Smart Governance**) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan



tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

- Misi kedua,** Membangun sumber daya manusia berkualitas (**Smart People**) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera;
- Misi Ketiga,** Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (**Smart Mobility**) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- Misi Keempat,** Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang trampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (**Smart Economy** dan **Smart Environment**);
- Misi Kelima,** Meningkatkan kualitas standar hidup (**Smart Living**) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan;

3. TUJUAN DAN SASARAN.

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Dalam menyelenggarakan misinya, Pemerintah Kota Binjai menetapkan 7 (tujuh) Tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah :

- Tujuan Pertama,** Menciptakan tata kelola kepemimpinan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- Tujuan Kedua,** Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
- Tujuan Ketiga,** Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kerukunan hidup antar umat beragama, peran pemuda, olahraga dan seni budaya;



- Tujuan Keempat,** Menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing;
- Tujuan Kelima,** Meningkatkan kualitas dan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota melalui efektifitas pembangunan infrastruktur;
- Tujuan Keenam,** Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM;
- Tujuan Ketujuh,** Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

Sebagaimana juga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai tahun 2016-2021, Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2018 telah menetapkan 14 sasaran yakni sebagai berikut :

1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan.
4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan.
5. Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama.
6. Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya.
7. Terciptanya daya saing Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya.
8. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.
9. Terwujudnya pola dan struktur ruang sesuai dengan RTRW.
10. Meningkatnya produktifitas perekonomian kota.
11. Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan.
12. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



13. Pengurangan tingkat resiko akibat bencana.
14. Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak dan kesejahteraan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator sasaran serta target yang hendak dicapai sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Sasaran di atas merupakan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Binjai selama tahun 2016-2021.

TABEL 2.1 KORELASI ANTARA MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”.

| TUJUAN | SASARAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Menciptakan tata kelola pemerintahan Kota Binjai yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. | 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. |
| | 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. |
| | 3. Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan. |
| 2.Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. | 4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan. |
| 3.Meningkatkan kualitas dan ketaqwaan, dengan mewujudkan masyarakat yang religius dalam suasana kerukunan hidup beragama yang harmonis dan dinamis. | 5. Meningkatnya kehidupan beragama dan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama. |

Misi II : “Membangun sumber daya manusia berkualitas (*smart people*) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera”.



| TUJUAN | SASARAN |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4. Menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing. | 1. Terciptanya daya saing Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya. |
| | 2. Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya. |

Misi III : “ Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat”.

| TUJUAN | SASARAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Meningkatkan kualitas dan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota melalui efektifitas pembangunan infrastruktur. | 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. |
| | 4. Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan RTRW. |

Misi IV : “Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang trampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (*Smart Economy dan Smart Environment*)”.

| TUJUAN | SASARAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM. | 5. Meningkatnya produktifitas perekonomian kota. |
| | 6. Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi UMKM yang berbasis potensi lokal. |
| | 7. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. |

Misi V : “ Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan”.



| TUJUAN | SASARAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan. | 8. Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. |
| | 9. Pengurangan tingkat resiko akibat bencana. |

| TABEL 2.2 | KORELASI ANTARASASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (Smart Governance) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”. | |

| SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. | a) Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik | 1) Pembangunan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dan aplikasi telematika dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. |
| | b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik | 1) Penataan Organisasi Perangkat daerah yang efektif dan efisien. 2) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi. 3) Penataan SDM Aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 4) Peningkatan Administrasi |



| | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>pemerintahan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>5) Peningkatan kesejahteraan aparatur.</p> <p>6) Peningkatan penerapan Hukuman dan Penghargaan bagi aparatur pemerintah.</p> |
| | <p>c) Meningkatkan sinergitas antar daerah (dalam/luar negeri), antar sektor dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah.</p> | <p>1) Peningkatan kerjasama kemitraan strategis dengan kabupaten/kota lainnya, pemerintah provinsi.</p> <p>2) Peningkatan kerjasama melalui multi pihak dalam dan luar negeri.</p> <p>3) Mengembangkan kualitas kerjasama dengan Mass Media.</p> <p>4) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah.</p> <p>5) Melakukan peningkatan kerjasama antar daerah di Kawasan MEBIDANGRO di berbagai bidang dengan prinsip saling menguntungkan <i>win-win solution</i>(<i>simbiosis mutualisme</i>).</p> |
| | <p>d) Peningkatan pendapatan asli daerah.</p> | <p>1) Peningkatan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan asli daerah</p> <p>2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam</p> |



| | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.</p> <p>3) Peningkatan pelaksanaan intensitas dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.</p> <p>4) Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah.</p> |
| | e) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah. | <p>1) Melaksanakan perencanaan penganggaran dan pengembangan pengelolaan belanja berbasis kinerja.</p> <p>2) Peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang meliputi administrasi, kinerja, SDM, sarana prasarana dan keuangan.</p> |
| 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. | f) Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. | <p>1) Mengembangkan sistem perijinan dan non perijinan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu.</p> <p>2) Mengoptimalkan pengamanan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.</p> <p>3) Mengoptimalkan sistem informasi pertanahan.</p> |
| | g) Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan. | <p>1) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>2) Pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIMDUK)</p> |



| | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | dan Data Center Kependudukan yang tersambung secara Online dengan provinsi dan nasional. |
| | h) Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB. | 1) Memperkuat kelembagaan pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas. 2) Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja. 3) Peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan pernumbuhkembangan anak. |
| | i) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak. | 1) Peningkatan perlindungan perempuan dan anak. 2) Peningkatan peran serta masyarakat terhadap kesetaraan gender. |
| 3. Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan. | j) Peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. | 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang). 2) Optimalisasi kemitraan antara lembaga eksekutif, legislatif dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. |
| | k) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. | 1) Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif. 2) Penguatan basis data statistik dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan. |



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>3) Mengefektifkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.</p> <p>4) Meningkatkan promosi dan publikasi hasil-hasil pembangunan.</p> <p>5) Penerapan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan berbasis IT.</p> <p>6) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.</p> |
| | <p>1) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.</p> | <p>1) Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal.</p> <p>2) Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD.</p> <p>3) Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah.</p> |
| <p>4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat kecamatan dan</p> | <p>m) Meningkatkan Wawasan kebangsaan.</p> | <p>1) Peningkatan pemahaman dan pengamalan 4 pilar kebangsaan (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Wawasan Nusantara).</p> |



| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kelurahan | | 2) Peningkatan pemahaman politik masyarakat. |
| | n) Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan kelurahan. | 1) Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan kelurahan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan kelurahan. 2) Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan kelurahan dalam pengelolaan keuangan dan aset kelurahan. 3) Penyelesaian penyusunan profil kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan. |
| | o) Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. | 1) Peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan; 2) Pengoptimalan penyelesaian persoalan hukum. 3) Pengoptimalan pengkajian produk hukum daerah dan tata hukum. |
| | p) Meningkatkan partisipasi masyarakat kelurahan. | 1) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kelurahan. 2) Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan. 3) Mendorong peran serta masyarakat dalam |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | perencanaan pembangunan di kelurahan. 4) Peningkatan lembaga ekonomi kelurahan. 5) Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan kelurahan. |
| 6. Meningkatnya kehidupan beragama dan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama. | q) Meningkatnya pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama. | 1) Peningkatan pemahaman keagamaan, melalui peringatan hari-hari besar keagamaan. 2) Pembinaan pemahaman dan pengamalan agama terhadap anak, remaja dan pemuda. 3) Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan non formal keagamaan. |
| | r) Meningkatkan komunikasi intern dan antar ummat beragama. | 1) Peningkatan toleransi antar umat beragama melalui forum komunikasi antar umat beragama (FKUB). 2) Pemberdayaan lembaga keagamaan dan sosial. |

Misi II : “Membangun sumber daya manusia berkualitas (*smart people*) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera”.

| SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Terciptanya daya saing Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya. | a) Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan. | 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2) Menuntaskan wajib belajar 9 tahun. |



| | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none">3) Persiapan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 12 tahun.4) Rintisan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 12 tahun.5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan.6) Memberikan bantuan beasiswa prestasi bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. |
| | b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. | <ul style="list-style-type: none">1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.2) Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.3) Peningkatan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal. |
| | c) Pengembangan Perpustakaan umum dan sekolah untuk meningkatkan budaya membaca anak sekolah dan masyarakat umum. | <ul style="list-style-type: none">1) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah.2) Meningkatkan minat baca siswa sekolah dan masyarakat umum. |
| | d) Memfasilitasi dan mendorong semua lapisan masyarakat untuk senantiasa memanfaatkan sarana pendidikan formal dan non | <ul style="list-style-type: none">1) Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Pendidikan dan Pelatihan Kerja.2) Meningkatkan pendidikan informal bagi tenaga terampil pendamping |



| | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | formal untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap. | pembangunan masyarakat. |
| | e) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang meliputi sehat jasmani, sehat pangan, sehat sandang, sehat papan dan sehat lingkungan. | <ol style="list-style-type: none">1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar.2) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan.3) Peningkatan pembangunan puskesmas sesuai standar serta pengembangan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap serta meningkatkan polindes menjadi poskesdes.4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan.5) Peningkatan kemandirian masyarakat dan mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan KLB penyakit menular dan cara menghindari terjadinya kasus lebih banyak.6) Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.7) Peningkatan upaya |



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>promosi kesehatan dalam mencapai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui kerjasama lintas bidang dengan partisipasi <i>stakeholder</i>.</p> <p>8) Peningkatan upaya pencegahan penyakit tidak menular.</p> <p>9) Peningkatan kesadaran pemeliharaan kesehatan bagi penduduk usia lanjut.</p> |
| 8. Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya. | f) Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. | <p>1) Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.</p> <p>2) Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kepemudaan dan keolahragaan.</p> |
| | g) Pelestarian adat, budaya dan kearifan lokal dalam semua aspek kehidupan sosial masyarakat. | <p>1) Pembinaan pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan budaya.</p> <p>2) Peningkatan kapasitas lembaga kesenian.</p> <p>3) Peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sejak usia dini.</p> <p>4) Peningkatan penggunaan bahasa dan nilai-nilai budaya dalam aktifitas pemerintahan dan kemasyarakatan.</p> |

Misi III : “Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat”.



| SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. | a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan. | 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan. |
| | b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta kelembagaan sumber daya air. | 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan air baku. 2) Peningkatan konservasi untuk pelestarian Sumber Daya Air dan pengendalian dampak kerusakan akibat daya rusak air (pengendalian banjir). 3) Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Air. |
| | c) Meningkatkan sistem transportasi daerah | 1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan. 2) Peningkatan kualitas manajemen lalu lintas dan angkutan jalan. 3) Peningkatan pembinaan teknis penggunaan transportasi yang berkelanjutan. |
| | d) Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman. | 1) Meningkatkan kualitas sarana dan |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>prasarana pelayanan air bersih dan air minum.</p> <p>2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana persampahan.</p> <p>3) Peningkatan kualitas sistem jaringan drainase.</p> <p>4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sanitasi.</p> <p>5) Peningkatan pengelolaan taman dan hutan kota.</p> <p>6) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</p> |
| | e) Mendorong kontribusi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. | 1) Penyusunan, penyebarluasan informasi dan Implementasi Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Daerah. |
| | f) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. | 1) Meningkatkan peran serta Dunia Usaha dan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan dana CSR. |
| 10. Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan RTRW. | g) Meningkatkan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. | <p>1) Menyelesaikan Revisi Perda tentang RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030.</p> <p>2) Menyusun Rencana Detail Tata Ruang sebagai peraturan pelaksanaan Perda</p> |



| | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | RTRW Kota Binjai. 3) Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang. 4) Peningkatan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Misi IV : “ Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang trampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (*Smart Economy dan Smart Environment*)”.

| SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Meningkatnya produktifitas perekonomian kota. | a) Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan. | 1) Mempertahankan tingkat produksi pangan. 2) Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian. 3) Menghidupkan dan memperkuat kelembagaan pertanian. |
| | b) Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan. | 1) Meningkatkan jumlah ternak kecil dan unggas. 2) Memperkuat fungsi-fungsi pengawasan penyakit yang berhubungan dengan hewan. 3) Menghidupkan dan memperkuat lembaga kelompok peternak. 4) Peningkatan kemampuan/kualitas SDM peternak. |
| | c) Meningkatkan produksi dan produktifitas | 1) Peningkatan produksi perikanan dan |



| | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | perikanan. | budidaya. 2) Peningkatan sistem kelembagaan perikanan, pembudidayaan dan pengolahan ikan. 3) Peningkatan pemasaran produk-produk perikanan. |
| | d) Mendorong tumbuhnya industri pengolahan bahan baku dan industri kreatif. | 1) Pengembangan Kawasan Industri pengolahan bahan baku. 2) Pengembangan Cluster Industri Kreatif. 3) Pembinaan Wirausaha muda. |
| | e) Mendorong dan memfasilitasi Investasi masuk ke Kota Binjai sebagai <i>agent of development</i> . | 1) Pengembangan BUMD di bidang Sumber Daya Alam. 2) Melakukan promosi produk unggulan daerah di dalam dan luar negeri. |
| | f) Mendorong tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa. | 1) Peningkatan dan revitalisasi pasar tradisional. 2) Pembinaan dan pengembangan kawasan khusus perdagangan. |
| | g) Mengembangkan kawasan wisata terpadu | 1) Perencanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan wisata. 2) Peningkatan promosi dan kerjasama |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>pariwisata.</p> <p>3) Mengembangkan gerakan sadar wisata berbasis komunitas.</p> <p>4) Mengembangkan ekowisata berbasis taman kota (<i>Eco Green City</i>).</p> <p>5) Pengembangan pariwisata berbasis Religi dan budaya.</p> |
| 12. Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi UMKM yang berbasis potensi lokal. | h) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan | <p>1) Peningkatan kapasitas koperasi dan lembaga keuangan mikro.</p> <p>2) Peningkatan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha.</p> <p>3) Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat.</p> <p>4) Peningkatan pengawasan kualitas bahan makanan produksi UMKM.</p> <p>5) Mengembangkan industri kreatif dan Kerajinan Rakyat.</p> |
| 13. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. | i) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu. | <p>1) Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan baku mutu udara, air dan</p> |



| | | |
|--|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | tanah. 2) Pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota. 3) Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah |
| | j) Meningkatkan pengelolaan DAS dan sempadan sungai. | 1) Terpeliharanya taman kota dan daerah tangkapan air di kawasan perkotaan. 2) Terjaganya sempadan sungai. 3) Penyediaan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4) Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. |

Misi V : “ Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan”

| SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. | a) Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan sehat. | 1) Mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat. 2) Penataan kawasan kumuh dan bedah rumah kurang layak. 3) Peningkatan kebersihan lingkungan kelurahan. |
| | b) Meningkatkan | 1) Peningkatan |



| | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | pemberdayaan kelembagaan sosial. | kepedulian masyarakat terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak terlantar dan jompo. 2) Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial. 3) Peningkatan upaya rehabilitasi sosial terhadap korban narkoba, trafficking dan HIV/AIDS. 4) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. |
| | c) Menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. | 1) Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Pendidikan dan Pelatihan Kerja. 2) Meningkatkan pendidikan informal bagi tenaga terampil pendamping pembangunan masyarakat. 3) Mengoptimalkan program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui Program Padat Karya Produktif 4) Perlindungan tenaga kerja dengan penegakan peraturan tentang ketenagakerjaan dan meningkatkan fungsi lembaga Bipartit dan tripartit. 5) Peningkatan kualitas Sumber Daya |



| | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Manusia dengan Pelatihan ketrampilan yang berbasis kompetensi. |
| | d) Meningkatkan pengendalian dan pemeliharaan kamtrantibmas serta pencegahan dan pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 1) Peningkatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2) Pemeliharaan kamtrantibmas dan penegakan korban kriminal. 3) Pemberantasan penyakit masyarakat secara rutin dan terkoordinasi dengan aparat penegak hukum. |
| 15. Pengurangan tingkat resiko akibat bencana. | e) Meningkatkan pelayanan penanggulangan dan pengendalian bencana. | 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan penanggulangan dan pengendalian bencana. 2) Persiapan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana. 3) Peningkatan cakupan pelayanan kesiapsiagaan penanggulangan dan pengendalian bencana. |

**TABEL
2.3****TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA.**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja sasaran.



Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. | 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. | <ol style="list-style-type: none">1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah.2. Indeks Persepsi Korupsi dilihat dari kasus yang ditangani.3. Terbangunnya dan terimplementasinya sistem administrasi pemerintahan elektronik (Elektonic government/e-Gov).<ul style="list-style-type: none">- e-Office.- e-Planning.- e-Budgeting.- e-Procurement.- e-Performance.4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP).5. Persentase SKPD menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).6. Rasio PAD terhadap Total APBD.7. Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD. |



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none">8. Persentase Pajak/Retribusi terhadap Total Pendapatan.9. Persentase Belanja Modal terhadap total APBD.10. Persentase Dana transfer dari pusat (Dana Perimbangan) terhadap total pendapatan daerah. |
| | 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. | <ul style="list-style-type: none">1. Jumlah sertifikat tanah pemerintah.2. Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk.3. Rasio Akseptor KB.4. Cakupan Keluarga Siaga Aktif.5. Persentase keterkaitan perempuan di lembaga pemerintahan.6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan.7. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).8. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk. |
| | 3. Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan. | <ul style="list-style-type: none">1. Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum.2. Persentase Hasil Musrenbang yang disepakati ke dalam RKPD.3. Jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD. |
| 2. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. | 4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat kecamatan dan kelurahan. | <ul style="list-style-type: none">1. Jumlah Aparatur pemerintah kota mendapat pelatihan penjenjangan.2. Jumlah Aparatur Pemerintah Kota mendapat Tugas Belajar dan ikatan dinas.3. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kecamatan |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>dan Kelurahan yang baik.</p> <p>4. Persentase Kecamatan dan Kelurahan menyusun Sistem Informasi Profil Kecamatan dan Kelurahan.</p> |
| <p>3. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kerukunan hidup antar ummat beragama, peran pemuda, olahraga dan seni budaya.</p> | <p>5. Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama.</p> | <p>1. Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan.</p> <p>2. Jumlah Organisasi keagamaan mendapat pembinaan.</p> |
| | <p>6. Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya.</p> | <p>1. Jumlah Organisasi Pemuda mendapat pembinaan.</p> <p>2. Jumlah Organisasi Olahraga mendapat pembinaan.</p> <p>3. Jumlah kegiatan Kepemudaan.</p> <p>4. Jumlah kegiatan olahraga.</p> <p>5. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dibangun.</p> <p>6. Jumlah gedung pemuda dibangun.</p> |
| <p>4. Menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing.</p> | <p>7. Terciptanya daya saing di Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya.</p> | <p>1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka Harapan Hidup - Angka Harapan Lama Sekolah. - Lama Sekolah. - Pengeluaran Perkapita. <p>2. Indeks Pendidikan.</p> <p>a. Rata-rata Lama Usia Sekolah</p> |



| | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>b. Angka Buta Huruf.</p> <p>c. APK/APM Pendidikan Formal.</p> <ul style="list-style-type: none">- APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).- APM Jenjang SD (SD/MI/Paket A).- APK Jenjang (SD/SDLB/MI).- APK Jenjang SMP (SMP/SMPLB/MTs).- APM Jenjang SLTP (SMP/MTs/Paket B).- APK Jenjang SMA (SMA/SMK/SMALB/MA)- APM Jenjang SMA (SMA/SMK/SMALB/MA) <p>d. Angka Putus Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none">- Angka putus sekolah SD/MI.- Angka putus sekolah SMP/MTs- Angka putus sekolah SMS/MA/SMK. <p>e. Pembangunan SMK berbasis unggulan daerah.</p> <p>f. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.</p> <p>g. Persentase Guru bersertifikat Pendidik</p> <p>3. Indeks Kesehatan :</p> <p>14. Status Kesehatan dan Gizi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Angka kematian bayi (AKB)/1000KH- Angka kematian ibu (AKI)/100.000KH |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Persentase balita gizi buruk.- Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun). <p>15. Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rasio dokter per satuan penduduk.- Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk.- Rasio tenaga medis per satuan penduduk.- Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).- Jumlah Puskesmas yang minimal lima jenis tenaga kesehatan. <p>16. Kesehatan Rumah Tangga dan Lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).- Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, taman, rekreasi dan tempat hiburan, dan lainnya). |
| 5. Meningkatkan kualitas dan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota melalui efektifitas | 8. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang | <p>1. Kebinamargaan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Panjang jalan Kota dalam kondisi baik.- Proporsi jalan Kota dalam Kondisi mantap.- Panjang jembatan |



| | | |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pembangunan insfrastruktur. | tepat sasaran. | <p>dalam kondisi baik.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rasio Jembatan Kota dalam kondisi baik/mantap. <p>2. Pengairan/Sumber Daya Air.</p> <ul style="list-style-type: none">- Panjang bronjong terbangun.- Jumlah panjang drainase/parit beton dibangun.- Waduk buatan terbangun.- Pengurangan luas genangan banjir setiap tahun. <p>3. Sanitasi dan Air Bersih.</p> <ul style="list-style-type: none">- Proporsi RT dengan akses air bersih.- Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari.- Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal.- Persentase penanganan sampah.- Cakupan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. <p>4. Perhubungan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah halte terbangun untuk pengembangan Moda Transportasi mendukung Trans MEBIDANG. <p>5. Infrastruktur pendukung Industri dan Perdagangan.</p> |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pasar Kecamatan yang ditata/direhabilitasi. - Jumlah pasar semi modern dibangun. - Pembangunan Kampung Ekonomi kreatif sebagai sentra pemasaran produk unggulan. - Pembangunan Kawasan/Centra industri berbasis online (<i>e-commerce</i>). <p>6. Pengembangan KSN MEBIDANGRO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan peningkatan jalan akses ke ruas Jalan Tol Medan-Binjai. - Pengembangan kawasan industri dan Pusat Pergudangan (Kawasan) |
| | 9. Terwujudnya pola dan Struktur Ruang yang sesuai dengan RTRW | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Revisi RTRW Kota Binjai 2017-2037. 2. Tersusunnya RDTR Kota Binjai. |
| 6. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM. | 10. Meningkatnya produktifitas perekonomian. | <p>1. Kondisi Makro Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laju Pertumbuhan Ekonomi. - PDRB ADHB. - PDRB ADHK - PDRB/Kabita (ADHB) Tahun Dasar 2010. - Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini). - Ketimpangan Regional (Indeks Williamson). - APBD - ICOR <p>2. Daya Saing Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lama proses perijinan (hari kerja setelah |



| | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>berkas lengkap).</p> <ul style="list-style-type: none">- Nilai Investasi (PMTB). <p>3. Ketahanan Pangan</p> <p>Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Beras (Ribuan Ton).- Jagung- Kedelai- %Swasembada- Konsumsi kalori Kota Binjai- Penurunan konsumsi beras.- Penurunan Jumlah Keluarga Rawan Pangan (KK).- Skor Pola Pangan Harapan. <p>4. Perindustrian/Perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontribusi sektor Industri pengelolaan terhadap PDRB.- Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran ; Reparasi Mobil dan sepeda motor terhadap PDRB.- Kontribusi Sektor Jasa (Jasa Perusahaan, Jasa Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya). <p>5. Informasi dan Komunikasi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB.- Tersedianya akses hotspot internet gratis (WiFi) pada pusat-pusat ekonomi dan sosial masyarakat.- Persentase penduduk |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | yang menggunakan HP/Telepon. |
| | 11. Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Koperasi Aktif. 2. Jumlah UKM non BPR/LKM. |
| | 12. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan. <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia alat ukur pengendali pencemaran udara. - Jumlah taman publik/Kawasan Bottanical Garden/hutan kota/terbangun. - Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. |
| | 13. Pengurangan tingkat resiko akibat bencana. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. 2. Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. |
| 7. Mewujudkan kualitas standar hidup (<i>Smart Living</i>) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. | 14. Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi Keadilan Sosial. <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kemiskinan. - Tingkat Pengangguran Terbuka. - Penciptaan Wirausahawan baru. - Rasio ketersediaan daya listrik. - Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat. - Rerata lama sekolah penduduk umur 15 Tahun +. - Persentase penyandang |



| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none">- Persentase rumah tinggal bersanitasi.- Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan rehabilitasi social Tidak Layat Huni (RERTLH). |
| 8. Mewujudkan kualitas standar hidup (Smart Living) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. | 14. Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. | <p>2. Dimensi Keadilan Sosial.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tingkat Kemiskinan.- Tingkat Pengangguran Terbuka.- Penciptaan Wirausahawan baru.- Rasio ketersediaan daya listrik.- Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat.- Rerata lama sekolah penduduk umur 15 Tahun +.- Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial.- Persentase rumah tinggal bersanitasi.- Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH). <p>3. Dimensi Keadilan Ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan (layak huni).- Persentase penduduk |



| | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>usia 15 Tahun keatas yang bekerja.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rerata pengeluaran per kapita/bulan terhadap garis kemiskinan.- Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.- Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha.- Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH).- Anak terlantar dan anak jalanan yang terbina. <p>4. Dimensi Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban.</p> <ul style="list-style-type: none">- Penurunan Angka Kriminalitas- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.- Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat.- Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.- Jumlah Linmas per 10.000 penduduk. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



2.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BINJAI

Isu Strategis Pembangunan Kota Binjai dalam rangka mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan Kota Binjai, yaitu :

1. **Mendesaknya Perwujudan Kota Layak Huni**, dalam tatanan masyarakat perkotaan, keluhan akan ketidaknyamanan lingkungan tempat tinggal dari masalah fisik (kemacetan, tidak terawatnya fasilitas umum dan fasilitas sosial, masalah kebersihan lingkungan) hingga masalah non fisik (tingkat kepedulian masyarakat, kenyamanan beribadah, kenyamanan anak dan kaum perempuan, keterjangkauan daya beli dan ketersediaan barang pokok) adalah realita yang mendasari keinginan setiap masyarakat akan sebuah kota yang nyaman dan memang layak untuk dihuni atau *Liveable city*. Kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kota harus dinaikkan terkait keseharian mereka dengan kemudahan dalam mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja, ruang dan taman hijau.
2. **Peningkatan Daya Saing Daerah**, sebagai kota satelit (*buffering city*) dari kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai akan selalu dihadapkan pada ancaman kompetisi antar daerah dengan Kota Medan dalam memperebutkan potensi dasar konsumen yaitu dari masyarakat Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat hingga Kota Binjai sendiri. Kompetisi tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan yang akhirnya menentukan seberapa banyak masyarakat Kota Binjai dan masyarakat daerah berbatasan tersebut menghabiskan penghasilannya di Kota Binjai. Selain kompetisi regional, Kota Binjai akan dihadapkan pada kompetisi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah diluncurkan pada tahun 2015. Kesiapan SDM secara keahlian dan permodalan serta penguatan ketahanan ekonomi lokal agar masyarakat selalu mengutamakan barang lokal adalah pekerjaan rumah mendesak yang harus segera dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Binjai.
3. **Perwujudan Kota Berwawasan Lingkungan**, desakan dalam agenda internasional yang menggariskan pembangunan dan modernisasi suatu



daerah harus disandarkan pada konsep Kota Berwawasan Lingkungan (*Enviromentally Sustainable City*) yang harus mampu mencapai dua hal strategis yaitu pertama, sebagai daya dukung kota untuk menunjang kenyamanan aktifitas warganya, dan kedua, sebagai daya tarik kota sebagai percontohan dan investasi.

4. **Potensi Percepatan Pembangunan Kota Cerdas dalam Kawasan Strategis Nasional Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo)**, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 adalah suatu kawasan Strategis Nasional yang menjadi kawasan prioritas untuk percepatan pertumbuhan dan pembangunan daerah. Pembentukan kelembagaan KSN Mebidangro, pembangunan jalan Tol Medan-Binjai dan pembangunan Infrastruktur publik menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan ini. Terkait potensi KSN tersebut, maka Kota Binjai harus melaksanakan percepatan tersebut dengan desakan perencanaan pembangunan Kota Cerdas yang terbagi atas 6 (enam) ruang lingkup yaitu : pembangunan SDM dengan IPM diatas rata-rata Provinsi (*smart people*), lingkungan yang ramah dan hijau (*smart environment*), infrastruktur publik yang baik dan terjangkau (*smart living*), jaringan jalan berkualitas baik dan pilihan moda transportasi yang beragam (*smart mobility*), kemudahan bekerja dan berusaha (*smart economy*), dan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta terpercaya (*smart government*).
1. Kota Cerdas adalah Kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan *performance*-nya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk lebih terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya ada tiga faktor penilaian Kota Cerdas, yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial dan cerdas lingkungan.
 2. Kota dinilai cerdas secara ekonomi, apabila sebuah kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan Teknologi Informasi Komunikasi, tata kelola dan peran Sumber Daya manusia yang baik.
 3. Kota dinyatakan cerdas secara sosial, apabila masyarakat dalam sebuah kota memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam



melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah.

4. Kota dinyatakan cerdas apabila warga kotanya memiliki tempat tinggal yang layak huni, sehat, hemat dalam penggunaan energi serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan Teknologi Informasi/Komunikasi, pengelolaan dan peran Sumber Daya Manusia yang baik.

Rencana Kinerja selama 5 lima tahun sesuai RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 beserta Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

| Tabel 2.4 | | TARGET RENCANA KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2016-2021 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| Sasaran I : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | | | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Capaian Kinerja | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Indeks Persepsi Korupsi dilihat dari kasus yang ditangani. | 5 kasus | 5 kasus | 5 kasus | 5 kasus | 5 kasus | 5 kasus |
| 3 | Terbangunnya dan terimplementasinya sistem administrasi pemerintahan elektronik (elektronik goverment/e-Gov) e-Office e-Planning e-Budgetting e-Procurement e-Performance | 1 | - | 1 1 1 1 | - | - | - |
| 4 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP). | CC | CC | CC | B | B | B |
| 5 | Persentase SKPD menerapkan Sistem Pengendalian Intern | 25% | 30% | 50% | 75% | 90% | 100% |



| | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | Pemerintah (SPIP). | | | | | | |
| 6 | Rasio PAD terhadap Total APBD | 8,66% | 9,77% | 10,39% | 11,90% | 11,91 % | 11,00 % |
| 7 | Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD. | 51,4% | 48,7% | 47,9% | 46,2% | 44,4% | 43,0% |
| 8 | Persentase Pajak/Retribusi terhadap Total Pendapatan | 7,95% | 8,93% | 9,25% | 9,52% | 9,74% | 9,86% |
| 9 | Persentase Belanja Modal terhadap total APBD. | 21,2% | 22,4% | 23,4% | 25,8% | 28,6% | 30,5% |
| 10 | Persentase Dana transfer dari pusat (Dana Perimbangan) terhadap total pendapatan daerah. | 71,23% (Menurun) | 67,23 % | 65,33% | 62,94% | 60,44 % | 57,40 % |

Sasaran II : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Capaian Kinerja | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah sertifikat tanah pemerintah. | 45 Sertifikat tanah | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 2 | Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk. | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.21% | 1.21% | 1.21% |
| 3 | Rasio Akseptor KB. | 75,00% | 76,98% | 77,12% | 77,25% | 77,36% | 77,45% |
| 4 | Cakupan Keluarga Siaga Aktif. | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
| 5 | Persentase keterkaitan perempuan di lembaga pemerintahan. | 40% | 40% | 41% | 42% | 43% | 45% |
| 6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% |
| 7 | Kepemilikan Kartu Tanda | 90% | 90,57% | 92,57% | 94,57% | 96,57% | 100% |



| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Penduduk (KTP). | | | | | | |
| 8 | Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk. | 14% | 15% | 17% | 19% | 22% | 25% |

Sasaran III : Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan.

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Capaian Kinerja | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum. | 50% | 50% | 60% | 65% | 70% | 70% |
| 2 | Persentase Hasil Musrenbang yang disepakati ke dalam RKPD. | 10% | 12,5% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 3 | Jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD. | 2Perda | 2 Perda | 2 Perda | 2 Perda | 4 Perda | 4 Perda |

Sasaran IV : Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Capaian Kinerja | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Aparatur pemerintah kota mendapat pelatihan penjenjangan. | 91 Org/tahun | 91 | 94 | 94 | 98 | 98 |
| 2 | Jumlah Aparatur Pemerintah Kota mendapat Tugas Belajar dan ikatan dinas. | 32 org | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 3 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang baik. | 50% | 62% | 65% | 70% | 75% | 80% |



| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|----|-----|
| 4 | Persentase Kecamatan/ Kelurahan menyusun Sistem Informasi Profil Kecamatan/ Kelurahan (%) | - | - | 50 | 70 | 80 | 100 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|----|-----|

Sasaran V : Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Capaian Kinerja | | | | | |
|----|-------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan | 2 Keg/tahun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Jumlah Organisasi keagamaan mendapat pembinaan. | 5 organisasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Sasaran VI : Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya.

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Capaian Kinerja | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah Organisasi Pemuda mendapat pembinaan. | 62 organisasi | 64 | 66 | 65 | 70 | 72 |
| 2 | Jumlah Organisasi Olahraga mendapat pembinaan | 28 organisasi | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 3 | Jumlah kegiatan Kepemudaan. | 5 Keg/tahun | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 4 | Jumlah kegiatan olahraga. | 9 Keg/tahun | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di bangun | - | - | - | 1 | - | - |



| 6 | Jumlah gedung pemuda dibangun | - | - | - | - | 1 | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sasaran VII : Terciptanya daya saing di Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya | | | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Capaian Kinerja | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM). | 74,42 % IPM | 75,24 % IPM | 76,15 % IPM | 77,06 % IPM | 77,89 % IPM | 78,86 % IPM |
| 2 | Angka Harapan Hidup | 71,79 tahun | 71,88 | 72,16 | 72,43 | 72,70 | 72,97 |
| 3 | Angka Harapan Lama Sekolah | 13,64 tahun | 13,94 | 14,26 | 14,58 | 14,90 | 15,22 |
| 4 | Lama Sekolah | 10,63 Tahun | 11,03 | 11,43 | 11,84 | 12,19 | 12,47 |
| 5 | Pengeluaran Perkapita | 10,14 (Rp.Juta) | 10,19 | 10,23 | 10,27 | 10,31 | 10,35 |
| | Indeks Pendidikan | | | | | | |
| 6 | Rata-rata Lama Usia Sekolah | 9,87 Tahun | 9,91 | 9,95 | 9,99 | 10,04 | 10,08 |
| 7 | Angka Buta Huruf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | .9,69 | 10,22% | 10,67 | 11,07 | 11,43 | 11,76 |
| 9 | APM Jenjang SD (SD/MI/Paket A) | 100,42% | 120,33% | 121,9 8% | 123,44% | 124,74 % | 125,91 % |
| 10 | APK Jenjang (SD/SDLB/MI). | 118,43% | 120,33% | 121,9 8% | 123,44% | 124,74 % | 125,91 % |
| 11 | APK Jenjang SMP(SMP/SMPL B/MTs). | 110,60% | 111,86% | 112,9 6% | 113,93% | 114,80 % | 115,58 % |
| 12 | APM Jenjang SLTP(SMP/MTs/ Paket B). | 77,85% | 79,67% | 79,79 % | 80,13% | 82,64 % | 82,64% |
| 13 | APK Jenjang SMA(SMA/SMK/ SMALB/MA | 108,06% | 112,22% | 115,8 2% | 119,01% | 121,85 % | 124,42 % |
| 14 | APM Jenjang SMA | 99,32% | 99,36% | 99,37 % | 99,38% | 99,39 % | 99,40% |



| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | (SMA/SMK/SM ALB/MA). | | | | | | |
| 15 | Angka Putus Sekolah SD/MI. | 0,0036% | 0,0032% | 0,0029% | 0,0026% | 0,0024% | 0,0024% |
| 16 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs. | 0,0006% | 0,0006% | 0,0005% | 0,0005% | 0,0004% | 0,0004% |
| 17 | Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK. | 0,0007% | 0,0006% | 0,0006% | 0,0005% | 0,0005% | 0,0005% |
| 18 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 1670 Orang | 1678 | 1686 | 1695 | 1703 | 1712 |
| 19 | Persentase Guru bersertifikat Pendidik. | 64,09% | 68,88% | 73,68% | 78,48% | 83,27% | 88,07% |
| | Indeks Kesehatan | | | | | | |
| 21 | Angka kematian bayi. | 3,47 AKB/1000KH | 3,35 AKB/1000KH | 3,26 | 3,17 | 3,09 | 3,00 |
| 22 | Angka kematian ibu | 72,00 AKI/ 100.000KH | 70,80 AKI/ 100.000KH | 69,40 | 67,80 | 60,00 | 50,00 |
| 23 | Persentase balita gizi buruk. | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| 24 | Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun). | 71,79 %/ tahun | 71,88 %/ tahun | 72,16 | 72,43 | 72,70 | 72,97 |
| 25 | Rasio dokter per satuan penduduk | 1:740 | 1:738 | 1:720 | 1:702 | 1:686 | 1:669 |
| 26 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 1: 264.935 | 1: 266.230 | 1: 267.352 | 1: 268.342 | 1: 269.227 | 1: 270.028 |
| 27 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk. | 1:740 | 1:738 | 1:720 | 1:702 | 1:689 | 1:669 |
| 28 | Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI). | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| 29 | Jumlah Puskesmas yang minimal | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |



| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | memiliki lima jenis tenaga kesehatan | | | | | | |
| 30 | Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% |
| 31 | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, taman, rekreasi dan tempat hiburan, dan lainnya). | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% |

Sasaran VIII : Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Capaian Kinerja | | | | | |
|----|------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Kebinamargaan | | | | | | |
| | Panjang jalan Kota dalam kondisi baik. | 294,02km | 304,70km | 315,38km | 326,07km | 336,75km | 347,43km |
| | Proporsi jalan Kota dalam Kondisi mantap. | 81.59% | 84.56% | 87.52% | 90,49% | 93.45% | 96,42% |
| | Panjang jembatan dalam kondisi baik. | 914,40m | 929,40m | 944,40m | 921,79m | 936,20m | 950,62m |
| | Rasio Jembatan Kota dalam kondisi baik/mantap. | 95,17 | 96,73 | 98,29 | 95,94 | 97,44 | 98,94 |
| 2. | Pengairan/Sumber Daya Air. | | | | | | |
| | Panjang bronjong terbangun. | 3.050m | 3.100m | 3.150m | 3.200m | 3.250m | 3.300m |



| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | Panjang drainase/parit beton dibangun. | 3.000m | 3.000 m | 3.000m | 3.000m | 3.000m | 3.000m |
| | Waduk buatan yang terbangun | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | Pengurangan luas genangan banjir setiap tahun. | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| 3. | Sanitasi dan Air Bersih | | | | | | |
| | Proporsi RT dengan akses air bersih | 20,73% | 20,82 % | 20,91% | 21,00% | 21,09% | 21,09% |
| | Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari | 20% | 25% | 30% | 35% | 37% | 40% |
| | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal | - | - | - | - | 1 | - |
| | Persentase penanganan sampah. | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |
| | Cakupan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. | 38% | 43% | 48% | 53% | 58% | 63% |
| 4. | Persentase sarana Perhubungan yang terbangun dan terpelihara dengan baik | | | | | | |
| | Jumlah halte terbangun untuk pengembanga | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |



| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----|--------|-----------|------------------------------|
| | n Moda Transportasi mendukung Trans MEBIDANG | | | | | | |
| 5. | Infrastruktur pendukung Industri dan Perdagangan | | | | | | |
| | Jumlah pasar kecamatan yang ditata/direhabilitasi | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | Jumlah pasar semi modern dibangun | - | - | - | 1 unit | - | - |
| | Pembangunan Kampung Ekonomi kreatif sebagai pemasaran produk unggulan | - | - | - | - | 1 kawasan | - |
| | Pembangunan kawasan/centra industri berbasis online (<i>e-commerce</i>) | - | - | - | - | - | 1 Aplikasi <i>e-commerce</i> |
| 6. | Pengembangan KSN MEBIDANGRO | | | | | | |
| | Pemeliharaan dan peningkatan jalan akses ke ruas jalan Tol Medan-Binjai (m) | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Pengembangan kawasan industri dan pusat pergudangan | - | - | - | - | 1 kawasan | - |
| Sasaran IX: Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | | | | | | | |
| 1 | Revisi RTRW | - | 1perda | - | - | - | - |



| | Kota Binjai 2017-2037 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| 2 | Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). | - | - | - | 1 Dokumen | - | - |
| Sasaran X: Meningkatkan produktifitas perekonomian kota | | | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Capaian Kinerja | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Kondisi Makro Ekonomi | | | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan ekonomi | 6,32% | 6,80 | 7,01 | 7,25 | 7,39 | 7,44 |
| 2 | PDRB ADHB | 9,53 Triliun Rupiah | 10,808 | 12,262 | 13,920 | 15,850 | 17,950 |
| 3 | PDRB ADHK | 6,987 Triliun Rupiah | 7,462 | 7,985 | 8,564 | 9,196 | 9,881 |
| 4 | PDRB/Kapita (ADHB) Tahun Dasar 2010 | Rp 35,05. Juta | 39,69 | 44,39 | 49,72 | 55,78 | 62,28 |
| 5 | Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini). | 0,2448 | 0,2360 | 0,2284 | 0,2216 | 0,2150 | 0,2102 |
| 6 | Ketimpangan Regional (Indeks Williamson). | 0,0386 | 0,0389 | 0,0391 | 0,0389 | 0,0394 | 0,0395 |
| 7 | APBD | Rp. 1,023 Triliun | 1,026 | 1,096 | 1,192 | 1,305 | 1,413 |
| 8 | ICOR | Rp. 3,50 Triliun | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,50 |
| | Daya Saing Daerah | | | | | | |
| 1 | Lama proses perijinan (hari kerja setelah berkas lengkap). | 7hari | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Nilai Investasi (PMTB) | Rp. 20,35 Triliun | 20,55 | 20,95 | 21,15 | 21,30 | 21,34 |
| | Ketahanan Pangan | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi | | | | | | |
| 2 | Beras. | 19.000Ton | 19.500 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.000 |
| 3 | Jagung | 7.100ton | 7.150 | 7.200 | 7.250 | 7.300 | 7.300 |
| 4 | Kedelai | 50 ton | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| 5 | % Swasembada | 29,16% | 29,43 | 29,69 | 29,94 | 30,18 | 30,42 |
| 6 | Konsumsi kalori Kota Binjai | 2.090kalori | 2.095 | 2.100 | 2.105 | 2.110 | 2.110 |
| 7 | Penurunan konsumsi beras. | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 116 |
| 8 | Penurunan Jumlah Keluarga Rawan Pangan. | 12.150KK | 12.100 | 12.050 | 12.000 | 11.950 | 11.950 |
| 9 | Skor Pola Pangan Harapan. | 85,5% | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 87,5 |
| | Perindustrian/ Perdagangan. | | | | | | |
| 1 | Kontribusi sektor Industri pengelolaan terhadap PDRB. | 11,36% | 11,38 | 11,40 | 11,43 | 11,45 | 11,41 |
| 2 | Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran ; Reparasi Mobil dan sepeda motor terhadap PDRB. | 28,17% | 28,16 | 28,14 | 28,14 | 28,16 | 28,14 |



| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 3 | Kontribusi Sektor Jasa (Jasa Perusahaan, Jasa Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. | 13,81% | 13,80 | 13,85 | 13,74 | 13,68 | 13,95 |
| | Informasi dan Komunikasi. | | | | | | |
| 1 | Persentase Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB. | 2,86% | 2,83 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,80 |
| 2 | Tersedianya akses hotspot internet gratis (WiFi) pada pusat-pusat ekonomi dan sosial masyarakat (unit) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Persentase penduduk yang menggunakan Hp/Telepon | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Sasaran XI : Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan. | | | | | | | |
| 1 | Persentase Koperasi Aktif. | 57,92% | 59,96 % | 62% | 64,04% | 66,08% | 68,12% |
| 2 | Jumlah UKM non BPR/LKM. | 4854 UKM | 4655 | 4724 | 3824 | 6484 | 4854 |



| Sasaran XII : Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Lingkungan. Tersedia alat ukur pengendali pencemaran udara. | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Jumlah taman publik/Kawasan Bottanical Garden/hutan kota/terbangu n. | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. | 36% | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 |
| Sasaran XIII : Pengurangan tingkat resiko akibat bencana. | | | | | | | |
| 1 | Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. | 80% | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Sasaran XIV :Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan | | | | | | | |
| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Capaian Kinerja | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |



| | <i>Dimensi Keadilan Sosial.</i> | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Tingkat Kemiskinan | 6,07% | 5,89% | 5,70% | 5,52% | 5,34% | 5,00% |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka. | 9,47% | 8,83% | 7,98% | 7,11% | 6,22% | 5,21% |
| 3 | Penciptaan Wirausahawan baru. | 2000 orang | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4 | Rasio ketersediaan daya listrik. | 53,52% | 53,94 | 54,30 | 54,63 | 54,92 | 55,19 |
| 5 | Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Rerata lama sekolah penduduk umur 15 Tahun + | 10,63 | 11,03 | 11,43 | 11,84 | 12,19 | 12,47 |
| 7 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Persentase rumah tinggal bersanitasi. | 20,73% | 20,82 % | 20,91% | 21,00% | 21,09% | 21,29% |
| 9 | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah | 55 RSRTLH | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |



| | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Tidak Layak Huni (RSRTLH). | | | | | | |
| | Dimensi Keadilan Ekonomi. | | | | | | |
| 10 | Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan (layak huni). | 86% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
| 11 | Persentase penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja. | 59,54% | 60,34 % | 61,20% | 62,07% | 62,98% | 63,97% |
| 12 | Rerata pengeluaran per kapita/bulan terhadap garis kemiskinan. | 320.756 perkapita (Rp) | 326.203 | 320.756 | 335.083 | 338.806 | 342.174 |
| 13 | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | 5Unit | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha. | 120orang | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| 15 | Anak terlantar dan anak jalanan yang terbina. | 240 orang | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 |



| | Dimensi Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban. | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 1 | Penurunan Angka Kriminalitas. | 0,0019% | 0,0017 % | 0,0015 % | 0,0013% | 0,0011 % | 0,0009% |
| 2 | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% |
| 3 | Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat. | 2,93% | 3,03% | 3,13% | 3,23% | 3,33% | 3,43% |
| 4 | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. | 2,84 Per 10.000 penduduk | 2,99 | 3,18 | 3,40 | 3,66 | 3,95 |
| 5 | Jumlah Linmas per 10.000 penduduk. | 1,79 Per 10.000 penduduk | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,82 |

4 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Binjai Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dibahas pada tabel 2.4, telah disusun suatu Rencana Tahunan (*Annual Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kerja Tahun 2018 menggambarkan bagaimana mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan atau target kinerja Tahun 2018 dengan orientasi pencapaian sasaran strategis tahunan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.



Rencana kinerja Tahun 2018 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi. Dengan demikian seluruh proses pencapaian dan pengendalian aktivitas operasional di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja ini.

Berdasarkan pendekatan perencanaan yang menggunakan Rencana Kinerja Tahunan, akan tercermin adanya komitmen-komitmen baru terhadap perubahan kondisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan analisis faktor internal dan eksternal pada tahap penyusunan Renstra OPD.

Perubahan kondisi tersebut bisa jadi menuntut dilakukannya segera rencana tindak lanjut yang akan mengakomodasi dan sekaligus menunjukkan langkah antisipatif dan responsive terhadap perubahan kondisi lingkungan.

5**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2018.**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Kota Binjai secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya adalah Perjanjian Kinerja 2018 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang di dokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan.



Dengan demikian target kinerja tersebut tidak terlepas dari Isu Strategis Pembangunan Kota Binjai diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkandari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Daerah sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Walikota Pemerintah Kota Binjai Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

| | Sasaran strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Capaian 2018 | Sumber Data |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | WTP | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| | | 2 | Indeks Persepsi Korupsi dilihat dari kasus yang ditangani. | 5 kasus | Inspektorat |
| | | 3 | Terbangunnya dan Terimplemtasinya system administrasi pemerintahan (<i>elektronik governance</i>) | | Kominfo. Bappeda, Keuangan |
| | | - e - Office | | 1 | |
| | | - e - planning | | 1 | |
| | | - e - Budgeting | | 1 | |



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | - e - orformance | 1 | |
| | | 4 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP). | Kategori CC | Evaluasi Menpan RB |
| | | 5 | Persentase SKPD menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). | 50% | Inspektorat |
| | | 6 | Rasio PAD terhadap Total APBD | 10,39% | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| | | 7 | Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD. | 47,9% | |
| | | 8 | Persentase Pajak/Retribusi terhadap Total Pendapatan | 9,25% | |
| | | 9 | Persentase Belanja Modal terhadap total APBD. | 23,4% | |
| | | 10 | Persentase Dana transfer dari pusat (Dana Perimbangan) terhadap total pendapatan daerah. | 65,33=3% (Menurun) | |
| 2. | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. | 1 | Jumlah sertifikat tanah pemerintah. | 50 Sertifikat tanah | (Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Setdakot Binjai), BPN |
| | | 2 | Kependudukan dan Keluarga Berencana | | |
| | | | a. Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk. | 1.22% | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | | 2. Rasio Akseptor KB. | 77,12% | |
| | | | 3. Cakupan Keluarga Siaga Aktif. | 74% | |
| | | 4 | Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan |



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | a. Persentase keterkaitan perempuan di lembaga pemerintahan. | 41% | Masyarakat |
| | | 5 | Perlindungan Perempuan dan Anak | | |
| | | | a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan | 96% | |
| | | 6 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | a. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). | 92,57% | |
| | | | b. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk. | 17% | |
| 3. | Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan. | 1 | Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum. | 60% | Badan Kesbang dan Politik |
| | | 2 | Persentase Hasil Musrenbang yang disepakati ke dalam RKPD. | 15% | BAPPEDA |
| | | 3 | Jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD. | 2 Perda | Sekretariat DPRD, Bagian Hukum Setdakot Binjai |
| 4. | Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | 1 | Jumlah Aparatur Pemerintah Kota mendapat pelatihan penjenjangan. | 94 Org/tahun | BKD |
| | | 2 | Jumlah Aparatur Pemerintah Kota mendapat Tugas Belajar dan ikatan dinas. | 36 Orang | (Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Setdakot), BPN |
| | | 3 | Cakupan sarana prasarana | | |



| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | perkantoran pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik. | 65% | |
| | | 4 | Persentase Kecamatan kelurahan menyusun system Profil Kecamatan / Kelurahan. | 50% | (Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Setdakot), BPN |
| 5. | Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama | 1 | Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan | 2 Keg/tahun | (Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakot) dan Badan Kesbang dan Politik |
| | | 2 | Jumlah Organisasi keagamaan mendapat pembinaan. | 5 organisasi | |
| 6. | Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya. | 1 | Jumlah Organisasi Pemuda mendapat pembinaan. | 66 organisasi | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| | | 2 | Jumlah Organisasi Olahraga mendapat pembinaan | 30 organisasi | |
| | | 3 | Jumlah kegiatan Kepemudaan. | 7 Keg/tahun | |
| | | 4 | Jumlah kegiatan olahraga. | 11 Keg/tahun | |
| 7. | Terciptanya daya saing di Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya. | A | Indeks Pembangunan Manusia (IPM). | 76,15% | Dinas Pendidikan, BPS |
| | | | a. Angka harapan hidup. | 72,16 tahun | Dinas Kesehatan, BPS |
| | | | b. Angka harapan lama sekolah (Tahun) | 14,26 | Dinas Kesehatan, BPS |
| | | | c. Lama Sekolah (Tahun) | 11,43 | Dinas Pendidikan, BPS |



| | | B | Indeks Pendidikan. | | |
|--|--|----------|----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| | | 1 | <i>Rata-rata Lama Usia Sekolah.</i> | 9,95 Tahun | Dinas Pendidikan, BPS |
| | | 2 | <i>Angka Buta Huruf.</i> | 0% | Dinas Pendidikan, BPS |
| | | 3 | <i>APK/APM Pendidikan Formal.</i> | | |
| | | a. | <i>APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</i> | 10,67% | |
| | | b. | <i>APM Jenjang SD (SD/MI/Paket A).</i> | 101,11% | |
| | | c. | <i>APK Jenjang (SD/SDLB/MI).</i> | 121,98% | |
| | | d. | <i>APK Jenjang SMP (SMP/SMPLB/MTs)</i> | 112,96% | |
| | | e. | <i>APM Jenjang SLTP (SMP/MTs/Paket B).</i> | 79,79% | |
| | | f. | <i>APK Jenjang SMA (SMA/SMK/SMALB/MA).</i> | 115,82% | |
| | | g. | <i>APM Jenjang SMA (SMA/SMK/SMALB/MA).</i> | 99,32% | |
| | | 4 | Angka Putus Sekolah | | Dinas Pendidikan, BPS |
| | | a. | <i>Angka Putus Sekolah SD/MI.</i> | 0,0029% | |
| | | b. | <i>Angka Putus Sekolah SMP/MTs.</i> | 0,0005% | |
| | | c. | <i>Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK.</i> | 0,0006% | |
| | | 5 | Kualifikasi Pendidikan Guru | | |



| | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | a. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 1.686 Orang | Dinas Pendidikan, BPS |
| | | b. Persentase Guru bersertifikat Pendidik | 73,68% | |
| | | c Indeks Kesehatan | | |
| | | 1 Status Kesehatan dan Gizi masyarakat | | |
| | | a. Angka kematian bayi. | 3,26 | Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum |
| | | b. Angka kematian ibu (AKI)/ 1000 KH. | AKB/1000KH 69,40AKI/ 100.000KH | |
| | | c. Persentase balita gizi buruk. | 0,09% | |
| | | d. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun). | 72,16 %/ tahun | |
| | | 2. Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Dumber Daya Kesehatan. | | |
| | | a. Rasio dokter per satuan penduduk. | 1:720 | Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum |
| | | b. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk. | 1:267.352 | |
| | | c. Rasio tenaga medis per satuan penduduk. | 1:720 | |
| | | d. Rasio tenaga medis per satuan penduduk. | 1:720 | |
| | | e. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). | 98% | |



| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | | | f. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan | 1 | |
| | | 3. | Kesehatan Rumah Tangga dan Lingkungan | | |
| | | | a. Persentase rumah tangga berperilaku hidup sehat bersih dan sehat (PHBS) % | 77,00 | Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum |
| | | | b. Persentase tempat umum yang memenuhi syarat | 90,00 | |
| | Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. | 1. | Kebinomargaan. | | Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang |
| | | | a. Panjang jalan Kota dalam kondisi baik. | 315,38 km | |
| | | | b. Proporsi jalan Kota dalam Kondisi mantap. | 87.52% | |
| | | | c. Panjang jembatan dalam kondisi baik | 944,40m | |
| | | | d. Rasio Jembatan Kota dalam kondisi baik/ mantap. | 98,29 (%) | |
| | | 2 | Pengairan/Sumber Daya Air. | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | a. Panjang bronjong terbangun (m). | 3.150M | |
| | | | b. Jumlah Panjang Drainase/parit beton dibangun (m). | 3.000M | |
| | | | c. Pengurangan luas genangan banjir setiap tahun(%). | 30% | |
| | | 3 | Sanitasi dan Air Bersih | | Dinas Pekerjaan |
| | | | a. Proporsi RT dengan akses air bersih (%) | 20,91% | |



| | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | b. Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari (%). | 30% | Umum dan Penataan Ruang |
| | | | c. Persentase penanganan sampah (%) | 70% | |
| | | | d. Cakupan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%). | 48,00% | |
| | | 4 | Perhubungan | | |
| | | | Jumlah halte terbangun untuk pengembangan Moda Transportasi mendukung Trans Mebidang (Unit) | 5 Unit | Dinas Perhubungan |
| | | 5 | Infrastruktur pendukung Industri dan Perdagangan | 30% | Bagian Perekonomian |
| | | | Jumlah pasar Kecamatan yang ditata/ direhabilitasi . | 1 | Dinas Prindag dan Pasar |
| | | 6 | Pengembangan MEBIDANGRO | | |
| | | | Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan akses ke ruas jalan Tol Medan – Binjai.(M) | 250 M | |
| | | 1 | Kondisi Makro ekonomi | | |
| | | | a) Laju pertumbuhan ekonomi | 7,01% | BAPPEDA, BPS |
| | | | b) PDRB ADHB | 12,262 Triliun Rupiah | |
| | | | c) PDRB ADHK | 7,985 Triliun Rupiah | |
| | | | d) PDRB/ Kabita (ADHB) Tahun Dasar 2010 | Rp 44,39. Juta | BAPPEDA, BPS |



| | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | e) <i>Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini).</i> | 0,2360 | |
| | | f) <i>Ketimpangan Regional (Indeks Williamson).</i> | 0,2284 | |
| | | g) <i>APBD</i> | Rp. 1,096 Triliun | |
| | | h) <i>ICOR</i> | Rp. 3,00 Triliun | |
| | | 2 Daya Saing Daerah | | |
| | | a) <i>Lama proses perijinan (hari kerja setelah berkas lengkap).</i> | 7 hari | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu |
| | | b) <i>Nilai Investasi (PMTB)</i> | Rp. 20,95 Triliun | |
| | | 3 Ketahanan Pangan | | |
| | | <i>Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi</i> | | |
| | | a) <i>Beras.</i> | 20.000Ton | |
| | | b) <i>Jagung</i> | 7.200 ton | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | c) <i>Kedelai</i> | 100 ton | |
| | | d) <i>% Swasembada</i> | 26,69% | |
| | | e) <i>Konsumsi kalori Kota Binjai</i> | 2.100kalori | |
| | | f) <i>Penurunan konsumsi beras.</i> | 118 | |
| | | g) <i>Penurunan Jumlah Keluarga Rawan Pangan.</i> | 12.050KK | |
| | | h) <i>Skor Pola Pangan Harapan.</i> | 86,50% | |



| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| | | 4 | Perindustrian/ Perdagangan. | | |
| | | | a) Kontribusi sektor Industri pengelolaan terhadap PDRB. | 11,40% | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan, |
| | | | b) Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran ; Reparasi Mobil dan dan sepeda motor terhadap PDRB. | 28,14% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| | | | c) Kontribusi Sektor Jasa (Jasa Perusahaan, Jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. | 13,85% | BAPPEDA, BPS |
| | | 5 | Informasi dan Komunikasi. | | |
| | | | a) Persentase Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB. | 2,83% | Dinas Informatika dan Komunikasi |
| | | | b) Tersedianya akses hotspot internet gratis (WiFi) pada pusat ekonomi dan social masyarakat.(Unit) | 0,025 | |
| 11. | Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan. | 1 | Koperasi dan UMKM. | 59,96% | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| | | | a) Persentase Koperasi Aktif. | 62% | |
| | | | b) Jumlah UKM non BPR/LKM. | 4724 UKM | |



| | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 12. | Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. | 1 | Lingkungan. <i>a) Tersedia alat ukur pengendali pencemaran udara.</i> | 1 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | <i>b) Jumlah taman publik/ Kawasan Bottanical Garden /hutan kota /terbangun.</i> | - | |
| | | | <i>c) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.</i> | 42% | |
| 13. | Pengurangan tingkat resiko akibat bencana. | 1 | Penanggulan Bencana. <i>a) Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.</i> | 100% | BPBD |
| | | | <i>b) Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.</i> | 84% | |
| 14. | Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. | 1 | Dimensi Keadilan Sosial. | | |
| | | | <i>a) Tingkat Kemiskinan</i> | 5,70% | Dinas Sosial |
| | | | <i>b) Tingkat Pengangguran Terbuka.(%).</i> | 7,98% | Dinas Tenaga Kerja dan Perdagangan Perindustrian |
| | | | <i>c) Penciptaan Wirausahawan baru.</i> | 2000 orang | |
| | | | <i>d) Rasio ketersediaan daya listrik.</i> | 54,30% | Bagian Perekonomian, PLN |



| | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | e) <i>Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat.</i> | 100% | Rumah Sakit |
| | | f) <i>Rerata lama sekolah penduduk umur 15 Tahun +.</i> | 11,43 | Dinas Pendidikan |
| | | g) <i>Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial.</i> | 100% | Dinas Sosial |
| | | h) <i>Persentase rumah tinggal bersanitasi.</i> | 20,91% | Dinas Kesehatan |
| | | i) <i>Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH).</i> | 60 RSRTLH | Dinas Sosial |
| | | 2 Dimensi Keadilan Ekonomi. | | |
| | | a) <i>Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan (layak huni).</i> | 87% | Dinas Kesehatan |
| | | b) <i>Persentase penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja.</i> | 61,20% | Dinas Tenaga Kerja dan Perdagangan Perindustrian |
| | | c) <i>Rerata pengeluaran per kapita/ bulan terhadap garis kemiskinan.</i> | 320.756 perkapita (Rp) | BAPPEDA, BPS |
| | | d) <i>Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah</i> | 100% | |



| | | | | | |
|--|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | menerima jaminan social. | | |
| | | | e) Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | 5Unit | |
| | | | f) Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha. (Orang). | 130 Orang | |
| | | | g) Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Social Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Unit. | 60 Unit | |
| | | | h) Anak terlantar dan anak jalanan yang terbina. | 244 Orang | |
| | | 3 | Dimensi Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban. | | |
| | | | a) Penurunan Angka Kriminalitas. | 0,0015% | |
| | | | b) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. | 81% | |
| | | | c) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat. | 3,13% | |
| | | | d) Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. | 3,18 Per 10.000 penduduk | |
| | | | e) Jumlah Linmas per 10.000 penduduk. | 1,80 Per 10.000 penduduk | |
| | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kota Binjai selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas salah satunya melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai. Laporan Kinerja diharapkan mampu memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Binjai kedepan harus mampu membangun sebuah sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam hal ini Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara Pemerintah dengan Publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Binjai diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

Secara Umum Pemerintah Kota Binjai telah berupaya untuk merealisasikan Sasaran Strategis yaitu dengan melaksanakan Program Kerja Strategis dan Kegiatan Strategis yang telah menjadi komitmen Setiap SKPD/Unit Kerja yang ada di Kota Binjai yang tertuang Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dari 14 sasaran strategis dan didukung oleh 123 pelaksanaan Indikator Kinerja dan Strategis pada Perjanjian Kinerja 2018, dan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis serta indikator kinerja akan dapat diwujudkan secara optimal.

Pemerintah Kota Binjai pada Tahun 2018 adalah tahun kedua RPJMD Tahun 2016-2021 dalam hal ini Pemerintah Kota Binjai bertekad untuk menselaraskan atau mensinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | $\geq 90,1$ | Sangat Baik | |
| 2 | $75,1 \leq 90$ | Tinggi | |
| 3 | $65,1 \leq 75$ | Sedang | |
| 4 | $50,1 \leq 65$ | Rendah | |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | |



Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018.

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2018

| Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (Smart Governance) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Tujuan 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan Kota Binjai yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. | | | | |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Capaian |
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | WDP | WTP |
| | | Indeks Persepsi Korupsi dilihat dari kasus yang ditangani. | 5 | 9 |
| | | Terbangunnya dan Terimplemtasinya system administrasi pemerintahan (elektronik governance) | | |
| | | - e - Office | 1 | 1 |
| | | - e - Planning | 1 | 1 |
| | | - e - Budgeting | 1 | 1 |
| | | - e - Porfamence | 1 | 1 |
| | | - | | |
| | | Nilai Akuntabilitas | | |



| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP). | CC | CC |
| | | Persentase SKPD menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). | 50 | 40 |
| | | Rasio PAD terhadap Total APBD | 10,39 | 9,17 |
| | | Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD. | 47,7 | 45 |
| | | Persentase Pajak/Retribusi terhadap Total Pendapatan | 9,25 | 8,27 |
| | | Persentase Belanja Modal terhadap total APBD. | 23,4 | 22,00 |
| | | Persentase Dana transfer dari pusat (Dana Perimbangan) terhadap total pendapatan daerah. | 65,33 (Menurun) | 80,00 |
| 2. | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik | Jumlah sertifikat tanah pemerintah | 50 Sertifikat tanah | 60 Sertifikat tanah |
| | | Rata-rata Laju perumbuhan penduduk. | 1.22 | 1,22 |
| | | Rasio Akseptor KB. | 77,12 | 75,29 |
| | | Cakupan Keluarga Siaga Aktif. | 74 | 75,5 |
| | | Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah | 41 | 41 |
| | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapat penenganan | 96 | 96 |
| | | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). | 92,57 | 95% |
| | | Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 | 17 | 40,93% |



| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | penduduk. | | |
| 3. | Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan. | Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum | 60% | - 60% |
| | | Persentase Hasil Musrenbang yang disepakati ke dalam RKPD. | 15% | 10% |
| | | Jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD. | 2 | 4 |
| Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. | | | | |
| 4. | Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Aparatur pemerintah kota mendapat pelatihan penjenjangan. | 94 Org/tahun | 15 Org/tahun |
| | | Jumlah Aparatur Pemerintah Kota mendapat tugas Belajar dan ikatan dinas. | 36 orang | 5 orang |
| | | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang baik | 65% | 55% |
| | | Persentase kecamatan /Kelurahan menyusun system informasi profil kecamatan/Kelurahan (%) | 50% | 50% |



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas dan ketaqwaan, dengan mewujudkan masyarakat yang religius dalam suasana kerukunan hidup beragama yang harmonis dan dinamis. | | | | |
| 5. | Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama | Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan | 2 keg/tahun | 2 keg/tahun |
| | | Jumlah Organisasi keagamaan mendapat pembinaan. | 30 organisasi | 30 organisasi |
| 6. | Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya. | Jumlah Organisasi Pemuda mendapat pembinaan. | 7 organisasi | 7 organisasi |
| | | Jumlah Organisasi Olahraga mendapat pembinaan | 28 organisasi | 27 |
| | | Jumlah kegiatan Kepemudaan. | 11 Keg/Thn | 9 Keg/tahun |
| | | Jumlah kegiatan olahraga. | 11 Keg/Thn | 8 Keg/Thn |

Misi II : “Membangun sumber daya manusia berkualitas (*smart people*) dengan kualifikasi Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera”.

Tujuan 4 : Menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Capaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 7. | Terciptanya daya saing di Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM). | 76,15 % IPM | 70,00 % IPM |
| | | Angka Harapan | 72,16 tahun | 71,67 |



| | | | | |
|--|--|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Hidup | | |
| | | Angka Harapan Lama Sekolah | 14,26 tahun | 11,,06 tahun |
| | | Pengeluaran Perkapita | 10,23 (Rp.Juta) | 10,24 (Rp.Juta) |
| | | Indeks Pendidikan. | | |
| | | <i>Rata-rata Lama Usia Sekolah</i> | 9,95 tahun | 10,12 tahun |
| | | <i>Angka Buta Huruf</i> | 0% | 0% |
| | | APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | 10,67% | 9,64% |
| | | APM Jenjang SD (SD/MI/Paket A). | 100,11% | 101,76% |
| | | APK Jenjang SD/SDLB/MI). | 121,98% | 105,57% |
| | | APK Jenjang SMP (SMP/SMPLB/MTs) | 112,96% | 113,83% |
| | | APM Jenjang SLTP(SMP/MTs/ Paket B). | 79,79% | 80,78% |
| | | APK Jenjang SMA(SMA/SMK/SM ALB/MA). | 115,82% | 117,00% |
| | | APM Jenjang SMA(SMA/SMK/SM ALB/MA) | 99,37% | 88,50% |
| | | Angka Putus Sekolah SD/MI. | 0,0029% | 0,0020% |
| | | Angka Putus Sekolah SMP/MTs. | 0,0006% | 0,018% |
| | | Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK | 0,0006% | 0,001486 |
| | | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 1686 orang | 2.000 orang |



| | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | |
| | | Persentase Guru bersertifikat Pendidik. | 73,68% | 75,13% |
| | | <i>Indeks Kesehatan</i> | | |
| | | Angka kematian bayi. | 3,26 AKB/1000KH | 0 |
| | | Angka kematian ibu | 70,80 AKI/100.000 KH | 87,00 AKI/100.000KH |
| | | Persentase balita gizi buruk | 0,09% | 0,1 |
| | | Usia Harapan Hidup | 72,16 | 72,20 |
| | | Rasio dokter per satuan penduduk. | 1:720 | 1:720 |
| | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk. | 1:264.935 | 1:265.935 |
| | | Rasio tenaga medis per satuan penduduk. | 1:720 | 1:715 |
| | | Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). | 98% | 98% |
| | | Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan. | 1 | 1 |
| | | Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). | 77% | 65,50 |
| | | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, taman, rekreasi dan tempat hiburan, dan lainnya). | 90% | 90% |
| | | | | |



Misi III : Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat”.

Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas dan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota melalui efektifitas pembangunan infrastruktur.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 8 | Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur tepat sasaran | Kebinamargaan Panjang jalan Kota dalam kondisi baik. | 315,38 km | 345,00 |
| | | Proporsi jalan Kota dalam Kondisi mantap. | 87.52% | 98,50 |
| | | Panjang jembatan dalam kondisi baik. | 944,40 m | 1000,55 m |
| | | Rasio Jembatan Kota dalam kondisi baik/mantap. | 98,29 (%) | 100,00 (%) |
| | | Pengairan/Sumber Daya Air. | | |
| | | Panjang bronjong terbangun. | 3.150 m | 5.000 m |
| | | panjang drainase/parit beton dibangun. | 3.000 m | 125. 36 m |
| | | Pengurangan luas genangan banjir setiap tahun. | 30% | 10% |



| | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| | | Sanitasi dan Air Bersih | | |
| | | Proporsi RT dengan akses air bersih | 20,91% | 20,91% |
| | | Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari | 25% | 23% |
| | | Persentase penanganan sampah. | 70% | 65% |
| | | Cakupan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. | 48% | 45% |
| | | Perhubungan | | |
| | | Jumlah Halte terbangun untuk pengembangan Moda Transportase mendukung Trans Mebidang (Unit) | 1 | 4 |
| 9 | Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai RTRW | Revisi RTRW Kota Binjai 2017-2037 | 1 perda | 1 perda |

Misi IV : “ Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang trampil, Inovatif, Kreatif dan Produktif (Smart Economy dan Smart Environment

Tujuan 6 : Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Capaian |
|----|-------------------|-------------------------------|--------|---------|
|----|-------------------|-------------------------------|--------|---------|



| | | | | |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 10 | Meningkatnya produktifitas perekonomian kota. | Kondisi Makro Ekonomi | | |
| | | Laju pertumbuhan ekonomi | 7,01% | 6,50% |
| | | PDRB ADHB | 12,262 Triliun Rupiah | 10.985 |
| | | PDRB ADHK | 7,985 Triliun Rupiah | 6.965 |
| | | PDRB/Kabita (ADHB) Tahun Dasar 2010 | Rp 44,39. Juta | 35,00 |
| | | Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini). | 0,2284 | - |
| | | Ketimpangan Regional (Indeks Williamson). | 0,0391 | - |
| | | APBD | Rp. 1,096 Triliun | - |
| | | ICOR | Rp. 3,00 Triliun | - |
| | | Daya Saing Daerah | | |
| | | Lama proses perijinan (hari kerja setelah berkas lengkap). | 7hari | 7 hari |
| | | Nilai Investasi (PMTB) | Rp. 20,95 Triliun | - |
| | | Ketahanan Pangan | | |
| | | Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi | | |
| | | Beras. | 20.500ton | 22.528 ton |
| | | Jagung | 7.200 ton | 11.250 ton |
| | | Kedelai | 100 ton | 20 Ton |



| | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | % Swasembada | 29,69% | 29,69% |
| | | Konsumsi kalori Kota Binjai | 2.100 kkal/kapita/hari | 1.775 kkal/kapita/hari |
| | | Penurunan konsumsi beras. | 118 | 95,50 |
| | | Penurunan Jumlah Keluarga Rawan Pangan. | 12.050 KK | 11.750 KK |
| | | Skor Pola Pangan Harapan. | 86,5% | 80,10 |
| | | Perindustrian/ Perdagangan. | | |
| | | Kontribusi sektor Industri pengelolaan terhadap PDRB. | 11,40% | 10,36% |
| | | Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran ; Reparasi Mobil dan dan sepeda motor terhadap PDRB. | 28,14% | 28,00% |
| | | Kontribusi Sektor Jasa (Jasa Perusahaan, Jasa Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa | 13,85% | 13,52% |



| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| | | lainnya. | | |
| | | Informasi dan Komunikasi. | | |
| | | Persentase Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB. | 2,85% | 2,85% |
| | | Tersedianya akses hotspot internet gratis (WiFi) pada pusat pasar ekonomi dan social masyarakat (Unit) | 2 | 0 |
| 11 | Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi UMKM yang berbasis potensi lokal. | Persentase Koperasi Aktif. | 59,96% | 59,96 |
| | | Jumlah UKM non BPR/LKM. | 4655 UKM | 4655 UKM |
| 12 | Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. | Lingkungan. Tersedia alat ukur pengendali pencemaran udara. | 1 | - |
| | | Jumlah taman publik/Kawasan Botanical Garden/hutan kota/terbangan. | 2 | - |
| | | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.(%). | 42% | 44% |



Misi V : “ Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan”.

Tujuan 7 : Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Capaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 13. | Pengurangan tingkat resiko akibat bencana. | Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. | 100% | 100% |
| | | Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. | 82% | 84% |
| 14. | Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. | Dimensi Keadilan Sosial. | | |
| | | Tingkat Kemiskinan | 5,70% | 6,00* |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka. | 7,98% | 10,00* |
| | | Penciptaan Wirausahawan baru. | 2000 orang | 1.775 orang |
| | | Rasio ketersediaan daya listrik. | 54,30% | 55,50% |
| | | Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat. | 100% | 100 |
| | | Rerata lama sekolah penduduk umur 15 Tahun (%) | 11,43 | 11,43 |
| | | Persentase (%) penyandang cacat fisik | 100% | 100 |



| | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial. | | |
| | | Persentase rumah tinggal bersanitasi. | 20,91% | 31% |
| | | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH). | 60 RSRTLH | 0% RSRTLH |
| | | Dimensi Keadilan Ekonomi. | | |
| | | Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan (layak huni). | 87% | 85% |
| | | Persentase penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja. | 61,20 | 40 |
| | | Rerata pengeluaran per kapita/bulan terhadap garis kemiskinan. | 320.756 Perkapita (Rp) | 305.596 Perkapita (Rp) |
| | | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | 5 unit | 3 unit |
| | | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha. | 130 orang | 125 orang |
| | | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH). | 60 RSRTLH | 0% |
| | | Anak terlantar dan anak jalanan yang terbina. | 244 orang | 27 orang |
| | | Dimensi Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban. | | |
| | | Penurunan Angka Kriminalitas. | 0,0015% | 0,0014% |
| | | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. | 81% | 83% |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat. | 3,13% | 1,80% |
| | | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. | 3,18 Per 10.000 penduduk | 3,85 Per 10.000 penduduk |
| | | Jumlah Linmas per 10.000 penduduk. | 1,80 Per 10.000 penduduk | 1,50 Per 10.000 penduduk |

3.2.Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Sasaran I : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Perkembangan Pemerintah Kota Binjai terhadap opini BPK pada laporan keuangan Pemko Binjai tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), target RPJMD tahun 2018 dengan opini WTP terealisasi dan terwujud karena hasil pemeriksaan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Jadwal dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang didalamnya memuat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemko Binjai tahun 2018 akan dilakukan pada



Gambar 3.1. Grand Launching Aplikasi e-Government Binjai Smart City

bulan Pebruari 2018. Peluncuran Binjai *Smart city* menjadi babak baru bagi pelayanan publik di Kota Binjai khususnya dalam mendukung keberhasilan Sasaran untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, Kini masyarakat akan lebih

mudah mendapatkan pelayanan dengan mengakses aplikasi yang tersedia dalam upaya Pemko Binjai mewujudkan *e-Government*.

Dalam perkembangannya Binjai meraih Penghargaan Government Award 2017 Kategori *e-Government* yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Soni Sumarsono, MDM, pada tanggal 3-4-2017 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat sebagai pelopor pertama di Sumatera Utara yang sudah berhasil menerapkan aplikasi-aplikasi pintar atau *smart city* di Kota Binjai, demi tercapainya pelayanan yang cepat, efisien dan transparan kepada seluruh masyarakat Kota Binjai. Dalam hal ini Kota Binjai berupaya untuk memaksimalkan pelaksanaan *Smart City* yang menjadi visi dan misi Kota Binjai.



Gambar 3.2. Walikota Binjai menerima Penghargaan Government Award 2017 Kategori *e-Government* yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Hotel Borobudur Jakarta Pusat.



Tabel 3.3. Realisasi Sasaran Pertama :

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | WDP | WTP | 100% | Sangat Baik |
| 2 | Indeks Persepsi Korupsi dilihat dari kasus yang ditangani. | 5 | 9 | 55% | Sangat Baik |
| 3 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP). | CC | CC | 100% | Sangat Baik |
| 4 | Persentase SKPD menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). | 50 | 40 | 80% | Tinggi |
| 5 | Rasio PAD terhadap Total APBD | 10,39% | 9,17% | 83,6% | Tinggi |
| 6 | Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD. | 47,9% | 45% | 94% | Tinggi |
| 7 | Persentase Pajak/Retribusi terhadap Total Pendapatan | 9,25% | 8,27% | 89,4% | Tinggi |
| 8 | Persentase Belanja Modal terhadap total APBD. | 23,4% | 22,00% | 94% | Tinggi |
| 9 | Persentase Dana transfer dari pusat (Dana Perimbangan) terhadap total pendapatan daerah. | 65,33% (Menurun) | 80,00% | 143% | Sangat Baik |



KET*) masih menunggu hasil pemeriksaan BPK.

Indeks Persepsi Korupsi dilihat dari kasus yang ditangani

Indikator Indeks Persepsi Korupsi dilihat dari kasus yang ditangani, dari target RPJMD tahun 2018 sekitar 5 kasus, dapat terealisasi pada tahun 2018 sebanyak 9 kasus, capaian persentase 180%.

Daftar Temuan (BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Kota Binjai) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara dan Daerah Tahun 2018

| No | Pemeriksa | Dinas Yang Ada Temuan Kerugian Negara/ Daerah | Jumlah Kerugian Negara/ Daerah (Rp) |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | BPK RI Perwakilan Provusu Tahun 2017 | 1. Dinas PU dan PR | 1.035.558.539,00 |
| | | 2. Sekretariat DPRD | 569.746.000,00 |
| | | 3. BPKPAD | 100.000,00 |
| | | 4. Dinas P3M | 262.845,00 |
| | | 4. Satuan Polisi PP | 719.350,00 |
| 2. | Inspektorat Provinsi Sumatera Utara | 1. Dinas PU dan PR | 33.194,026,00 |
| | | 2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindag | 89.055.000,00 |
| 3. | Inspektorat Kota Binjai | 1. Kecamatan Binjai Kota LHP No.Itko 096/LHP/2017/Rhs/tanggal 10 Juli 2017. | 6.128.200,00 |

Berdasarkan analisis perkembangan, maka permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil untuk masa sekarang dan ke depan adalah sebagai berikut :

| No | Faktor Pendukung | Permasalahan | Solusi |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Adanya dukungan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan | Masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah. | Mendorong SKPD agar dalam melaksanakan program/ kegiatan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 2. | Rapat Koordinasi, Pengawasan Tingkat Nasional dan Daerah yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. | Lemahnya fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. | Meningkatkan kemampuan SDM pengawasan yang profesional baik kualitas maupun kuantitas untuk membantu terselenggaranya pemerintahan yang baik. |



| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Tuntutan dari pelaksana pemerintahan dan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang amanah, bersih, jujur, profesional dan Demokratis. | Penyampaian data Tindak Lanjut dari SKPD yang kurang akurat dan sering terlambat. | Melakukan monitoring Tindaklanjutan Hasil Pemeriksaan (BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Binjai) secara periodik. |
| 4. | Adanya dukungan dari Pimpinan (Pembina ASN) dalam melakukan pengawasan. | Belum Semua Aparatur Sipil Negara mengikuti Sosialisasi tentang KKN | Perlu adanya Pengawasan Melekat (Waskat) |

Persentase SKPD menerapkan Sistem Penegendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengingat Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna terbangunnya Sistem Pengendalian Intern dan proses tata kelola yang baik merupakan salah satu domain Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), peran APIP pada manajemen pemerintahan diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan serta diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta diharapkan mampu mendorong terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan proses tata kelola yang baik pada ruang tugas masing-masing SKPD, terbangunnya sebuah sistem informasi kinerja yang terintegrasi sehingga informasi yang dihasilkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah dan perbaikan kinerja oleh pihak-pihak terkait. Mengingat belum terbitnya Pedoman teknis yang merupakan penjabaran lebih rinci dari PP Nomor 60 Tahun 2008, Inspektorat Daerah Kota Binjai didampingi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengevaluasi seberapa jauh kondisi kesempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai



tujuannya menggunakan konsep model maturitas untuk memetakan keberhasilan cara-cara yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan pelayanannya. Disamping itu model maturitastersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.

Terkait dengan hal di atas, pada Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kota Binjai melakukan Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) terhadap 10 (sepuluh) SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Binjai yang sudah menerapkan SPIP, yaitu : Inspektorat Daerah Kota Binjai, Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan PPTSP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan dan BPKPAD.

Dari hasil penilaian mandiri terhadap sampel 10 SKPD tersebut, diperoleh nilai 3,741 (terdefenisi).

Berdasarkan analisis perkembangan, maka permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil untuk masa sekarang dan kedepan adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor Pendukung beberapa Indikator :

1. Komitmen dan integritas yang tinggi dari Walikota Binjai beserta jajaran Pimpinan SKPD yang berwenang.
2. Bimtek dan sosialisasi.
3. Sistem Pembukuan dan Perencanaan Anggaran.
4. Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.
5. SPI yang memadai sehingga pelanggaran dapat dicegah.
6. Penanganan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK.
7. Kepatuhan terhadap perundang - undangan.

Permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran pertama :

1. Persoalan Aset yang besar dan Kompleks.
2. Kurangnya Pegawai yang berlatar belakang akuntansi.

Solusi dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran pertama :

1. Tersedianya sistem pengelolaan / manajemen aset daerah yang terintegrasi.
2. Penambahan pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi



Indikator Rasio PAD terhadap Total APBD, dari target RPJMD tahun 2018 sebesar 10,39 % dapat terealisasi pada tahun 2018 sebesar 9,17 %, Capaian persentase 83,6% yang artinya tidak tercapai sesuai target. Adapun rasio PAD terhadap total APBD tahun 2018 sebesar 10,39 % (100 %).

Analisis perkembangan, masalah serta peran dalam mendukung Sasaran pertama khususnya dalam meningkatkan capaian Indikator Rasio PAD terhadap Total APBD, maka permasalahan yang dihadapi dan Solusi yang diambil untuk masa sekarang dan kedepan adalah sebagai berikut :

| Faktor Pendukung/Pendorong | Permasalahan | Solusi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melakukan Konfirmasi kepada wajib pajak. 2. Pembentukan tim terpadu. 3. Penilaian ulang NJOP PBB. 4. Himbauan dan sosialisasi terhadap wajib pajak. 5. Sistem reward yang diberikan kepada pihak pihak yang berkaitan dengan penerimaan. | 1. Rendahnya kesadaran wajib pajak. 2. Potensi Daerah belum tergali secara maksimal. | 1. Melakukan penegakan Peraturan Daerah (supremasi hukum). 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah. 3. Melaksanakan Komunikasi Intensif dengan wajib pajak. 4. Melakukan Pendataan Subjek dan Objek Pajak. 5. Melaksanakan Pemeriksaan, Penelitian secara cermat terhadap pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan. 6. Melaksanakan pemutakhiran data objek dan subjek pajak. 7. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD. 8. Pembentukan Tim Penertiban. 9. Mengadakan Pendataan Potensi Pajak. |

Indikator Persentase Belanja Pegawai terhadap Total APBD, dari target RPJMD tahun 2018 sebesar 47,9% dapat terealisasi pada tahun 2018 sebesar 45 %, Capaian persentase 93,94 %. Adapun persentase belanja pegawai terhadap total APBD tahun 2018 sebesar 52,01 % .



Analisis perkembangan, masalah serta peran dalam mendukung sasaran pertamakhususnya dalam meningkatnya capaian dan solusi yang diambil untuk masa sekarang dan kedepan adalah sebagai berikut:

| Faktor Pendukung/Pendorong | Permasalahan | Solusi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil. 2. Rencana electronic Tunjangan Kinerja Daerah (e-TKD). | Belum adanya rasio jumlah pegawai yang ideal untuk melakukan pelayanan publik. | Perlu dilakukan efisiensi terhadap belanja pegawai sehingga persentase belanja pegawai terhadap APBD semakin ideal. |

Indikator Persentase Pajak/Retribusi terhadap Total Pendapatan, dari target RPJMD tahun 2018 sebesar 9,25% dapat terealisasi pada tahun 2018 sebesar 8,27 Capaian persentase 89,40 % yang artinya tidak tercapai sesuai target. Adapun persentase pajak / Retribusi total pendapatan tahun 2017 sebesar 4,05 %.

Analisis perkembangan, masalah serta peran dalam mendukung sasaranpertamakhususnya dalam meningkatkan capaian Indikator Persentase Pajak/Retribusi terhadap Total Pendapatan, maka permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil untuk masa sekarang dan kedepan adalah sebagai berikut :

| Faktor Pendukung/Pendorong | Permasalahan | Solusi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sistem reward yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan penerimaan PAD. 2. Adanya kebijakan yang dikeluarkan Pemko terkait pelaksanaan pemungutan PAD. 3. Adanya BUMN penyumbang PAD | 1. Rendahnya kesadaran wajib pajak. 2. Potensi pajak belum tergali secara maksimal. | 1. Melakukan konfirmasi terhadap wajib pajak. 2. Melakukan himbauan dan sosialisasi atas pajak daerah. 3. Penggalan potensi pajak. |

Indikator Persentase Belanja Modal terhadap total APBD, dari target RPJMD tahun 2018 sebesar 23,4 % dapat terealisasi pada tahun 2018 sebesar 22,0 %, Capaian persentase 94% yang artinya tidak tercapai sesuai target. Adapun persentase Belanja Modal terhadap total APBD tahun 2017



sebesar 22,4%. Berdasarkan analisis perkembangan capaian Indikator Persentase Belanja Modal terhadap total APBD, maka permasalahan yang dihadapi dan Solusi yang diambil untuk masa sekarang dan kedepan adalah sebagai berikut :

| Faktor Pendukung/Pendorong | Permasalahan | Solusi |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU). | 1. Terbatasnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dapat digunakan untuk belanja modal. | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. |
| 2. Besaran Pendapatan Asli Daerah. | 2. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah. | |

Indikator Persentase Dana transfer dari pusat (Dana Perimbangan) terhadap total pendapatan daerah, dari target RJPMD tahun 2018 sebesar 65,33 % dapat terealisasi pada tahun 2018 sebesar 84,16 %, Capaian Persentase 128,82 % yang artinya tercapai sesuai target. Adapun persentase Dana Transfer dari Pusat (Dana Perimbangan) terhadap total Pendapatan Daerah tahun 2017 sebesar 84,16 %,

Capaian Indikator Persentase Dana transfer dari pusat (Dana Perimbangan) terhadap total pendapatan daerah, maka permasalahan yang dihadapi dan Solusi yang diambil untuk masa sekarang dan kedepan adalah sebagai berikut :

| Faktor Pendukung/Pendorong | Permasalahan | Solusi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pelaporan penggunaan dana transfer tepat waktu 2. Komunikasi intensif dengan kementerian terkait. | Penggunaan dana transfer tidak sebesar anggaran yang dialokasikan | Update data secara berkala atas kegiatan yang dibiayai dari dana transfer |

Pada Tahun 2016, hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Binjai mendapat penilaian C dengan nilai 47,64 pada tahun 2017 naik 6,28 poin dengan tahun sebelumnya, artinya bahwa sistem dan tatanan



Pemerintah Kota Binjai kurang dapat diandalkan, sudah memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Hal ini tentu dikarenakan akuntabilitas kinerja di masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai belum menunjukkan kinerja yang baik. Diharapkan, melalui pembinaan yang baik dari aparat APIP, nilai Akuntabilitas Pemerintah Kota Binjai dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Untuk dapat menjadi pembina dan pengawas yang berkualitas dan profesional maka aparat APIP sudah seharusnya memiliki standar kompetensi keahlian. Standar keahlian (sertifikat) ini diperoleh melalui suatu Pendidikan dan Pelatihan Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP. Dengan Auditor yang telah bersertifikat (memiliki standar kompetensi) maka diharapkan aparat APIP mampu melaksanakan tugas secara obyektif dan independen, memenuhi kode etik dan standar audit, melaporkan hasil penugasan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, berkompetensi spesifik sesuai tupoksi APIP, punya kemauan mengembangkan profesi dengan didukung sarana dan sumber daya yang memadai, serta efisien dan efektif dalam penggunaan iptek di bidang pengawasan. Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai oleh Inspektorat Daerah Kota Binjai juga sering mendapat pengaduan dari masyarakat ataupun dari Instansi lain apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan Instansi maupun ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Untuk mengelola pengaduan tersebut, acuan yang digunakan Inspektorat Daerah Kota Binjai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tertanggal 7 April 2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. Di dalamnya dijelaskan mengenai etika dalam menangani pengaduan masyarakat, bagaimana penatausahaan dan pembuktian pengaduan, hasil penanganan, dan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat.



Penanganan Atas Pengaduan masyarakat sebagai inisiatif dalam upaya kerjasamadalam pemberantasan korupsi.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang dilakukan secara Reguler Komprefensif, Inspektorat Daerah Kota Binjai juga dapat melakukan pemeriksaan khusus atas pengaduan dari masyarakat ataupun dari instansi lain apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Selanjutnya pemeriksaan terhadap ASN/ Instansi dapat juga dilakukan apabila ada perintah khusus dari Walikota Binjai.

Kondisi pada awal tahun 2018, jumlah PNS Inspektorat Daerah Kota Binjai yang telah lulus ujian dan memperoleh sertifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 15 (lima belas) orang yang seluruhnya duduk sebagai Pejabat Fungsional Auditor, masing-masing 2 (dua) orang Auditor Madya, 4 (empat) orang Auditor Muda dan 9 (sembilan) orang Auditor Pertama.

Tabel 3.4.

Realisasi Sasaran Kedua : *Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.*

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Jumlah sertifikat tanah pemerintah | 50 Sertifikat tanah | 60 Sertifikat tanah | 120% | |
| 2 | Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk. | 1.22 | 1,22 | 100% | |
| 3 | Rasio Akseptor KB. | 77,12 | 75,29 | 97,62% | |
| 4 | Cakupan Keluarga Siaga Aktif. | 74 | 75,5 | 98% | |
| 5 | Persentase keterkaitan perempuan di lembaga pemerintahan. | 41% | 41% | 100% | |
| 6 | Cakupan perempuan dan | | | | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------|-------|--------|--------|--|
| | anak korban kekerasan mendapatkan penanganan | 96 | 96 | 100% | |
| 7 | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). | 92,57 | 95% | 97,44% | |
| 8 | Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk. | 17 | 40,93% | 100% | |

Indikator Kinerja Jumlah sertifikat tanah pemerintah, dari target 50 sertifikat, terealisasi 60 sertifikat, antara lain dibantu oleh dengan Kantor pertanahan Nasional Kota Binjai dan didampingi SDM Aparatur Pemko Binjai bidang pertanahan, solusinya karena dilakukan kordinasi antara pemerintah Kota Binjai dengan Badan Pertanahan Nasional, makanya capaian kinerja sekitar 120%, dengan Program Pemerintah Pusat. di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Indikator Persentase Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk dari target sebesar 1,22 % dapat terealisasi sebesar 1,22%. Capaian persentase 100% yang artinya tercapai sesuai target dan faktor pendorong, tercapainya target adalah salah satu telah dilaksanakannya program KB khususnya Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Indikator Rasio Akseptor KB dari target sebesar 77,12% dapat terealisasi sebesar 75,29 % Capaian persentase 97,6 % yang artinya tercapai adapun faktor pendorong, tercapainya target adalah KB sudah merupakan kebutuhan masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2018, angka kelahiran total (Total Fertilty Rate/TFR) diperkirakan 2,21% anak per wanita usia reproduksi. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan Program Pelayanan Kontrasepsi dari anggaran Rp 89.483.500 terealisasi Rp 89.208.500 dengan serapan anggaran sebesar 99,69% dan program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan anggaran sebesar Rp 350.131.000 dan terealisasi sebesar Rp 345.533.000 (98,68%).



Gambar 3.3. Wakil Walikota Binjai dalam Pencangan Kelurahan Limau Sundai Sebagai Kampung Keluarga Berencana (KB).



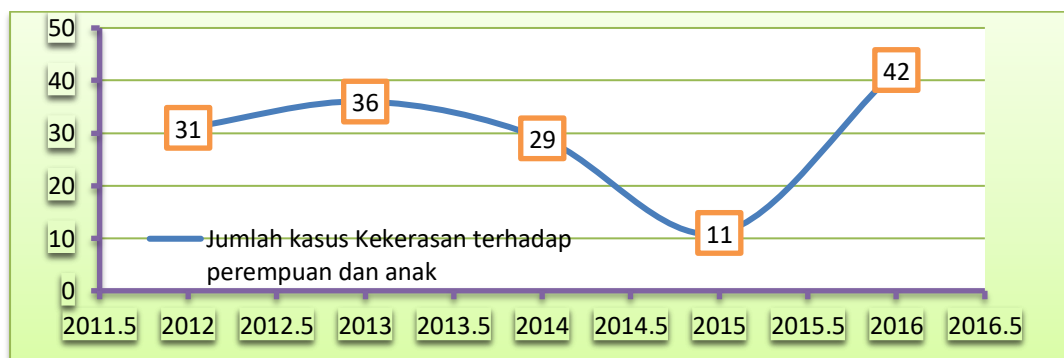
Gambar 3.4. Sekretaris Daerah Kota Binjai dalam Acara Pencanangan Kelurahan Bakti Karya menjadi Kampung Keluarga Berencana di Kota Binjai

Rincian kondisi umum dari penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana di Kota Binjai adalah Tingkat kesertaan ber KB diukur dari angka

persentase PUS yang menjadi peserta KB. Sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah peserta KB diperkirakan sebanyak 2900 peserta, dan jumlah PUS sebanyak 2997 pasangan dari target yang ingin dicapai sekitar 4034 pasangan, sehingga tingkat kesertaan ber KB dari seluruh pasangan usia subur (PUS) sebesar 74,29%. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp 788.666.200 dan terealisasi sebesar Rp 773.901.001 (98,13%).

Indikator Kinerja *Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan* dari target sebesar 96 % terealisasi sebesar 96%. Capaian persentase 100 % yang artinya dari jumlah kasus kekerasan yang ada yakni sekitar 42 kasus dibandingkan dengan jumlah rumah tangga 61.403 KK, maka diperoleh rasio korban kekerasan faktor 0,07, dalam hal ini hampir tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan kategori predikat capaian terhadap penanganan pada setiap kasus tersebut adalah cukup memuaskan.

Hal ini dipengaruhi oleh semakin maraknya kasus kekerasan kemungkinan besar disebabkan oleh persoalan ekonomi di setiap Keluarga dan kurangnya pemahaman hubungan harmonis antara sesama dalam rumah tangga. Berikut:



Grafik 3.2. Perkembangan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2012-2016.

Indikator Kinerja *Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)*, target 92,57% capaian kinerja sekitar 95% jumlah KTP tahun 2018 sebanyak 174.727 KTP yang dibandingkan tahun 2017 sebesar 42.964 KTP jiwa, faktor penurunan dan kenaikan disebabkan oleh nilai perbandingan jumlah



penduduk usia 17 tahun keatas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Indikator Kinerja *Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk*, target 17% realisasi 30,93%, jumlah Kepemilikan tahun 2018 sebanyak 85.749 jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebanyak 9497 jiwa, faktor penurunan atau kenaikan capaian kinerja dipengaruhi oleh perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakibatkan kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama.

Tabel 3.5.

Realisasi Sasaran Ketiga : *Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan.*

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum | 60 | - | - | |
| 2 | Persentase Hasil Musrenbang yang disepakati ke dalam RKPD. | 15 | 10 | 66,70% | |
| 3 | Jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD. | 2 | 4 | 100% | |

Indikator Kinerja Persentase Hasil Musrenbang yang disepakati ke dalam *RKPD*, dari target tahun 2018 sebesar 15% dapat terealisasi sebesar 66,70% yang artinya belum tercapainya sesuai target adalah kurangnya anggaran (sumber dana) yang tersedia. Berdasarkan analisis perkembangan, masalah serta peran BAPPEDA Kota Binjai dalam mendukung Sasaran Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan khususnya dalam meningkatkan capaian Indikator Persentase Hasil Musrenbang yang disepakati ke dalam *RKPD*, maka permasalahan yang dihadapi oleh BAPPEDA Kota Binjai dan Solusi yang diambil untuk masa sekarang dan kedepan adalah sebagai berikut :



| Faktor Pendukung/Pendorong | Permasalahan | Solusi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagr Nomor 25 Tahun 2010. | Belum seluruh SKPD mengerti Skala Prioritas. | <ul style="list-style-type: none">- Rekomendasi Tahun 2017 bahwa Sebelum Musrenbang perlu diadakan terlebih dahulu PraMusrenbang, pada tahun 2018 ditindaklanjuti dengan sistem e-musrenbang kepada masyarakat terutama di Kelurahan mulai dari seluruh Kepala Lingkungan se-Kota Binjai.- Perlu adanya pelatihan Aparatur yang berada pada SKPD untuk pemahaman terhadap Sistem Musrenbang sesuai dengan harapan Peraturan dan Skala Prioritas. |

Indikator Kinerja Jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD, dari target tahun 2018 sebesar 2 PERDA dapat terealisasi sebesar 4 Perda, Capaian persentase 100 % yang artinya melebihi target, hal ini karena target yang ditetapkan terlalu rendah. Adapun 7 (tujuh) Perda tersebut antara lain tentang Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, RPJMD 2016-2021, Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dan tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Binjai.

Tabel 3.6.

Realisasi Sasaran Keempat : Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Keberhasilan kapasitas pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Instansi yang diberi wewenang dalam mengelola manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai telah mengemban tugasnya sesuai dengan Renstra 2016-2021 menerapkan kebijakan antara lain :



- Menerapkan pola “ *The Right Man in The Right Place and The Right Man Behind The Right Job*”.
- Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Aparatur dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan di Kota Binjai. Keberhasilan kebijakan ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp 7.934.181.194 dan terealisasi sebesar Rp 6.947.441.420 (87,56%). Indikator ini berada dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai yaitu Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional umum direncanakan 486 orang dan terealisasi 566 orang, sehingga persentase capaian 116%.
- Meningkatkan pemberdayaan Aparatur sesuai dengan kompetensinya.
- Memberikan kesempatan peningkatan pendidikan formal pada Aparatur.

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Jumlah Aparatur pemerintah kota mendapat pendidikan kedinasan Struktural dan Fungsional. | 11 Org/tahun | 11 Org/tahun | 100% | Sangat Rendah |
| 2 | Jumlah Aparatur Pemerintah Kota mendapat Tugas Belajar dan ikatan dinas. | 4 Org/tahun | 2 Org/tahun | 50% | Sangat Rendah |
| 3 | Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional | 486 Org/tahun | 566 Org/tahun | 116 | Sangat Baik |
| 4. | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang baik | 65% | 55% | 84,61% | Sangat Baik |



Untuk Indikator *Jumlah Aparatur pemerintah kota mendapat pelatihan penjenjangan*, dari target perencanaan tahun 2018 sebesar 94 orang/tahun dapat terealisasi 11 orang/tahun, capaian kinerja terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan pelaksana Diklat (BPDSDM Provinsi Sumatera Utara) memberikan kuota peserta diklat yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah sasaran PNS yang dikirim oleh Pemerintah Kota Binjai.

Indikator *Jumlah Aparatur Pemerintah Kota mendapat Tugas Belajar dan ikatan dinas*, dari target perencanaan tahun 2018 sebesar 4 orang/tahun dapat terealisasi sebesar 2 orang/tahun, Capaian persentase 50 %, hal ini disebabkan oleh kurangnya minat PNS untuk mengikuti Tugas Belajar khususnya Tugas Belajar Dokter Spesialis termasuk S1 dan S2 STIA-LAN. Sedangkan untuk Ikatan Dinas Praja IPDN tidak lagi menjadi beban anggaran Pemerintah Kota Binjai melainkan dialihkan ke Provinsi Sumatera Utara.

Solusi yang dilakukan :

1. Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai akan berupaya dengan berkoordinasi ke BPDSDM Provinsi Sumatera Utara agar ada penambahan kuota peserta Diklat PIM III dan Diklat PIM IV untuk Pemerintah Kota Binjai serta berupaya agar ada penambahan anggaran untuk kegiatan Pelatihan Perjenjangan.
2. Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai akan meningkatkan pemberian informasi kepada Aparatur tentang penawaran Tugas Belajar kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Tabel 3.7

Realisasi Sasaran Kelima : *Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama*

Keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan, dari target RPJMD Kota Binjai tahun 2018 sebesar 2 keg/tahun dapat terealisasi sebesar 4 keg/tahun. Pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Binjai melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Binjai telah melaksanakan kegiatan keagamaan salah satu Program dalam mendukung capaian kinerja adalah Program Pembinaan Keagamaan dengan



anggaran sebesar Rp.5.068.765.741 dan terealisasi sebesar Rp 4.414.072.161 (94,14%) yang menjadi kegiatan tahunan dengan jenis kegiatan utama antara lain : Biaya Operasional Guru MDA Tahfidz Al,Quran dan Guru Sekolah Minggu se-Kota Binjai Tahun 2018 sebesar .687.500.000. dan terealisasi 100%, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Binjai, Santunan Kepada Kaum Duafa Dan Anak Yatim Se - Kota Binjai Tahun 2018 sebesar Rp 1.799.999.815. dan terealisasi sebesar 92%, Tim Fasilitasi Biaya Operasional dan Asuransi Jiwa Bilal Mayit dan Penggali Kubur, Pelatihan Leadership Remaja Mesjid, Festival Nasyid Tingkat Kota Binjai dan Mengikuti Seleksi Tingkat Provinsi, Kegiatan LPTQ Kota Binjai dilaksanakan untuk membina kerukunan antar ummat beragama.

Indikator kinerja Jumlah Organisasi keagamaan mendapat pembinaan, dalam pengertian perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu, dari target RPJMD Kota Binjai tahun 2018 sebesar 5 organisasi dapat terealisasi sebesar 5 organisasi. Capaian persentase 100 % yang artinya tercapai sesuai target dan Faktor pendorong karena adanya kegiatan dan perkumpulan keagamaan yang dilakukan, jenis organisasi keagamaan di Kota Binjai antara lain : Lembaga Masyarakat Muslim Peduli Umat, Serikat Tolong Menolong Abadi Barokah, Ikatan Da'i Kota Binjai, Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah, ICMI Kota Binjai.

Strategis pemecahan masalah yang perlu dilakukan adalah usaha Organisasi di bidang agama dengan cara meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan; di bidang pendidikan dengan cara menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan | 2 keg/tahun | 4 keg/tahun | 100% | Sangat Baik |
| 2 | Jumlah Organisasi | | | | |



| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-------------|
| | keagamaan mendapat pembinaan. | 5 organisasi | 5 organisasi | 100% | Sangat Baik |
|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-------------|

Tabel 3.8.

Realisasi Sasaran Keenam : *Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya.*

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Jumlah Organisasi Pemuda mendapat pembinaan. | 64 organisasi | - | - | |
| 2 | Jumlah Organisasi Olahraga mendapat pembinaan | 30 organisasi | 30 organisasi | 100% | Sangat Baik |
| 3 | Jumlah kegiatan Kepemudaan. | 7 Keg/tahun | 7 | 100% | Sangat Baik |
| 4 | Jumlah kegiatan olahraga. | 11 Keg/tahun | 9 | 81,81% | Sangat Rendah |

Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Binjai sesuai dengan RPJMD Kota Binjai melakukan pembinaan berupa bantuan alat-alat olahraga, pembibitan dan pembinaan Atlet berbakat SSB, Peningkatan Mutu organisasi Tenaga Keolahragaan, pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi (HAORNAS).

Hambatan yang dihadapi dalam indikator ini adalah :

- Belum memadai pembinaan organisasi olahraga, karena terbatas dana yang tersedia.
- Sarana dan Prasarana Olah Raga belum memadai.

Solusi dalam indikator ini adalah:

- Pelaksanaan kegiatan yang terpusat/terfokus dan perlu peningkatan dana apabila mungkin bertujuan untuk kelancaran kegiatan kepemudaan dan pembinaan organisasi olahraga.
- Mengintensifkan inventarisasi kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan



Pegawai Dinas Kepemudaan dan olahraga Kota Binjai baik dengan pemerintah dan masyarakat dalam usaha pembinaan dan pengembangan kepemudaan menuju masyarakat genar olahraga berwawasan kebangsaan, berprestasi dan berdaya saing.

- Mengadakan Sosialisasi terhadap kalangan masyarakat untuk menyampaikan beberapa informasi terhadap perundang-undangan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan Program Pelayanan Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga dari anggaran Rp 1.536.946.864 terealisasi Rp 1.526.269.700 dengan serapan anggaran sebesar 99,31% dan program Peningkatan peran serta kepemudaan dengan anggaran sebesar Rp 1.089.212.757 dan terealisasi sebesar Rp 1.085.449.868 (99,65%) serta Program Peningkatan dan prasarana olahraga dengan anggaran sebesar Rp 232.669.426 dan terealisasi sebesar Rp 226.963.346 (97,55%).

Tabel 3.9.

Realisasi Sasaran Ketujuh : *Terciptanya daya saing di Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya*

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM). | 76,15 % IPM | 70,00 % IPM | 91,92 % IPM | |
| 2 | Angka Harapan Hidup | 72,16 tahun | 71,67 | 99 | Tinggi |
| 3 | Angka Harapan Lama Sekolah | 14,26 tahun | 11,,06 tahun | 14,26 tahun | Tinggi |
| 4 | Pengeluaran Perkapita. | 10,23 (Rp.Juta) | 10,24 (Rp.Juta) | 100 | Sangat Baik |
| | Indeks Pendidikan. | | | | |
| 5 | Rata-rata Lama Usia Sekolah | 9,95 tahun | 10,12 tahun | 102% | Sangat Baik |
| 6 | Angka Buta Huruf | 0% | 0% | 0% | Sangat Baik |



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 7 | APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | 10,67% | 9,64% | 90,34% | Sangat Baik |
| 8 | APM Jenjang SD (SD/MI/Paket A). | 100,11% | 101,76% | 100% | Sangat Baik |
| 9 | APK Jenjang SD/SDLB/MI). | 121,98% | 105,57% | 86,54% | Tingg |
| 10 | APK Jenjang SMP SMP/SMPLB/MTs) | 112,96% | 113,83% | 100% | Sangat Baik |
| 11 | APM Jenjang SLTP(SMP/MTs/ Paket B). | 79,79% | 80,78% | 100% | Tinggi |
| 12 | APK Jenjang SMA(SMA/SMK/SM ALB/MA). | 115,82% | 117,00% | 100% | |
| 13 | APM Jenjang SMA(SMA/SMK/S MALB/MA) | 99,37% | 88,50% | 89% | |
| 14 | Angka Putus Sekolah SD/MI. | 0,0029% | 0,0020% | 68% | Sangat Rendah |
| 15 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs. | 0,0006% | 0,018% | 100% | Sangat Rendah |
| 16 | Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK | 0,0006% | 0,001486 | 100% | |
| 17 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 1686 orang | 2.000 orang | 1867% | Sangat Baik |
| 18 | Persentase Guru bersertifikat Pendidik. | 73,68% | 75,13% | 127% | Sangat Baik |

Berdasarkan tabel diatas maka tingkat capaian rata-rata pada tahun 2018 untuk Sasaran “Terciptanya daya saing di Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya” sebesar 104,94% pada tahun



BAB. I

Gambar 3.5. Pemerintah Kota Binjai menjadi satu dari 15 kota terbaik yang masuk dalam kategori daya saing di Kota Binjai



2018 dalam kategori Indeks Pendidikan

kualitas baik, dari indikator rata-rata tercapai sesuai dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja *APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* telah mencapai target, artinya berhasil dicapai, capaian mencapai 100%. Karena Realisasi lebih besar dari target. Hal itu dapat dilihat pada tahun 2018, merupakan salah satu dukungan dan mulai berbenah Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pendidikan untuk menciptakan Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Indikator Kinerja *APK Jenjang (SD/SDLB/MI)* mencapai 102%, *APM Jenjang SD (SD/MI/Paket A)* telah berhasil mencapai 100%, artinya pada umumnya anak yang berusia 7-12 tahun (sekitar 28.093 anak) di Kota Binjai memilih sekolah di dalam Kota Binjai. Hal itu dapat dilihat pada tahun 2011-2015, tingkat *APM Jenjang SD (SD/MI/Paket A)* cenderung fluktuatif merupakan salah satu dukungan dan mulai berbenah Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pendidikan untuk menciptakan program dan kebijakan perbaikan Pendidikan di Kota Binjai secara berkelanjutan. Tercapainya sebagian target di atas disebabkan adanya program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah dari APBD Kota Binjai untuk mencapai target tersebut. Disamping itu dana BOS yang dikucurkan pemerintah pusat, dapat digunakan untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang mengalami rusak sedang.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pendidikan Kota Binjai mengalokasikan dana untuk rehabilitasi ruang kelas SD sebanyak 19 ruang kelas SD dan ruang guru sebanyak 4 ruang. Pelaksanaan program rehabilitasi ruang kelas membuat target persentase sekolah dalam kondisi baik, hampir dapat dicapai.

Indikator Kinerja *APK Jenjang SMP (SMP/SMPLB/MTs)* mencapai 101%, *APM Jenjang SLTP (SMP/MTs/Paket B)* mencapai 96%, artinya pada umumnya anak yang berusia 13-15 tahun (sekitar 10.343 anak) di Kota Binjai memilih sekolah di dalam Kota Binjai dan masih ada anak yang memilih sekolah di luar Kota Binjai walaupun relatif sedikit, karena Kota

Binjai berada 3 wilayah berbatas dengan Kota Medan, Langkat dan Deli Serdang yang saling berinteraksi.

Dalam mendukung motivasi anak usia 13-15 tahun Pemerintah Kota Binjai menjalankan agenda gerakan literasi Nasional yang menjadi salah satu kegiatan untuk mendorong peningkatan kualitas minat baca anak usia sekolah, hal ini telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2015. Survey yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sekitar 90,27 persen anak usia sekolah suka menonton televisi, hanya 18,94 persen dapat disimpulkan bahwa minat baca anak sangat rendah. Solusinya adalah perlu sinerginya semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi juga yang paling penting orang tua dan masyarakat.



GGambar 3.6 Wakil Walikota Binjai membuka Jambore Literasi SMP

Indikator Kinerja *APK Jenjang SMA (SMA/SMK/SMALB/MA)* mencapai 121%, *APM Jenjang SMA (SMA/SMK/SMALB/MA)* mencapai 88%, artinya pada umumnya anak yang berusia 16-19 tahun (sekitar 14.813 anak) di



Kota Binjai memilih sekolah di dalam Kota Binjai dan masih ada anak yang memilih sekolah di luar Kota Binjai walaupun relatif sedikit.

Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah *SD/MI* dan Angka Putus Sekolah *SMP/MTs*, capaian kinerja pada indikator ini dengan menurunnya angka putus sekolah pada tingkat *SD/MI* dan *SMP/MTs* tahun 2018 terlaksana dengan adanya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu melalui Program/kegiatan pendidikan.

Adanya bantuan siswa miskin dari APBD Kota Binjai. Pada tahun 2018, target yang telah ditetapkan telah dapat dicapai sepenuhnya dan memperoleh angka penurunan yang relatif baik dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Hal ini perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan tentang capaian kinerja angka putus sekolah jenjang *SD/MI* ini.

Indikator Kinerja *Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV* mencapai 3953 Guru, artinya pada umumnya menambah tingkat kualitas guru pada setiap jenjang pendidikan yang ada di wilayah kota Binjai, sehingga tahun 2018 diperoleh capaian kinerja 237% dikategorikan sangat memuaskan, hal ini dipengaruhi faktor tingkat Sertifikasi guru di Kota Binjai. Berikut trend tingkat jumlah Guru dan Murid pada setiap jenjang pendidikan Tahun.

Indikator Kinerja Persentase Guru bersertifikat Pendidik dengan realisasi 68%, capaian 106%, artinya Guru yang bersertifikat pada tahun 2018 meningkat sebanding dengan jumlah keseluruhan Guru di Kota Binjai, sedangkan tahun 2015 guru yang bersertifikat 2605 guru sedangkan belum bersertifikat sebanyak 1800 guru (*SD, SMP, SMA/SMK*). Dengan demikian pada tahun 2018 predikat memuaskan.

Berdasarkan analisis perkembangan, masalah serta peran dalam mendukung Sasaran *Terciptanya daya saing di Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya*, maka permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Binjai dan Solusi yang diambil untuk masa sekarang dan kedepan adalah sebagai berikut :



| | Faktor Pendukung | | Permasalahan | | Solusi |
|----|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Adanya penambahan Dana dari APBN/Pusat | 1. | Masih rendahnya tingkat SDM guru terutama Guru SD. | 1. | Membutuhkan pembinaann dan pelatihan untuk Guru dan Aparatur khususnya Guru Sekolah Dasar dan SMP. |
| 2. | Adanya Anggaran yang mendukung. | 2. | Terbatasnya bantuan beasiswa untuk siswa/i kurang mampu. | 2. | Perlu adanya penambahan dari APBN dan APBD untuk beasiswa siswa/i kurang mampu. |
| 3. | Adanya Peningkatan SDM guru atau kualitas Aparatur | 3. | Masih terbatasnya kualitas terhadap sistem Pengajaran yang inovatif Guru dan Aparatur. | 3. | Adanya kebijakan daerah untuk meningkatkan sistem Belajar-mengajar yang sistematis dan inovatif untuk mempercepat perbaikan pendidikan lebih baik sesuai Peraturan yang berlaku yang mendukung Program Nasional. |

Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Kesehatan Kota Binjai terus menerus dan berkesinambungan untuk mendukung pencapaian indikator yang menjadi target RPJMD Kota Binjai khususnya menjadi target dan harapan capaian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berikut Data Dukung Indeks Kesehatan Kota Binjai 2018 BidangKesehatan (DinasKesehatan Kota Binjai).

| N o . | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | ersentase Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Angka kematian bayi. | 3,26 AKB/1000KH | 4/1000 KH | 0% | |
| 2 | Angka kematian ibu | 69,40 AKI/100.000K H | 87,00 AKI/100. 000KH | 79,77% | |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|-------------|
| 3 | Persentase balita gizi buruk | 0,09% | 0,1 | 100% | Sangat Baik |
| 4 | Rasio dokter per satuan penduduk. | 1:720 | 1:720 | 100% | Sangat Baik |
| 5 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk. | 1:264.935 | 9 : 270.926 | 100% | Sangat Baik |
| 6 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk. | 1:267.35 | 1:267.35 | 100% | Sangat Baik |
| 7 | Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI). | 98% | 98 | 100% | Sangat Baik |
| 8 | Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). | 77% | 65,50 | 85% | Tinggi |
| 9 | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, taman, rekreasi dan tempat hiburan, dan lainnya). | 90% | 90 | 100% | Sangat Baik |

Angka Kematian Bayi

| Tahun | Jumlah |
|-------|---------|
| 2017 | 0 orang |
| 2018 | 2 orang |

Keberhasilan Indikator ini pada Tahun 2018 target yang ada harus dibawah 10 per kelahiran hidup, dari data yang ada ditemukan tidak ada kasus kematian bayi atau 0/1000 KH. Capaian tersebut sudah melampaui target yang ada. Dari penyebab kematiannya, AKB dapat disebabkan oleh faktor endogen yaitu kematian pada bulan pertama setelah yaitu kematian pada bulan pertama setelah dilahirkan yang disebabkan oleh faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau selama masa kehamilan. Faktor lainnya yaitu faktor eksogen yaitu kematian yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.



Sedangkan Keberhasilan Tahun 2018 terdapat 10 kasus kematian atau 5/1000 KH. Capaian tersebut sudah melampaui target yang ada. Dari penyebab kematiannya, AKB dapat disebabkan oleh faktor endogen yaitu kematian pada bulan pertama setelah dilahirkan yang disebabkan oleh faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau selama masa kehamilan. Faktor lainnya yaitu faktor eksogen yaitu kematian yang terjadi setelah setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

| Angka Kematian Ibu | |
|---------------------------|---------------|
| Tahun | Jumlah |
| 2017 | 3 orang |
| 2018 | 4 orang |

Keberhasilan Indikator ini pada Tahun 2017 6 sebanyak 3 kasus kematian atau 85/100.000 KH. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka AKI, diantaranya social ekonomi, kesehatan ibu sebelum hamil, bersalin, dannifas, serta AKI, diantaranya social ekonomi, kesehatan ibu sebelum hamil, bersalin, dan nifas, serta pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil. Tahun 2017 sebanyak 4 kasus kematian atau 76/100.000 KH. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka AKI, diantaranya sosial ekonomi, kesehatan ibu sebelum hamil, bersalin, dan nifas, serta pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil.

| GiziBuruk | |
|------------------|---------------|
| Tahun | Jumlah |
| 2017 | 32 orang |
| 2018 | 32 orang |

Keberhasilan Indikator ini diimplementasikan pada Jumlah balita tahun 2018 sebanyak 25.536 jiwa Pada tahun 2016 target kinerja sebesar 100 %, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 32 orang dan seluruhnya mendapat perawatan (100%), sehingga capaian kinerja tahun 2016 sebesar



100%. Sedangkan Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 32 orang dan seluruhnya mendapat perawatan (100%) dalam capaian renstra Dinas Kesehatan Kota Binjai, sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100%. Target tercapai karena adanya dukungan masyarakat dalam melaporkan kasus gizi buruk yang ada di lingkungannya, serta peran aktif puskesmas dalam melakukan pelacakan terhadap setiap laporan kasus, serta koordinasi yang baik dengan rumah sakit rujukan untuk perawatan.

Untuk merealisasikan keberhasilan pada indikator tersebut dilakukan beberapa kegiatan selama tahun 2018 seperti pemberian makanan tambahan penyuluhan balita di posyandu dan sosialisasi melalui workshop surveilans gizi bagi petugas gizi puskesmas dan puskesmas pembantu.

| Dokter/ Tenaga Medis | |
|------------------------------------|---------------|
| Tahun | <i>Jumlah</i> |
| 2018 | 273 orang |
| RumahSakit | |
| Tahun | <i>Jumlah</i> |
| 2018 | 9 buah |
| Jumlah Penduduk Kota Binjai | |
| Tahun | <i>Jumlah</i> |
| 2018 | 270.926 orang |

| Universal Child Immunization (UCI) | |
|------------------------------------|---------------|
| Tahun | <i>Jumlah</i> |
| 2017 | 30 Kelurahan |
| 2018 | 7 Kelurahan |

Keberhasilan Indikator ini diimplementasikan melalui Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Target kinerja tahun 2016 sebesar 80 %,



jumlah kelurahan yang telah UCI sebanyak 30 kelurahan dibandingkan dengan sasaran 37 kelurahan maka cakupan sebesar 81,08% terhadap capaian renstra Dinas Kesehatan Kota Binjai, sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 101,35 %, capaian ini tidak berbeda dengan capaian tahun 2017. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut seperti: peningkatan cakupan imunisasi bayi 0-11 bulan, swiping cakupan imunisasi bayi 0-11 bulan, imunisasi bayi 0-11 bulan. Kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut disebabkan masih rendahnya cakupan imunisasi Hb0-7, kemudian data pelayanan imunisasi di pelayanankesehatan swasta belum tercatat dan dilaporkan dengan baik.

Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Target kinerja tahun 2018 capaian pada renstra Dinas Kesehatan Kota Binjai sebesar 100%, jumlah kelurahan yang telah UCI sebanyak 7 kelurahan dibandingkan dengan sasaran 37 kelurahan maka cakupan sebesar 19% sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 19%.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut seperti : peningkatan cakupan imunisasi bayi 0-11 bulan, swiping cakupan imunisasi bayi 0-11 bulan, imunisasi bayi 0-11 bulan. Kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut disebabkan masih rendahnya cakupan imunisasi Hb 0-7, kemudian data pelayanan imunisasi di pelayanan kesehatan swasta belum tercatat dan dilaporkan dengan baik.

PHBS (PrilakuHidupBersihdanSehat)

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PHBS |
| 2017 |
| Target 76% dari Rumah Tangga 48.462 adalah 60,5% (29,360 Rumah Tangga ber PHBS) |
| 2018 |
| Target 77% dari Rumah Tangga 48.462 adalah 66,1 % (32.012 Rumah Tangga ber PHBS) |
| |



Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga tau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Target rumah tangga ber-PHBS tahun 2017 adalah 76 %, dari rumah tangga yang dinilai 48.462, sebesar 60,5% (29.360 RT ber-PHBS). Target tercapai karena dukungan masyarakat terutama kader dalam mewujudkan PHBS serta peran aktif petugas kesehatan dalam pembinaan PHBS di wilayah kerja masing-masing.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah lomba kelurahan ber-PHBS, gerakan cuci tangan pakai sabun, pembinaan kelurahan dalam pelaksanaan PHBS.

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Target rumah tanggaber-PHBS tahun 2018 adalah 77% (rekomendasi target renstra Dinas Kesehatan), dari rumah tangga yang dinilai 48.462, sebesar 66,1% (32.012 RT ber-PHBS). Target tercapai karena dukungan masyarakat terutama kader dalam mewujudkan PHBS serta peran aktif petugas kesehatan dalam pembinaan PHBS di wilayah kerja masing-masing. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah lomba kelurahanber-PHBS, gerakan cuci tangan pakai sabun, pembinaan kelurahan dalam pelaksanaan PHBS.

Berdasarkan analisa perkembangan, masalah serta peran Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan di Kota Binjai, maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota BinjaidanSolusi yang diambil untuk masa sekarang dan kedepan adalah sebagaiberikut:

| No | Faktor Pendukung | Permasalahan |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia kesehatan yang sudah cukup | Penyebaran tenaga kesehatan yang kurang merata |
| 2. | Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan khususnya puskesmas sudah cukup | Mutu pelayanan kesehatan yang belum maksimal |
| 3 | Akses pelayanan kesehatan yang mudah dan memadai | Masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi karena melahirkan |

Solusinya adalah :

1. Pemerataan tenaga kesehatan berdasarkan kompetensinya.
2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas.
3. Pendampingan ibu hamil, bulin dan nifas, pmt, posyandu dan home visit.
4. Meningkatkan prasarana pelaporan seperti pencatatan dan pelaporan online.
5. Menyusun rencana aksi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta anggarannya.



Gambar 3.7. Walikota Binjai Menerima Penghargaan Pastika Paramesti dari Kementerian Kesehatan RI.



Salah satu Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI kepada Pemerintah Kota Binjai karena dinilai telah berhasil menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pengendalian konsumsi tembakau termasuk tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, taman, rekreasi dan tempat hiburan, dan lainnya) dalam hal ini perlu seluruh tempat umum berkomitmen untuk menjalankan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan tujuan untuk terciptanya ruang dan lingkungan bersih dan sehat dan melindungi masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel 3.10.

Realisasi Sasaran kedelapan : Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | PersentaseCapaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | <i>Kebinamargaan.</i> Panjang jalan Kota dalam kondisi baik. | 315,38km | 345,00 | 91,30% | Sangat baik |
| 2 | Proporsi jalan Kota dalam Kondisi mantap. | 87.52% | 98,50 | 100% | Sangat baik |
| 3 | Panjang jembatan dalam kondisi baik. | 944,40m | 1000,55 m | 100% | Sangat baik |
| 4 | Rasio Jembatan Kota dalam kondisi baik/mantap. | 98,29 (%) | 100,00 (%) | 100% | Sangat baik |
| 5 | <i>Pengairan/Sumber Daya Air.</i> | | | | |
| 6 | Panjang bronjong terbangun. | 3.150m | 5.000m | 100% | Sangat baik |
| 7 | Panjang drainase/parit | 3.000 m | 125. 36 m | 42% | Sangat baik |



| | | | | | |
|----|------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| | beton dibangun. | | | | |
| 8 | Pengurangan luas genangan banjir setiap tahun. | 30% | 10 | 33,33% | - |
| | Sanitasi dan Air Bersih | | | | |
| 9 | Proporsi RT dengan akses air bersih | 20,91% | 20,91% | 100 | Sangat baik |
| 10 | Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari | 30% | 30% | 100 | Sangat baik |
| 11 | Persentase penanganan sampah. | 70% | 65% | 99,4% | Tinggi |

Program Pembangunan jalan dan jembatan pagu anggaran Rp. 36.298.329.585,- terealisasi Rp. 29.658.136.735,- capaian 81,75%. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan pagu anggaran Rp. 5.500.000.000,- terealisasi Rp. 5.479.652.200,- capaian 99,87%.

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik melebihi target sepanjang 1,029 km, untuk badan jalan yang dilalui kendaraan tonase over kapasitas dipakai sistem pembangunan jalan dengan beton rigid dan dilapisi aspal pada permukaan beton. Kerusakan jalan dan jembatan lebih cepat dibandingkan umur rencana solusi untuk perlu adanya Perda pengaturan tentang Peraturan bagi kendaraan muatan diterapkan lebih tegas.

Dalam hal ini memperlihatkan kinerja panjang jalan kota dalam kondisi baik semakin meningkat dengan capaian 85%, di sisi lain masih perlu dilakukan peningkatan kondisi jalan yang terbangun lebih mantap lagi, sehingga keadaan ini diharapkan dapat mendukung tujuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) terkait tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah, selanjutnya berdampak langsung bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Binjai.

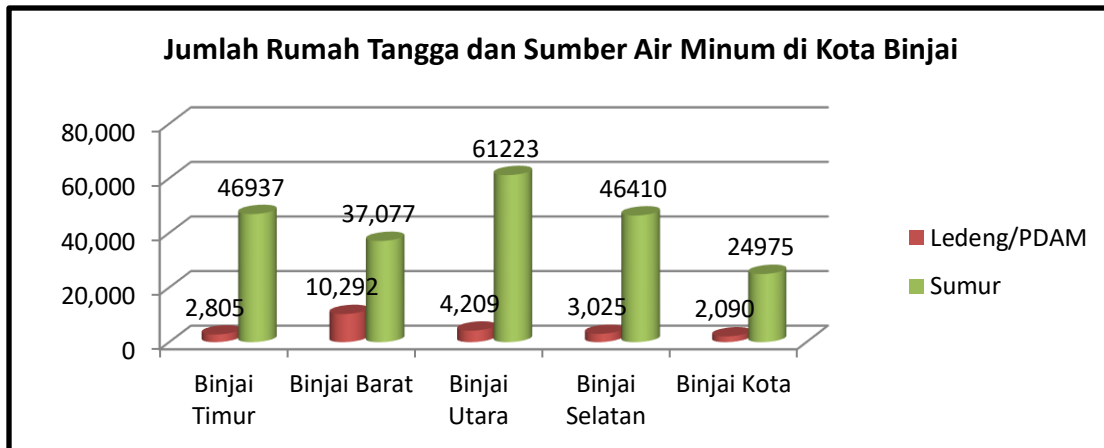


| | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| C. | Sanitasi dan Air Bersih | | | | |
| 1. | Proporsi RT dengan akses air bersih | % | 20,91% | 20,91% | 100 |
| 2. | Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari | % | 30% | 30% | 100 |
| 3. | Persentase penanganan sampah. | % | 70% | 65% | 91,42 |
| Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis 8 | | | | | 84,3% |

Indikator Kinerja Proporsi RT dengan akses air bersih, jangkauan penyediaan dan pelayanan air bersih diupayakan di setiap tempat yang berada di rumah-rumah penduduk, menyebabkan Proporsi RT dengan akses air bersih tercapai dari target yang di tetapkan sebesar 30 %, dikarenakan masih terbiasanya menggunakan air bawah tanah.

Indikator Kinerja Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari, Indikator Kinerja Proporsi RT dengan akses air bersih, jangkauan penyediaan dan pelayanan air minum diupayakan di setiap tempat yang oleh PDAM Tirtasari, menyebabkan Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari hanya tercapai dari target yang di tetapkan sebesar 30%, kondisi tersebut di atas di tambah dengan kondisi masyarakat yang menyambung pipa air minum yang sudah tersedia ke rumah masing-masing, di karenakan masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan air bawah tanah, hal inilah yang menyebabkan Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari kurang maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Binjai sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tahun 2018 terhadap pencapaian Indikator ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan di dukung oleh Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah anggaran yang tersedia sebesar Rp 9.756.106.772 dan terealisasi Rp 7.124.945.000 capaian 73,03 %. Melaksanakan beberapa kegiatan sebagai langkah pencapaian *outcome* yang dilaksanakan antara lain Optimalisasi Water Treatment Plan Marcapada – PDAM Tirtasari Kota Binjai, DED Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi Distribusi PDAM Tirtasari Kota Binjai.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai bahwa masyarakat Kota Binjai sebagian besar menggunakan air sumur yaitu sebanyak 216.662 KK dan air ledeng/PDAM Tirtasari sebanyak 22.421 KK. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang memanfaatkan air sumur.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2017

Indikator Kinerja *Persentase penanganan sampah*, memiliki persentase capaian 64% (84 ton) pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018 mencapai 88,7 ton terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Permasalahan Pelayanan persampahan perkotaan di sebabkan tingginya pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat hal ini menambah jumlah volume sampah, sedangkan daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tetap, demi terciptanya pengelolaan sampah secara efektif Pemerintah Kota Binjai sangat menekankan kepada setiap Kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk melakukan pengelolaan persampahan sebagai prioritas.

Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2018 melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berusaha semaksimal mungkin dengan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah secara bijak salah satu program yang dilakukan adalah program 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) untuk mengurangi produksi sampah, untuk tetap mengelola lingkungan hidup dengan berbagai upaya yang dilakukan dengan merangsang lembaga pemerintahan dan perorangan pada masyarakat untuk peduli dengan lingkungan. Berikut ini peran serta masyarakat dan Pemerintah Kota di

Kota Binjai yang mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya Bank Sampah Kategori Gold, Adiwiyata Nasional, Pekan Lingkungan Hidup.



Gambar 3.8. Penghargaan Adiwiyata Nasional

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran harus dimulai sejak dini melalui Kegiatan sosialisasi tentang lingkungan hidup bertujuan untuk mentransfer pengetahuan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjangkau semua kalangan dari berbagai status sosial masyarakat, sehingga upaya pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Adapun Sosialisasi yang dilakukan pada Tahun 2018 adalah Pembinaan Sekolah Calon Adiwiyata (Sekolah Terpilih).

Tabel 3.11.

Realisasi Sasaran kesembilan : Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai RTRW.

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | PersentaseCapaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|-----------------------------------|--------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Revisi RTRW Kota Binjai 2017-2037 | - | - | - | Sangat baik |



Sasaran kesepuluh : Meningkatnya produktifitas perekonomian kota.

Sasaran ini mendukung Peningkatan Produktifitas perekonomian kota melalui OPD yang berada dibawah wewenangnya Pemerintah Kota Binjai perlu memperhatikan potensi potensi penyumbang PDRB yang sudah ada seperti : Pembangunan Pasar Tavip Binjai yang sudah terbakar pada tahun lalu, perlu adanya suatu kawasan Strategis proses input-output (kasio) bagi pelaku-pelaku UMKM di Kota Binjai serta belum maksimalnya kerjasama antara OPD yang terkait dengan mengintervensi lapangan usaha melalui program/kegiatan.

Tabel 3.12.

Realisasi Sasaran kesepuluh : Meningkatnya produktifitas perekonomian kota.

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | PersentaseCapaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Kondisi Makro Ekonomi | | | | |
| 2 | Laju pertumbuhan ekonomi | 7,01% | 6,50% | 92,7% | Tinggi |
| 3 | PDRB ADHB | 12,262 Triliun Rupiah | 10.985 | 89,58% | Tinggi |
| 4 | PDRB ADHK | 7,462 Triliun Rupiah | 6.867 | 92% | Tinggi |
| 5 | PDRB/Kabita (ADHB) Tahun Dasar 2010 | 7,985 Triliun Rupiah | 6.965 | 87,2% | Tinggi |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini). | 0,2360 | - | - | - |
| 7 | Ketimpangan Regional (Indeks Williamson). | 0,0389 | - | - | - |
| 8 | APBD | Rp. 1,026 Triliun | 914.618.290.540 | 90% | Tinggi |
| 9 | ICOR | Rp. 3,25 Triliun | - | - | - |



| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-------------|
| 10 | Daya Saing Daerah | | | | |
| 11 | Lama proses perijinan (hari kerja setelah berkas lengkap). | 7 hari | 7 hari | 100% | Sangat Baik |
| 12 | Nilai Investasi (PMTB) | Rp. 20,55 Triliun | - | - | - |
| 23 | Perindustrian/Perdagangan. | | | | |
| 24 | Kontribusi sektor Industri pengelolaan terhadap PDRB. | 11,40% | 10,36% | 90,87% | Sangat Baik |
| 25 | Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran ; Reparasi Mobil dan dan sepeda motor terhadap PDRB. | 28,14% | 28,00% | 99,5% | Sangat Baik |
| | Kontribusi Sektor Jasa (Jasa Perusahaan, Jasa Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. | 13,85% | 13,52% | 100,6% | Sangat Baik |
| | Informasi dan Komunikasi. | | | | |
| | Persentase Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB. | 2,85% | 2,85% | 100,6% | Tinggi |

Kondisi Makro Ekonomi Kota Binjai yang merupakan Kota sedang dengan potensi alam yang dimilikinya merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda



Aceh. Oleh karena itu, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai kota dagang, Binjai juga dikenal sebagai kota penghasil buah rambutan. Luas areal perkebunan rambutan di Kota Binjai saat ini mencapai 425 Ha dengan jumlah produksi sekitar 2.400 ton per tahun.

Faktor pendukung keberhasilan beberapa indikator Kondisi Makro Ekonomiantara lain :

1. Banyaknya pedagang di Pusat Pasar Tavip Binjai salah satu faktor penggerak roda perekonomian Kota Binjai.
2. Banyaknya pelaku usaha/para pedagang/wirausaha/ UMKM yang tersebar di Kota Binjai.
3. Laju Pertumbuhan penduduk yang cukup mendukung dalam hal pemasaran produk UMKM.
4. Kota Binjai sebagai Kota Lintas Medan – Aceh.

Hambatan-hambatan dalam pencapaian Indikator :

1. Terbakarnya pusat pasar tavip Binjai mengurangi dukungan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Binjai.
2. Masih rendahnya kualitas produk UMKM, sehingga mengurangi daya beli.
3. UMKM yang ada belum terpusatkan atau terfokuskan pada satu kawasan khusus sebagai tempat penjualan produk UMKM daerah Kota Binjai.
4. Kurangnya kemampuan ASN yang berkompeten khususnya dalam pengelolaan UMKM dari Dinas terkait.

Upaya penyelesaian masalah :

1. Perlu percepatan terhadap pembangunan pasar tavip Kota Binjai.
2. Pemerintah Kota Binjai perlu menentukan satu Kawasan Strategis Input-Output (KASIO) sebagai tempat penjualan produk UMKM daerah.
3. Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM, agar pelaku UMKM/masyarakat diarahkan untuk hidup pola produktif.



4. Mengirim magang pelaku-pelaku UMKM dan ASN yang berkompeten dalam bidang terkait ke daerah-daerah yang telah mampu dalam mengelola dan mengembangkan produk UMKM.

Keberhasilan pada Sasaran ini didukung oleh penyumbang terbesar PDRB Kota Binjai antara lain di peroleh dari Lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Pedagang Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, Administrasi Pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing dibawah lima (5) persen.

Faktor-faktor pendukung sumbangan PDRB salah satunya adalah kinerja OPD yang menangani urusan pertanian dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 3,46% (Sumber BPS Kota Binjai). Pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami peningkatan dari 0,11 persen pada tahun 2017 menjadi 0,57 persen pada tahun 2018. OPD yang menangani urusan pertanian adalah Dinas Pertanian dan Peternakan.

Dalam perizinan Pemerintah Kota Binjai melakukan tindakan untuk menelusuri kegiatan-kegiatan dilapangan, disamping memberikan banyak kemudahan dalam pengurusan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, hal terpenting dari perizinan adalah kesesuaian lokasi kegiatan dengan tata ruang Kota Binjai.

Indikator Kinerja Lama proses perijinan (hari kerja setelah berkas lengkap) target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 7 hari dan tercapai 7 hari capaian kinerja 100%.

Permasalahan :

1. Masalah yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelimpahan pengurusan perizinan yang semula di OPD lain menjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

2. Waktu proses perizinan masih lama dikarenakan tenaga tim teknis guna membuat rekomendasi perizinan masih terdapat di OPD terkait (belum tergabung dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai).

Upaya-upaya yang akan/telah dilaksanakan oleh Dinas PM dan PPTSP Kota Binjai untuk mencapai target antara lain :

1. Mengadakan sosialisasi/perkenalan lebih lanjut ke masyarakat tentang pelimpahan kewenangan perizinan tersebut.
2. Tim teknis akan segera bergabung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai agar proses perizinan lebih mudah dan lebih singkat waktunya.



Gambar3.9. .Sosialisasi Pendelegasian Kewenangan



Gambar 3.10. Masyarakat melakukan Pengurusan Izin



Keberhasilan Indikator ini dipengaruhi dengan adanya penerapan e-perizinan di Kota Binjai, dimana Bidang Pelayanan Perizinan menjadi gambaran terhadap pencapaian sasaran Kualitas Pelayanan Publik khususnya dalam pengurusan perizinan kepada masyarakat/stakeholder. Layanan perizinan yang berada dibawah pengelolaan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (PMPPTSP) Kota Binjai mulai tahun 2017 telah memperbaiki sistem pelayanannya yang disebut *e-perizinan* bertujuan untuk Akses Mudah, Efisien, Transparan, Satu Pintu dan Zero Pungli.

Harapannya adalah untuk memudahkan masyarakat melalui akses sistem online dengan cara menginput permohonan ataupun datang langsung ke Front Office, kemudian oleh Front office diinput secara online untuk ditindaklanjuti oleh tim teknis, sehingga pemohon/masyarakat hanya datang untuk verifikasi data sekaligus mengambil izin.

Terkait **Survey Kepuasan Masyarakat** sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2017 diperoleh nilai 75 dari 137 responden, pada tahun 2016 dari 500 responden diperoleh skor 73 dan dibandingkan tahun 2015 bernilai 70, artinya ada peningkatan mutu pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (PMPPTSP) Kota Binjai dengan kategori “B” atau Baik dalam melayani masyarakat setiap pengurusan izin seperti Proses Izin SIUP sesuai SOP, Proses Izin HO sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Peternakan, Izin Air Bawah Tanah, melakukan penyelenggaraan administrasi perizinan pembangunan reklame dan lingkungan meliputi;

1. Izin Lingkungan

- Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)
- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
- Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

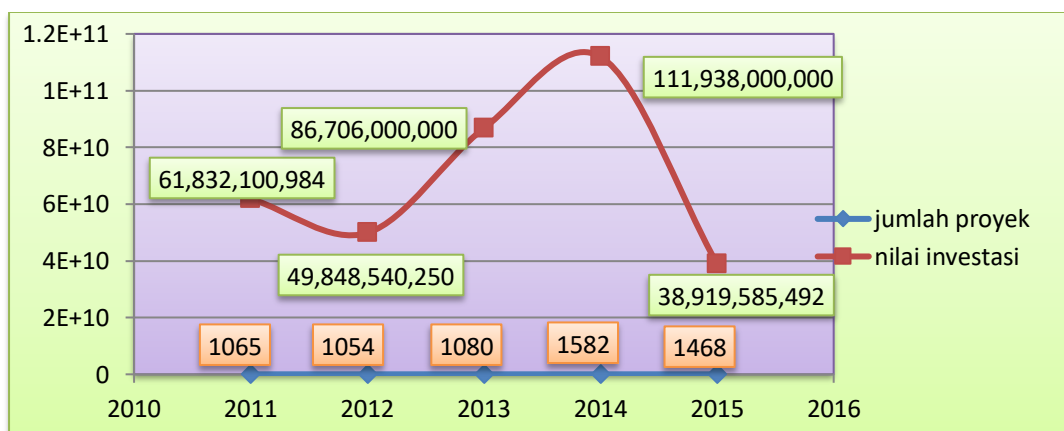
2. Izin Pembuangan Air Limbah;
3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
4. Izin Pemangkasan/ Penebangan Pohon Penghijauan;
5. Izin Pemakaian Lapangan Merdeka.

b. Melakukan penyelenggaraan administrasi perizinan konstruksi dan Perhubungan meliputi;

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
2. Izin Reklame
3. Izin Operasional Menara Telkom
4. Izin Trayek

Indikator Kinerja Nilai Investasi (PMTB) target yang ditetapkan tahun 2018 adalah Rp. 21,15 Triliun, (*) realisasi Tahun 2018 belum diperoleh data dari Badan Pusat Statistik dan data dari Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Dari sisi lain Perkembangan Jumlah Proyek dan Nilai Investasi dari tahun 2012-2016 terjadi penurunan yang relatif rendah dibandingkan dengan kondisi tahun 2014, hal ini dipengaruhi masih kurangnya fasilitas penunjang oleh daerah pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Grafik Perkembangan Investasi PMDN/PMA Tahun 2012-2016



Sumber : Bappeda Kota Binjai Tahun 2016



Pada tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki indikator pencapaian kerja sebagai berikut:

Tabel 3.13.

Realisasi Sasaran kesepuluh : *Meningkatnya produktifitas perekonomian kota.*

| | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|--|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Ketahanan Pangan | | | | |
| | Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi | | | | |
| | Beras. | 20.500ton | 22.528 ton | 108% | Sangat Baik |
| | Jagung | 7.200 ton | 11.250 ton | 156% | Sangat Baik |
| | Kedelai | 100 ton | 20 Ton | 20% | Rendah |
| | % Swasembada | 29,69% | 29,69% | 100% | Tinggi |
| | Konsumsi kalori Kota Binjai | 2.100 kkal/kapita /hari | 1.775 kkal/kapita /hari | 84,5% | Tinggi |
| | Penurunan konsumsi beras. | 118 | 95,50 | 80,9% | Tinggi |
| | Penurunan Jumlah Keluarga Rawan Pangan. | 12.050 KK | 11.750 KK | 97,5% | Sangat Baik |
| | Skor Pola Pangan Harapan. | 86,5% | 80,10 | 92,6% | Tinggi |

Beberapa potensi wilayah dari Kota Binjai adalah di sektor pertanian, terutama tanaman padi, Capaian indikator produksi padi tahun 2018 jumlah produksinya mencapai 21.528 ton dengan jumlah luas lahan 3.475 Ha dan rata-rata produksi 61,11 Kw/Ha, melalui usaha sektor pertanian dengan mengembangkan padi organik yang sudah dipasarkan ke masyarakat Kota Binjai dengan merk “Rambutan” melalui Inovasi Teknologi Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik adalah

dengan mengembangkan Teknologi IPAT-BO. Keberhasilan untuk indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan dengan anggaran sebesar Rp 93.710.000 dan terealisasi Rp 88.3999.400 (94,33%) dan Program Pemasaran hasil produksi peternakan dengan anggaran sebesar Rp 232.075.000 dan terealisasi Rp 225.488.750 (97,59%).



Gambar 3.11. Wakil Walikota Binjai menerima kunjungan guru besar UNPAD Bandung penemu Teknologi IPAT-BO

Konsumsi kalori Kota Binjai pada tahun 2018 dicapai 1.770 kkal/kapita/hari ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menjadi faktor kenaikan rata-rata pilihan konsumsi makanan yang mengandung energi dan protein tinggi oleh masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi anggaran daerah, dapat dilihat adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator tersebut yaitu Program Pengembangan Produksi Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 85.940.000 dan terealisasi Rp. 85.331.700 (99,29%).



Konsumsi beras untuk mendukung indikator ini diperoleh dari hasil produksi palawija sebagai bahan pokok lainnya seperti jagung jumlah produksi 10.250 ton dengan luas lahan 1.441, ubi jalar jumlah produksi 174 ton luas lahan 87 Ha, dan kacang hijau jumlah produksi 3.276 ton luas lahan 126 Ha. Keberhasilan indikator ini diimplementasikan melalui Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan dengan anggaran sebesar Rp 257.975.000 dan terealisasi Rp 226.403.950 (87,76%) dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp 932.104.110 dan terealisasi Rp 873.390.360 (93,70%). Walaupun hasil pertanian ini cukup potensial (kegiatan perekonomian terbesar ketiga di Kota Binjai), namun demikian sektor yang lebih menonjol dalam kegiatan perekonomian daerah adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan, sedangkan potensi peternakan dengan jumlah ternak kambing/domba 14.692 ekor, sapi/lembu 6.393 ekor sebagian besar penghasil ternak di Kota Binjai beradadi Kecamatan Binjai Selatan. Peluang investasidi Kota Binjai diantaranya dalam sektor pertanian, peternakan dan industri pengolahan. Faktor Pendukung keberhasilan beberapa indikator :

1. Terpenuhinya sebagian kebutuhan beras Kota Binjai melalui hasil panen padi sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Terpenuhinya sebagian kebutuhan pokok lainnya berupa jagung, kedelai, ubi dan palawija sejenis lainnya, baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan ekonomis lainnya.
3. Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman oleh masyarakat Kota Binjai melalui Pola Pangan Harapan (PPH).
4. Terwujudnya kecukupan gizi bagi masyarakat Kota Binjai melalui konsumsi kalori.
5. Terwujudnya diversifikasi pangan pokok oleh masyarakat Kota Binjai melalui penurunan konsumsi beras.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian keberhasilan indikator ini adalah :



1. Belum optimalnya penyuluhan pertanian dalam menentukan waktu tanam (sistem layak tanam), bibit unggul tanaman, termasuk sistem peningkatan hasil produksi.
2. Komitmen belum berjalan dengan baik pada beberapa unit kerja dalam mendukung pencapaian kinerja.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan permasalahan tersebut, diantaranya adalah :

1. Melakukan optimalisasi peran ASN agar meningkatkan kesiapan, kecepatan, tepat waktu dan tepat sasaran dalam mengelola masyarakat petani.
2. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara intens kepada seluruh unit kerja agar dicapai pemahaman yang sama terkait target kinerja di masing-masing unit kerja.

Tabel 3.14.

Realisasi Sasaran kesebelas : *Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan.*

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Persentase Koperasi Aktif. | 59,96% | 59,96 | 100% | |
| 2 | Jumlah UKM non BPR/LKM. | 4.724 UKM | 4.724 UKM | 100%- | - |

Dari data tersebut diatas, terjadi peningkatan jumlah UMKM dari tahun sebelumnya yaitu 4,655 UMKM menjadi 4.724 UMKM pada tahun 2018 atau pertumbuhan sekitar 1,48% (ada sekitar 69 UMKM baru yang hadir untuk menambah tingkat perekonomian masyarakat. Melalui Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Kecil dan Menengah anggaran sebesar Rp. 526.997.083,- terealisasi sebesar Rp. 446.419.083 atau realisasi keuangan sekitar 84,71%. Kegiatan Pameran Promosi UMKM pada P-APBD 2018 kegiatan pameran yang terlaksana semula direncanakan 5



kali dalam setahun, terealisasi hanya 3 kegiatan sehingga serapan dana berkurang dari perhitungan awal. Dan Program Peningkatan Jaringan Koperasi anggaran sebesar Rp. 31.414.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.033.000,- atau sebesar 95,60%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penilaian Kesehatan KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi, Kegiatan sosialisasi dukungan Informasi penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM untuk 5 kecamatan di Kota Binjai.

Tabel 3.15.

Realisasi Sasaran kedua belas : *Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan.*

Lingkungan hidup merupakan sumber penunjang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lain. Keberadaan lingkungan hidup yang layak untuk ditempati adalah daerah yang bersih, aman, dan tentram. Untuk mewujudkan hal itu haruslah dibuat komitmen untuk menjaga dan upaya untuk Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki misi yang sama untuk mewujudkan *Smart Environment* dan *Smart Living* Kota Binjai yang berwawasan lingkungan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dalam mencapai *outcome* kepada masyarakat Kota Binjai dengan cara seperti rehabilitasi lingkungan, penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan, peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, dan peran lembaga daerah dalam menghasilkan produk hukum, menetapkan anggaran untuk pengelolaan lingkungan. Keberhasilan Indikator ini didukung oleh pelaksanaan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam anggaran sebesar Rp 539.910.164 dan terealisasi sebesar Rp 500.598.825 atau sebesar 92,72% dan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup anggaran sebesar Rp 2.910.700.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.737.008.500 atau sebesar 94,03% melalui kegiatan Penataan Runag Terbuka Hijau dan Hutan Kota, Pembuatan Ruang Terbuka Hijau dan merenovasi ruang terbuka hijau di sekitar Kota Binjai.



Indikator Tersedia alat ukur pengendali pencemaran udara yang ditargetkan pada tahun 2018 merupakan indikator *output* belum mencerminkan *outcome*, namun disisi lain Pemerintah Kota Binjai telah melakukan pemecahan masalah untuk pengendalian pencemaran air dan udara di Kota Binjai antara lain :

- Pembangunan IPAL Komunal, terutama di permukiman sekitar badan air/sungai merupakan salah satu upaya pengendalian pencemaran air sungai.
- Mewajibkan industri/kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah untuk membuat IPAL.
- Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap industri/kegiatan usaha yang membuang air limbah.
- Pemantauan rutin kualitas air sungai dan limbah cair industri/kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- Menghimbau, membina dan membantu masyarakat agar menjaga kebersihan dan ekosistem sungai.
- Pelatihan personil tenaga laboratorium lingkungan.
- Menghimbau, membina dan membantu masyarakat agar menjaga kebersihan dan ekosistem sungai.

| | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Lingkungan. Tersedia alat ukur pengendali pencemaran udara. | - | | | - |
| 2 | Jumlah taman publik/Kawasan Bottanical Garden/hutan kota/terbangun. | - | - | - | - |
| 3 | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. | 42% | 50% | 84% | Sangat Tinggi |



Indikator Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk merupakan indikator *output*, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2018, produksi sampah di Kota Binjai diperkirakan mencapai 133.950,50 kg/hari. Produksi sampah terbanyak berasal dari Kecamatan Binjai Utara dengan jumlah 38.505,5 kg/hari dengan jumlah penduduk sebesar 77.011 jiwa, sedangkan produksi sampah terkecil berasal dari Kecamatan Binjai Kota dengan jumlah timbunan sampah sebesar 14.446,5 kg/hari dengan jumlah penduduk sebesar 28.893 jiwa, rasio TPS terpenuhi pada tahun 2018 karena Pemerintah Kota Binjai terus menerus mengupayakan pengelolaan lingkungan supaya tidak mencemari lingkungan, hal ini ditindaklanjuti dengan keterlibatan peran serta masyarakat terkait pengelolaan sampah dari sumbernya diwujudkan dalam Kegiatan Bank Sampah. Pengelolaan beberapa Bank Sampah di masyarakat dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Jumlah Bank Sampah di Kota Binjai pada akhir Tahun 2017 sebanyak 9 Kelompok Bank Sampah Masyarakat.

Selama ini warga mengurangi jumlah sampah dengan membakar. Padahal, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, ada risiko yang tinggi dibalik pembakaran sampah. Gas yang dihasilkan sampah ini 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan gas emisi kendaraan bermotor di negara maju (Hapsari, 2017). Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Binjai terus berupaya mendorong masyarakat melakukan pengelolaan sampah secara benar melalui sosialisasi pengelolaan sampah 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) serta pembentukan bank-bank sampah.

Hasil inventarisasi data oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai menunjukkan jumlah bank sampah terbentuk telah mencapai 9 unit bank sampah.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan dan penanganan sampah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Binjai menyebabkan peningkatan timbunan sampah domestik yang semakin meningkat;
2. Perilaku masyarakat yang masih rendah dalam menangani/melakukan pengelolaan sampah, karena masyarakat masih menganggap bahwa dengan membayar retribusi sampah setiap bulannya, maka tanggung



jawab tentang pengelolaan sampah sepenuhnya adalah kewajiban Pemerintah Kota;

3. Keterlibatan pengelola sebuah kawasan untuk pengelolaan sampah secara mandiri masih belum sepenuhnya dilakukan, sehingga proses pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah masih belum optimal. Pembinaan masyarakat baru dilaksanakan pada kawasan tertentu saja.

Inovasi Pengelolaan TPA di Kota Binjai diantaranya meliputi :

- Peningkatan secara bertahap system dengan mewujudkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pengolahan sampah menjadi *Sanitary Land Fill* dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- Peningkatan Wilayah Urban Terlayani.
- Peningkatan Upaya Pengelolaan Dampak Lingkungan di TPA Mencirim

Tabel 3.16.

Realisasi Sasaran ketigabelas : *Pengurangan tingkat resiko akibat bencana.*

Upaya Pemerintah Kota Binjai untuk menangani masalah bencana alam banjir adalah dengan meningkatkan jumlah personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dan mendirikan poko-posko di tempat-tempat yang rawan bencana. Pada Bulan November Tahun 2017, terjadi kebakaran yang menghancurkan 32 rumah di Barak I Jalan Barak I Jalan Suratin Lingkungan VIII Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai telah mendirikan Posko-posko Tanggap Darurat Kebakaran serta mempersiapkan tenda-tenda pengungsi, mempersiapkan dapur umum menyiapkan air bersih, membuat posko penerimaan bantuan dan membantu membangun kembali rumah korban kebakaran. Penanganan bencana dilakukan oleh BPBD bekerjasama dengan semua Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Binjai serta para relawan (pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat).

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|-------------------------------|--------|-----------|-----------------|-------------------------|
|-----|-------------------------------|--------|-----------|-----------------|-------------------------|



| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------|
| 1 | Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. | 82% | 82% | 100% | Sangat Tinggi |

Kota Binjai memiliki 2 (dua) wilayah Kecamatan yang termasuk pada kawasan rawan bencana banjir, yaitu Kecamatan Binjai Selatan dan Kecamatan Binjai Kota. Ada beberapa bencana yang terjadi di Kota Binjai antara lain bencana puting beliung dan bencana kebakaran. Tetapi kedua bencana tersebut tidak sering terjadi di Kota Binjai, bencana yang mendominasi di Kota Binjai merupakan bencana banjir.

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Kota Binjai Tahun 2017, bahwa bencana alam yang sering terjadi di Kota Binjai adalah banjir dan kebakaran. Sepanjang Tahun 2017 data bencana banjir dan bencana kebakaran yang terjadi di Kota Binjai. Kerugian yang diakibatkan kebakaran yang terjadi Kota Binjai Tahun 2017 sebesar Rp. 5.801.500.000 dan kerugian terbesar terjadi di Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur sebesar Rp. 1.500.000.000 dan Bencana banjir tidak mengakibatkan kerugian yang signifikan. Sedangkan bencana kebakaran yang terjadi kebanyakan diakibatkan oleh kelalaian masyarakat dan meledaknya tabung gas 3 kg.

Indikator ini di dukung oleh pelaksanaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp 7.722.706.007 dan terealisasi Rp 7.261.120.700 atau 94,02% .

Tabel 3.17.

Realisasi Sasaran keempatbelas : *Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.*



| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Pencapaian Target RPJMD |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| | Dimensi Keadilan Sosial. | | | | |
| 1 | Tingkat Kemiskinan | 5,70% | 6,00* | 5% | |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka. | 7,98% | 10,00* | 1,25% | sedang |
| 3 | Penciptaan Wirausahawan baru. | 2000 orang | 1.775 orang | 8,8% | tinggi |
| 4 | Rasio ketersediaan daya listrik. | 54,30% | 55,50% | 122% | tinggi |
| 5 | Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat. | 100% | 100 | 100% | Sangat baik |
| 6 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial. | 11,43 | 11,43 | 100% | Sangat baik |
| 7 | Persentase rumah tinggal bersanitasi. | 20,91% | 31% | 60% | sedang |
| 8 | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH). | 60 RSRTLH | 0% RSRTLH | 0,00% | |
| 9 | Dimensi Keadilan Ekonomi. | | | | |
| 10 | Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan (layak huni). | 87% | 85% | 97,7% | tinggi |
| 11 | Persentase penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja. | 61,20 | 40 | 65,63% | sedang |



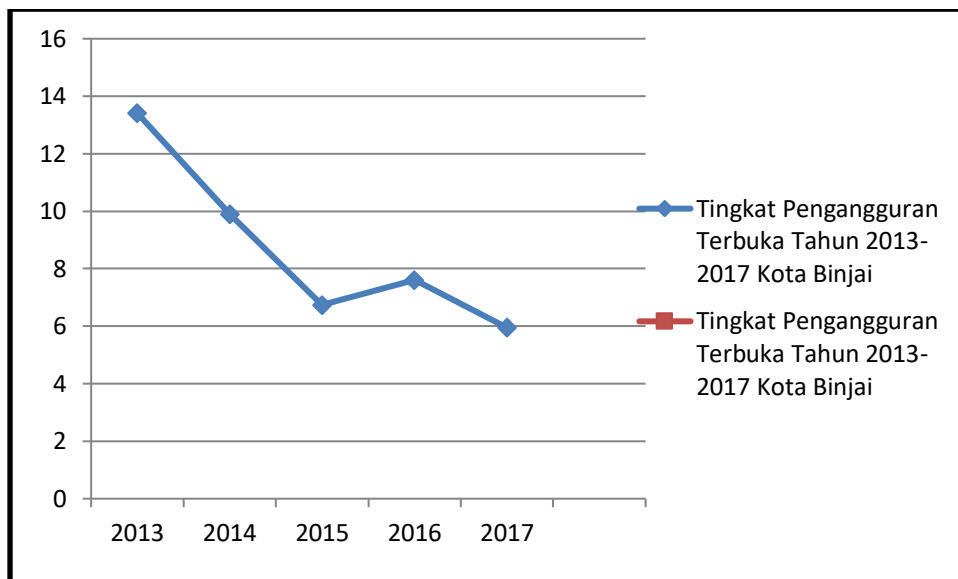
| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------------|
| 12 | Rerata pengeluaran per kapita/bulan terhadap garis kemiskinan. | 320.756 Perkapita (Rp) | 305.596 Perkapita (Rp) | 78,83% | tinggi |
| 13 | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | 5 unit | 3unit | 60% | |
| 14 | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha. | 130 orang | 125 orang | 96,15% | tinggi |
| 16 | Anak terlantar dan anak jalanan yang terbina. | 244 orang | 27 orang | 10% | Sangat rendah |
| | Dimensi Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban. | | | | |
| 17 | Penurunan Angka Kriminalitas | 0,0015% | 0,0014% | 93,33% | |
| 18 | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. | 81% | 83% | 24% | tinggi |
| 19 | Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat. | 3,13% | 1,80% | 57,50% | rendah |
| 20 | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. | 3,18 Per 10.000 penduduk | 3,85 Per 10.000 penduduk | 121% | tinggi |
| 21 | Jumlah Linmas per 10.000 penduduk. | 1,80 Per 10.000 penduduk | 1,50 Per 10.000 penduduk | 83,33% | tinggi |

Indikator Kinerja *Tingkat Kemiskinan*, Tingkat kemiskinan di Kota Binjai terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 5,70 % dibandingkan tahun 2017 jumlah penduduk miskin 5,89%, secara umum di kondisi penduduk miskin di Sumatera Utara sekitar 9,28, karena belum diperolehnya data dari Badan Pusat



Statistik untuk tahun 2017, bila dibandingkan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat 16.765 orang untuk tahun 2016 data tersebut akan dikeluarkan sekitar bulan Juni Tahun 2017. Indikator ini dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan penduduk diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum dinikmati oleh semua penduduk di Kota Binjai, sebagai rekomendasi lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Binjai semakin berkurang, karena Pemerintah Kota Binjai terus berupaya memperbaiki kinerja perekonomian mengikuti perkembangan lingkup regional maupun nasional untuk mampu mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Strategi pemecahan masalah yang dilakukan kedepan salah satunya adalah dengan meningkatkan sektor-sektor padat karya seperti pertanian, industri kecil dan menengah dan lain sebagainya, khususnya bagi kecamatan/kelurahan yang mengalami tingkat ketimpangan pendapatan.

Keberhasilan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka terjadi penurunan, dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 8,83 % diperoleh Capaian persentase 5,97%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tingkat Provinsi Sumatera Utara sekitar 5,60 artinya orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya Jumlah Penduduk usia kerja 191.287 orang dan pengangguran sebanyak 12.511 orang sedangkan yang bekerja sebanyak 112.661 orang, dalam hal ini semakin besar jumlah tenaga kerja semakin pesat pula perkembangan suatu wilayah, apalagi jika tenaga kerja tersebut memiliki keahlian dan ketrampilan yang cukup memadai, sehingga perlu dilakukan beberapa hal untuk menekan angka pengangguran di Kota Binjai antara lain adalah memberi pelatihan dan ketrampilan bagi calon tenaga kerja, mengadakan job fair, dan perlu dilakukan pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja. Berikut Perkembangan Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 Kota Binjai.



Gambar : Walikota Binjai bersama Gubernur Sumatera Utara dalam Upacara Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas di Kota Binjai Tahun 2017

target RPJMD tahun 2017 sebesar 3,03 % dapat terealisasi sebesar 1,76 % . Capaian persentase 60% yang artinya belum tercapai sesuai target



dengan jumlah petugas perlindungan masyarakat sebanyak 50 Petugas dibanding dengan 267.901 Penduduk di Kota Binjai, bila ditinjau dari cakupannya jumlah personil belum memenuhi kondisi Jumlah Penduduk.

Indikator Kinerja *Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk*, dari target tahun 2017 sebesar 2,99 Per 10.000 penduduk dapat terealisasi sebesar 3,76 Per 10.000 penduduk. Capaian persentase 100% yang artinya tercapai sesuai target dan Faktor pendorong tercapainya target adalah adanya personil Polisi Pamong Praja yang telah ditambah pada tahun 2016, sehingga tercapai tingkat perbandingan per 10.000 penduduk di Kota Binjai dengan rasio 3,76 per 10.000 penduduk dari jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 2017 sekitar 267.901 penduduk, maka untuk Indikator ini di peroleh predikat memuaskan.

Indikator Kinerja *Jumlah Linmas per 10.000 penduduk*, dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 1,80 Per 10.000 penduduk dapat terealisasi sebesar 1,76 Per 10.000 penduduk. Capaian persentase 97% yang artinya semakin besar rasio jumlah Linmas maka akan makin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, walaupun tercapai sesuai target dan Faktor pendorong adalah jumlah personil Linmas sebanyak 50 personil perlu disesuaikan dengan jumlah keseluruhan penduduk pada tahun tersebut, sehingga diperoleh predikat memuaskan.

Indikator Kinerja *Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*, dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 79 % dapat terealisasi sebesar 64 % . Capaian persentase 83% yang artinya tercapai sesuai target dengan kesimpulan mendapat hasil cukup berhasil dan perlu terus ditingkatkan untuk terciptanya kawasan Kota yang tertib dan tentram pada indikator ini diperoleh dari frekwensi terhadap penegakan Perda dapat berupa penertiban Izin Usaha, Izin Reklame, Izin Bangunan dan lain-lain, penertiban demonstrasi massa yang tidak memiliki izin, pedagang kaki lima (PKL), Anak-anak Jalanan, tempat-tempat hiburan malam dan penyakit masyarakat lainnya pada tahun 2017 dikategorikan memuaskan.



C. Akuntabilitas Keuangan.

Akuntabilitas Keuangan merupakan Pertanggungjawaban Keuangan yang sangat mempengaruhi dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan program atau kegiatan.

Sepanjang Tahun 2017 Pemerintah Kota Binjai telah mengalokasikan Belanja Langsung untuk mewujudkan pada seluruh SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Binjai sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Akuntabilitas Keuangan adalah salah satu penunjang terhadap pelaksanaan terhadap capaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran ini merupakan hasil dari beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan suatu program/kegiatan.

Dalam mengukur capaian kinerja suatu sasaran, tidak dapat diserahkan secara mutlak menjadi tanggung jawab suatu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Suatu sasaran yang terdiri dari beberapa program, seharusnya setiap Anggaran yang dihabiskan harus menghasilkan kinerja dari setiap SKPD sebagai Pemangku tanggungjawab dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah diperjanjikan pada setiap awal tahunnya.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Binjai merupakan capaian sasaran strategis yang terintegrasi dari seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan bukan merupakan kompilasi capaian kinerja SKPD. Pemerintah Kota Binjai telah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab organisasi. Berikut Realisasi APBD Kota Binjai Tahun 2017:

Tabel 3.18

**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2018.**

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 96.457.106.141,00 | 88.172.601.622,00 | 91,41. |
| 2. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 93.891.838.055,00 | 70.022.642.548,00 | 74,58 |
| 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | 2.022.630.200,00 | 19.11.101.030,00 | 94,49 |
| 4. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 7.934.181.194,00 | 6.947.441.420,00 | 87,86 |
| 5. | Peningkatan Pengembangan Sistlm Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.689.032.569,00 | 1.322.100.383,00 | 78.28 |
| 6. | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 814.174.510,00 | 794.725.651,00 | 97.61 |
| 7. | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 679.998.391,00 | 510.644.064,00 | 75,09 |
| 8. | Pembinaan Anak Terlantar | 387.780.010,00 | 376.330.168,00 | 97,05 |
| 9. | Pembinaan Para Penyandang Difabel atau Disabilitas dan Trauma | 89.998.932,00 | 87.032.932,00 | 96.70 |
| 10. | Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | 699.953.672,00 | 698.445.952,00 | 99.78 |
| 11. | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 817.805.532,00 | 766.713.626,00 | 93.75 |
| 12. | Pendidikan Anak Usia Dini | 2.331.728.600,00 | 285.990.574,00 | 12.27 |
| 13. | Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 46.954.737.660,00 | 16.262.522.293,00 | 34.63 |
| 14. | Pendidikan Non Formal | 1.565.518.070,00 | 1.317.643.000,00 | 84.17 |
| 15. | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1.023.304.288,00 | 921.790.640,00 | 90.08 |
| 16. | Pencegahan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular | 598.589.498,00 | 213.737.697,00 | 35.71 |



| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Kesehatan Lingkungan/Sanitasi | 495.257.381,00 | 205.064.981,00 | 41.41 |
| 18. | Kesehatan Rujukan dan Khusus | 23.798.619,00 | 8.000.000,00 | 33.62 |
| 19. | Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | 885.955.925,00 | 703.440.728,00 | 79.4 |
| 20. | Obat dan Perbekalan Kesehatan | 2.602.006.782,00 | 2.075.686.148,00 | 79.77 |
| 21. | Upaya Kesehatan Masyarakat | 25.227.056.929,00 | 10.778.601.993,00 | 42.73 |
| 22. | Pengawasan Obat dan Makanan | 196.178.867,00 | 131.984.075,00 | 67.28 |
| 23. | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 567.394.268,00 | 424.993.968,00 | 74.90 |
| 24. | Perbaikan Gizi Masyarakat | 443.520.000,00 | 288.000.000,00 | 64.94 |
| 25. | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 856.291.611,00 | 522.363.452,00 | 61 |
| 26. | Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 581.926.548,00 | 379.373.521,00 | 65.19 |
| 27. | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 5.770.541.520,00 | 3.418.775.000,00 | 59.25 |
| 28. | Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya | 11.021.257.935,00 | 10.748.896.646,00 | 97.53 |
| 29. | Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 93.170.400,00 | 91.670.400,00 | 98.39 |
| 30. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 199.834.957,00 | 183.709.957,00 | 91.93 |
| 31. | Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 39.509.000,00 | 33.460.725,00 | 84.69 |
| 32. | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata | 15.340.841.600,00 | 14.710.317.934,32 | 95.89 |
| 33. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata | 1.608.341.700,00 | 1.527.916.740,00 | 95.00 |



| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | 1.608.341.700,00 | 1.527.916.740,00 | 95,00 |
| 34. | Peningkatan Pelayanan BLUD | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Pembangunan Jalan dan Jembatan | 36.298.329.585,00 | 29.658.136.735,00 | 81,71 |
| 36. | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. | 7.253.322.105,00 | 5.010.327.900,00 | 69,08 |
| 37. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 5.500.000.000,00 | 5.479.652.200,00 | 99,63 |
| 38. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong | 4.000.000.000,00 | 3.994.997.800,00 | 99,87 |
| 39. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 9.756.106.772,00 | 7.124.945.000,00 | 73,03 |
| 40. | Pengendalian Banjir | 9.107.337.735,00 | 8.465.292.000,00 | 92,95 |
| 41. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gedung | 6.233.162.400,00 | 6.214.272.200,00 | 99,70 |
| 42. | Perencanaan Tata Ruang | 715.826.241,00 | 555.078.675,00 | 93,76 |
| 43. | Pengembangan Perumahan | 592.000.000,00 | 27,232,027,500,00 | 92,33 |
| 44. | Lingkungan Sehat Perumahan | 14.586.994.282,00 | 14.307.473.000,00 | 98,08 |
| 45. | Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 161.720.000,00 | 71.755.445,00 | 44,37 |
| 46. | Pembinaan dan Penataan Bangunan | 15.104.480.201,00 | 14.324.706,00 | 94,84 |
| 50. | Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 95.000.000,00 | 35.000.000,00 | 34,84 |
| 51. | Pendidikan Politik Masyarakat | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| 52. | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 48.000.000,00 | 41.650.000,00 | 86,77 |



| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53. | Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | 7.722.706.007,00 | 7.261.120.700,00 | 94.02 |
| 54. | Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 265.000.000,00 | 247.445.000,00 | 93.38 |
| 55. | Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 574.733.200,00 | 493.522.460,00 | 85.87 |
| 56. | Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 170.000.000,00 | 169.324.143,00 | 99.60 |
| 57. | Pendidikan Politik Masyarakat | 180.000.000,00 | 69.385.000,00 | 38,55 |
| 58. | Peningkatan Kesempatan Kerja | 181.058.385,00 | 177166669,00 | 97,85 |
| 59. | Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 65.996.982,00 | 63.172.295,00 | 95.75 |
| 60. | Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah | 413.730.105,00 | 410.297.300,00 | 99,178 |
| 61. | Pengembangan Promosi UKM di Daerah | 170.000.000,00 | 167.545.000,00 | 98.56 |
| 62. | Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 170.000.000,00 | 154.957.455,00 | 91,15 |
| 63. | Promosi Perdagangan Dalam Negeri | 100.000.000,00 | 97.865.660,00 | 97,87 |
| 64. | Perlindungan Perdagangan Domestik Dalam Negeri | 29.995.550,00 | 28.211.500,00 | 94.05 |
| 65. | Stabilisasi Perdagangan Dalam Negeri | 199.998.880,00 | 186.243.500,00 | 93.12 |
| 66. | Perdagangan Dalam Negeri Dan Metrologi | 94.990.570,00 | 92.060.920,00 | 96,92 |
| 67. | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 113.573.420,00 | 107.168.820,00 | 94.36 |
| 68. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 12.712.535.047,00 | 11.187.460.882,00 | 88,00 |
| 69. | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 2.910.700.000,00 | 2.737.008.500,00 | 94,03 |



| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70. | Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 539.910.164,00 | 500.598.825,00 | 92,72 |
| 71. | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 90.000.000,00 | 59.672.000,00 | 66,30 |
| 72. | Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan, Nasional Adiwiyata | 50.000.000,00 | 49.765.000,00 | 99,53 |
| 73 | Penataan Administrasi Kependudukan | 905.001.398,00 | 903.844.293,00 | 99,87 |
| 74. | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1.939.189.975,00 | 1.831.043.847,00 | 94,42 |
| 75. | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1.227.392.491,00 | 1.165.073.342,00 | 94,42 |
| 76. | Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan | 146.472.151,00 | 136.242.485,00 | 93,02 |
| 77. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | 220.784.737,00 | 180.066.737,00 | 81,56 |
| 78. | Peningkatan Peran Perempuan Di Kelurahan | 708.536.346,00 | 671.649.533,00 | 94,79 |
| 79. | Keluarga Berencana | 221,793,000.00 | 130,217,000.00 | 58,71 |
| 80. | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 788.666.200,00 | 773.901.001,00 | 98,13 |
| 81. | Kesehatan Reproduksi Remaja. | 350.131.000,00 | 345.533.000,00 | 98,69 |
| 82. | Pelayanan Kontrasepsi. | 89.483.500,00 | 89.208.500,00 | 99,69 |
| 83. | Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | 1.327.051.300,00 | 12.86.726.445,00 | 96,96 |
| 84. | Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | 259.153.000,00 | 258.090.450,00 | 99,59 |
| 85. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 2.201.144.423,00 | 2.181.483.500,00 | 99,11 |



| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 74. | Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 118,086,000.00 | 114,784,980.00 | 97.20 |
| 75. | Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah | 152,872,300.00 | 117,779,500.00 | 77.04 |
| 76. | Pengembangan Promosi UKM di Daerah | 300,000,000.00 | 290,249,100.00 | 96.75 |
| 77. | Penataan, Penertiban dan Kebersihan Pasar | 1,596,745,000.00 | 1,566,791,000.00 | 98.12 |
| 78. | Pengembangan Pasar Domestik di Daerah | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79. | Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 305,350,000.00 | 293,078,550.00 | 95.98 |
| 80. | Pengembangan Pasar Domestik di Dalam Daerah | 412,630,000.00 | 312,034,200.00 | 75.62 |
| 81. | Pengawasan Urusan Perdagangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82. | Promosi Perdagangan Dalam Negeri | 100,000,000.00 | 99,822,800.00 | 99.82 |
| 83. | Perlindungan Perdagangan Domestik Dalam Negeri | 50,000,000.00 | 49,745,000.00 | 99.49 |
| 84. | Stabilisasi Perdagangan Dalam Negeri | 377,674,840.00 | 368,768,200.00 | 97.64 |
| 85. | Perdagangan Dalam Negeri Dan Metrologi | 130,000,000.00 | 114,529,900.00 | 88.10 |
| 86. | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1,942,017,000.00 | 1,863,751,850.00 | 94.93 |
| 87. | Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan | 234,055,000.00 | 218,381,200.00 | 93.30 |
| 88. | Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 207,397,000.00 | 129,460,000.00 | 62.42 |



| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 88. | Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 207,397,000.00 | 129,460,000.00 | 62.42 |
| 89. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | 446,672,000.00 | 326,315,683.00 | 73.05 |
| 90. | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 240,187,500.00 | 204,292,400.00 | 85.06 |
| 91. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 6,490,430,000.00 | 6,078,483,899.00 | 93.65 |
| 92. | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 2,193,600,000.00 | 2,097,830,620.00 | 95.63 |
| 93. | Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 423,500,000.00 | 383,728,200.00 | 90.61 |
| 94. | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 165,000,000.00 | 163,342,000.00 | 99.00 |
| 95. | Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan, Nasional Adiwiyata | 50,000,000.00 | 49,533,000.00 | 99.07 |
| 96. | Penataan Administrasi Kependudukan | 832,407,000.00 | 830,648,602.00 | 99.79 |
| 97. | Keluarga Berencana | 381,595,000.00 | 283,241,000.00 | 74.23 |
| 98. | Kesehatan Reproduksi Remaja | 265,030,000.00 | 263,230,000.00 | 99.32 |
| 99. | Pelayanan Kontrasepsi | 63,950,000.00 | 50,425,000.00 | 78.85 |
| 100. | Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | 739,105,000.00 | 634,895,000.00 | 85.90 |
| 101. | Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | 199,871,000.00 | 199,679,000.00 | 99.90 |
| 102. | Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 100,000,000.00 | 99,498,100.00 | 99.50 |



| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 760,000,000.00 | 741,457,000.00 | 97.56 |
| 104. | Peningkatan Pelayanan Angkutan | 5,029,150,000.00 | 4,312,832,646.00 | 85.76 |
| 105. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 40,000,000.00 | 39,620,000.00 | 99.05 |
| 106. | Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | 3,233,832,000.00 | 3,043,405,950.00 | 94.11 |
| 107. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,045,764,500.00 | 819,181,000.00 | 78.33 |
| 108. | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 1,045,764,500.00 | 819,181,000.00 | 78.33 |
| 109. | Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | 624,000,000.00 | 602,400,000.00 | 96.54 |
| 110. | Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | 252,780,000.00 | 133,032,000.00 | 52.63 |
| 111. | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 308,020,000.00 | 72,333,000.00 | 54.03 |
| 112. | Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 38,043,000.00 | 37,243,000.00 | 97.90 |
| 113. | Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 2,372,060,000.00 | 2,266,307,309.00 | 95.54 |
| 114. | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 390,810,400.00 | 390,693,400.00 | 99.97 |



| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 115. | Peningkatan Jaringan Koperasi | 252,380,000.00 | 248,760,000.00 | 98.57 |
| 116. | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 244,700,000.00 | 165,639,200.00 | 67.69 |
| 117. | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. | Peningkatan Pelayanan Perijinan | 326,000,000.00 | 252,007,000.00 | 77.30 |
| 119. | Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah | 220,000,000.00 | 165,673,925.00 | 75.31 |
| 120. | Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan | 351,200,000.00 | 317,100,000.00 | 90.29 |
| 121. | Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 925,091,000.00 | 915,805,000.00 | 99.00 |
| 122. | Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | 1,270,203,592.00 | 1,255,687,500.00 | 98.86 |
| 123. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 576,605,000.00 | 541,259,009.00 | 93.87 |
| 124. | Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 480,593,654.00 | 466,360,218.00 | 97.04 |
| 125. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 | 100.00 |
| 126. | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 532,196,000.00 | 525,953,700.00 | 98.83 |
| 127. | Pengembangan Destinasi Pariwisata | 417,326,000.00 | 322,874,000.00 | 77.37 |



| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 128. | Pengelolaan Keragaman Budaya | 1,046,352,000.00 | 1,044,161,950.00 | 99.79 |
| 129. | Peningkatan Kesejahteraan Petani | 663,769,000.00 | 652,880,700.00 | 98.36 |
| 130. | Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | 875,456,000.00 | 849,547,905.00 | 97.04 |
| 131. | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 33,000,000.00 | 32,960,000.00 | 99.88 |
| 132. | Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | 235,065,000.00 | 94,025,000.00 | 40.00 |
| 133. | Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | 257,975,000.00 | 226,403,950.00 | 87.76 |
| 134. | Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | 65,000,000.00 | 38,598,000.00 | 59.38 |
| 135. | Pengembangan Budidaya Perikanan | 627,030,000.00 | 619,240,569.00 | 98.76 |
| 136. | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 161,820,000.00 | 149,139,300.00 | 92.16 |
| 137. | Peningkatan Produksi Hasil Pternakan | 590,292,000.00 | 561,886,950.00 | 95.19 |
| 138. | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pternakan | 204,910,000.00 | 188,738,400.00 | 92.11 |
| 139. | Peningkatan Produksi Pternakan | 126,990,000.00 | 118,516,100.00 | 93.33 |
| 140. | Peningkatan Kapasitas Lembaga | 5,616,598,000.00 | 4,451,276,250.00 | 79.25 |



| Perwakilan Rakyat Daerah | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 141. | Peningkatan Kebersihan Lingkungan | 1,513,208,000.00 | 1,419,738,901.00 | 93.61 |
| 142. | Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | 78,915,000.00 | 78,412,000.00 | 99.38 |
| 143. | Pembinaan Pemuda dan Olah Raga | 66,670,000.00 | 5,000,000.00 | 6.67 |
| 144. | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 100,000,000.00 | 99,829,100.00 | 99.83 |
| 145. | Pengembangan Data/Informasi | 565,276,240.00 | 442,120,500.00 | 78.21 |
| 146. | Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | 58,800,000.00 | 57,395,000.00 | 97.61 |
| 147. | Perencanaan Pembangunan Daerah | 1,913,826,745.00 | 1,712,264,100.00 | 89.47 |
| 148. | Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 172,781,792.00 | 92,590,800.00 | 53.59 |
| 149. | Perencanaan Sosial dan Budaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150. | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4,069,320,000.00 | 2,701,706,771.00 | 66.39 |
| 151. | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1,164,914,000.00 | 954,817,400.00 | 81.96 |
| | Jumlah | 917.275.403.412,62 | 744.715.822.221,10 | 81.19 |



B A B IV

PENUTUP

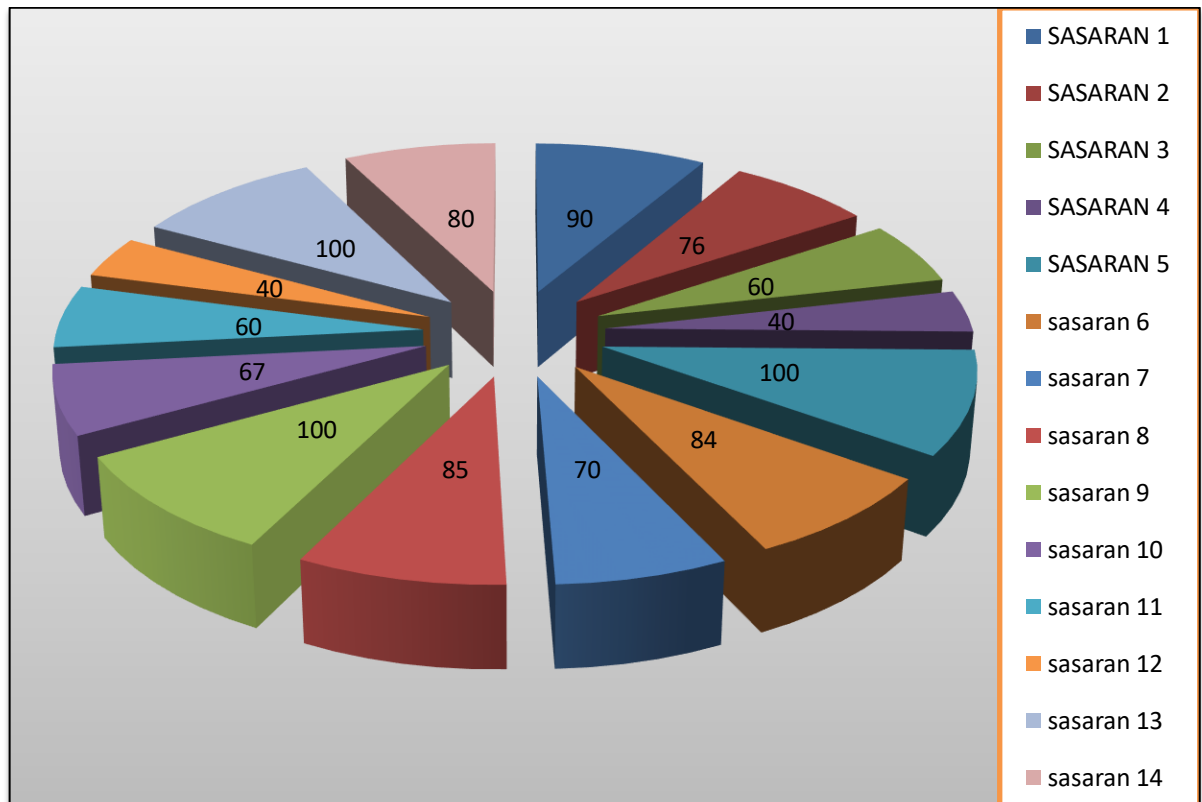
Keberhasilan capaian Kinerja Tahun 2017 menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 dan menindaklanjuti kinerja yang belum dicapai pada tahun 2016, namun tidak terlepas dari setiap kendala dan hambatan dengan adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal sebagai langkah awal untuk menjadikan arah kebijakan tahun berikutnya yang berkesinambungan, sehingga seluruh sasaran dan indikator tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Terhadap berbagai target capaian maupun tidak tercapai Pemerintah Kota Binjai akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis, monitoring dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan secara berkala, berkelanjutan dan tersistem sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Akhirnya, secara umum sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2016-2021, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 rata-rata **capaian 76%** dengan kategori ***memuaskan***.

Demikianlah Laporan Kinerja ini diperbuat, semoga bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* dan dipergunakan untuk perumusan rencana berikutnya.



Grafik 4.1. Hasil Capaian Kinerja pada setiap Sasaran Strategis Tahun 2017.





INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN 2018

1. Nama Organisasi : PEMERINTAH KOTA BINJAI

2. Tugas :

- 2.1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2.2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 2.3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 2.4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 2.5. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- 2.6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.

3. Wewenang :

- 3.1. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- 3.2. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 3.3. Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah;
- 3.4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.

4. Indikator Kinerja Utama :

| No | Sasaran strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Sumber Data |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |



| | | | |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | Indeks Persepsi Korupsi dilihat dari kasus yang ditangani. | Inspektorat |
| | | Penerapan system aplikasi pada administrasi pemerintahan elektronik (Elektonic government/e-Gov | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP). | Bagian Organisasi |
| | | Persentase SKPD menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). | Inspektorat |
| | | Rasio PAD terhadap Total APBD | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| | | Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD. | |
| | | Persentase Pajak/Retribusi terhadap Total Pendapatan | |
| | | Persentase Belanja Modal terhadap total APBD. | |
| | | Persentase Dana transfer dari pusat (Dana Perimbangan) terhadap total pendapatan daerah. | |
| 2. | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. | Jumlah sertifikat tanah pemerintah. | Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama |
| | | Rata-rata Laju perumbuhan penduduk. | Dinas Pengendalian Penduduk dan KB |
| | | Rasio Akseptor KB. | |
| | | Cakupan Keluarga Siaga Aktif. | |
| | | Persentase keterkaitan perempuan di lembaga pemerintahan. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat |
| | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan | |



| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk. | |
| 3. | Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan. | Persentase Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum. | Badan Kesbang dan Politik |
| | | Persentase Hasil Musrembang yang disepakati ke dalam RKPD. | BAPPEDA |
| | | Jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD. | Sekretariat DPRD, BAGIAN HUKUM SETDAKOTA BINJAI |
| 4. | Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat kecamatan dan kelurahan | Jumlah Aparatur pemerintah kota mendapat pelatihan penjenjangan. | BKD |
| | | Jumlah Aparatur Pemerintah Kota mendapat tugas Belajar dan ikatan dinas. | |
| | | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik | Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama |
| 5. | Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama | Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| | | Jumlah Organisasi keagamaan mendapat pembinaan. | Badan Kesbang dan Politik |
| 6. | Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya. | Jumlah Organisasi Pemuda mendapat pembinaan. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Jumlah Organisasi Olahraga mendapat pembinaan. | |
| | | Jumlah kegiatan Kepemudaan. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Jumlah kegiatan olahraga. | |



| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Terciptanya daya saing di Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya. | <i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</i> Angka Harapan Hidup Angka Harapan Lama Sekolah. Lama Sekolah. Pengeluaran Perkapita. | Dinas Pendidikan, BPS Dinas Kesehatan, BPS Dinas Pendidikan, BPS BAPPEDA, BPS |
| | | <i>Indeks Pendidikan.</i> | |

| | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | <i>Rata-rata Lama Usia Sekolah</i> <i>Angka Buta Huruf.</i> <i>APK/APM Pendidikan Formal.</i> <i>a. APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</i> <i>b. APMJenjang SD (SD/MI/Paket A).</i> <i>c. APKJenjang (SD/SDLB /MI).</i> <i>d. APK Jenjang SMP (SMP/SMPLB/MTs).</i> <i>e. APM Jenjang SLTP (SMP/MTs/Paket B).</i> | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Putus Sekolah a. Angka Putus Sekolah SD/MI. b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs. | |
| | | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | |
| | | Persentase Guru bersertifikat Pendidik. | |
| | | Indeks Kesehatan | |



| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | <p><i>Status Kesehatan dan Gizi masyarakat.</i></p> <p>Angka kematian bayi.</p> <p>Angka kematian ibu</p> <p>Persentase balita gizi buruk.</p> <p>Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun).</p> <p>Rasio dokter per satuan penduduk.</p> | Dinas Kesehatan |
| | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk. | |
| | | Rasio tenaga medis per satuan penduduk. | |
| | | Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI). | |
| | | Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan | |
| | | Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS) | |
| | | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, taman, rekreasi dan tempat hiburan, dan lainnya). | |
| 8. | Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. | <p><i>Kebinamargaan</i></p> <p>Panjang jalan Kota dalam kondisi baik.</p> | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Proporsi jalan Kota dalam Kondisi mantap. | |
| | | Panjang jembatan dalam kondisi baik. | |
| | | Rasio Jembatan Kota dalam kondisi baik/mantap. | |
| | | <i>Pengairan/ Sumber Daya Air.</i> | |
| | | Panjang bronjong terbangun. | |



| | | | |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | panjang drainase/parit beton dibangun. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Pengurangan luas genangan banjir setiap tahun. | |
| | | <i>Sanitasi dan Air Bersih</i> | |
| | | Proporsi RT dengan akses air bersih | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari | Bagian Perekonomian |
| | | Persentase penanganan sampah. | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Cakupan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. | |
| | | <i>Perhubungan</i> | |
| | | Jumlah halte terbangun untuk Pengembangan moda transportasi mendukung Trans Mebidang | Dinas Perhubungan |
| 9. | Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai RTRW | Revisi RTRW kotaBinjai 2017 - 2037 | BAPPEDA, Sekretariat DPRD |
| 10. | Meningkatnya produktifitas perekonomian kota | <i>Kondisi Makro Ekonomi</i> | |
| | | Laju pertumbuhan ekonomi | BAPPEDA, BPS |
| | | PDRB ADHB (Triliun) | |
| | | PDRB ADHK (Triliun) | |
| | | PDRB/Kabita (ADHB) Tahun Dasar 2010 (Juta) | |
| | | Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini). | |
| | | Ketimpangan Regional (Indeks Williamson). | |
| | | APBD ((Triliun) | |
| | | ICOR (Triliun) | |
| | | <i>Daya Saing Daerah</i> | |



| | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | Lama proses perijinan (hari kerja setelah berkas lengkap). | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu |
| | | Nilai Investasi (PMTB) (Triliun) | |
| | | <i>Ketahanan Pangan</i> | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| | | Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi | |
| | | Beras. | |
| | | Jagung | |
| | | Kedelai | |
| | | Persentase Swasembada | |
| | | Konsumsi kalori Kota Binjai | |
| | | Penurunan konsumsi beras. | |
| | | Penurunan Jumlah Keluarga Rawan Pangan. | |
| | | Skor Pola Pangan Harapan. | |
| | | <i>Perindustrian/Perdagangan.</i> | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| | | Kontribusi sektor Industri pengelolaan terhadap PDRB. | |
| | | Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran ; Reparasi Mobil dan dan sepeda motor terhadap PDRB. | |
| | | Kontribusi Sektor Jasa (Jasa Perusahaan, Jasa Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. | BAPPEDA, BPS |
| | | <i>Informasi dan Komunikasi.</i> | Dinas Infokom |
| | | % Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB. | |
| | | Jumlah Akses hotspot internet gratis (wifi) pada Pusat-pusat ekonomi social masyarakat | |
| | | Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon. | |



| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 11. | Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan. | Persentase Koperasi Aktif. | Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah |
| | | Jumlah UKM non BPR/LKM. | |
| 12. | Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan. | <i>Lingkungan.</i> Tersedia alat ukur pengendali pencemaran udara. | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Jumlah taman publik/Kawasan Botanical Garden/hutan kota/terbangun. | |
| | | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. | |
| 13. | Pengurangan tingkat resiko akibat bencana. | Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. | BPBD |
| | | Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. | |
| 14. | Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan. | <i>Dimensi Keadilan Sosial.</i> | |
| | | Tingkat Kemiskinan | Dinas Sosial |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka. | Dinas Tenaga Kerja dan Perdagangan Perindustrian |
| | | Penciptaan Wirausahawan baru. | |
| | | Rasio ketersediaan daya listrik. | Bagian Perekonomian |
| | | Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat. | Rumah Sakit |
| | | Rerata lama sekolah penduduk umur 15 Tahun | Dinas Pendidikan |
| | | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial. | Dinas Sosial |
| | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Dinas Sosial |
| | | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH). | |
| | | <i>Dimensi Keadilan Ekonomi.</i> | |
| | | Persentase keluarga penghuni rumah yang memenuhi syarat | Dinas Sosial |




**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018
Pemerintah Kota Binjai**

| | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | kesehatan (layak huni). | |
| | | Persentase penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja. | Dinas Tenaga Kerja dan Perdagangan Perindustrian |
| | | Rerata pengeluaran per kapita/bulan terhadap garis kemiskinan. | BAPPEDA |
| | | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. | Dinas Sosial |
| | | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | |
| | | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha. | |
| | | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH). | |
| | | Anak terlantar dan anak jalanan yang terbina. | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | <i>Dimensi Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban.</i> | |
| | | Penurunan Angka Kriminalitas. | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. | |
| | | Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat. | |
| | | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. | |
| | | Jumlah Linmas per 10.000 penduduk. | |

Binjai, Maret 2019

WALIKOTA BINJAI,

H. M. IDAHAM, SH. M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PEMERINTAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. M. IDAHAM, SH, M.Si**
Jabatan : **WALIKOTA BINJAI**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Binjai, Maret 2019

WALIKOTA BINJAI,

H. M. IDAHAM, SH. M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PEMERINTAH KOTA BINJAI

| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | 1.1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. | Opini | WTP |
| | | 1.2. | Indeks Persepsi Korupsi dilihat dari kasus yang ditangani | Kasus | 5 |
| | | 1.4. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP). | Kategori | B |
| | | 1.5. | Persentase SKPD menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).% | % | 75 |
| | | 1.6. | Rasio PAD terhadap Total APBD (%) | % | 11,90 |
| | | 1.7. | Tingkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). | Score | 3,000 |
| | | 1.8 | Persentase Belanja Pegawai terhadap total APBD. | % | 46,2 |
| | | 1.9. | Persentase Pajak/Retribusi terhadap Total Pendapatan | % | 9,25 |
| | | 1.10 | Persentase Belanja Modal terhadap total APBD. | % | 25,8 |
| | | 1.11 | Persentase Dana transfer dari pusat (Dana Perimbangan) terhadap total pendapatan daerah | % | 62,94 |

| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|-------------------|--|-------------------|--------|--------|
|----|-------------------|--|-------------------|--------|--------|



| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 2 | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. | 2.1. | Jumlah sertifikat tanah pemerintah | sertifikat | 55 |
| | | 2.2. | Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk. | % | 1.21 |
| | | 2.3. | Rasio Akseptor KB. | % | 77,25 |
| | | 2.4. | Cakupan Keluarga Siaga Aktif. | % | 76 |
| | | 2.5. | Persentase keterkaitan perempuan di lembaga pemerintahan. | % | 42 |
| | | 2.6. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan | % | 97 |
| | | 2.7. | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). | % | 94,57 |
| | | 2.8. | Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk. | % | 19 |
| 3 | Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan. | 3.1. | Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum. | % | 65 |
| | | 3.2. | Persentase Hasil Musrenbang yang disepakati ke dalam RKPD. | % | 20 |
| | | 3.3. | Jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD. | Perda | 2 |

| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|-------------------|--|-------------------|--------|--------|
|----|-------------------|--|-------------------|--------|--------|



| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 4 | Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | 4.1. | Jumlah Aparatur pemerintah kota mendapat pelatihan / penjenjangan | Aparatur | 94 |
| | | 4.2. | Jumlah Aparatur Pemerintah Kota mendapat Tugas Belajar dan ikatan dinas. | Aparatur | 38 |
| | | 4.3. | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang baik. | % | 70 |
| | | 4.4. | Persentase Kecamatan/ Kelurahan menyusun Sistem Informasi Profil Kecamatan/ Kelurahan. | % | 70 |
| 5 | Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama | 5.1. | Jumlah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan | Kegiatan/ tahun | 2 |
| | | 5.2. | Jumlah Organisasi keagamaan mendapat pembinaan. | Organisasi | 5 |
| 6 | Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya. | 6.1. | Persentase Organisasi Pemuda mendapat pembinaan. | % | 68 |
| | | 6.2. | Jumlah Organisasi Olahraga mendapat pembinaan | Organisasi | 32 |
| | | 6.3. | Jumlah kegiatan Kepemudaan. | Keg/ tahun | 8 |
| | | 6.4. | Jumlah kegiatan olahraga. | Keg/ tahun | 12 |
| | | 6.5. | Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di bangun | Balai | 1 |
| | | 6.6. | Jumlah gedung pemuda dibangun | gedung | - |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Terciptanya daya saing di Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya. | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM). | | |
| | | 7.1. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM). | % | 77,06 |
| | | 7.2. | Angka Harapan Hidup | % | 72,43 |
| | | 7.3. | Angka Harapan Lama Sekolah | % | 14,58 |
| | | 7.4. | Lama Sekolah/ Tahun | % | 11,84 |
| | | 7.5. | Persentase Pengeluaran Perkapita Rp (000,00) /Tahun | % | 10,27 |
| | | | Indeks Pendidikan | | |
| | | 7.6. | Rata-rata Lama Usia Sekolah / Tahun. | % | 9,99 |
| | | 7.7. | Persentase Angka Buta Huruf | % | 0,00 |
| | | 7.8. | Persentase APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | % | 11,07 |
| | | 7.9. | APM Jenjang SD (SD/MI/Paket A) | % | 101,40 |
| | | 7.10. | APK Jenjang (SD/SDLB/MI). | % | 123,44 |
| | | 7.11. | APK Jenjang SMP(SMP/SMPLB/MTs). | % | 113,93 |
| | | 7.12. | APM Jenjang SLTP(SMP/MTs/ Paket B). | % | 80,13 |
| | | 7.13. | APK Jenjang SMA (SMA/ SMK/ SMALB / MA | % | 119,01 |
| | | 7.14. | APM Jenjang SMA (SMA/ SMK/ SMALB / MA). | % | 99,38 |
| | | 7.15. | Angka Putus Sekolah SD/MI. | % | 0,0026 |



| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 7.16. | Angka Putus SekolahSMP/MTs. | % | 0,0005 |
| | | 7.17. | Angka Putus SekolahSMA/MA/S MK. | % | 0,0005 |
| | | 7.18 | Pembangunan SMK berbasis unggulan daerah | Bangunan | 1 |
| | | 7.19. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | Guru | 1695 |
| | | 7.20 | Persentase Guru bersertifikat Pendidik. | % | 78,48 |
| | | | Indeks Kesehatan | | |
| | | 7.20. | Angka kematian bayi. | AKB/ 1000 KH | 3,17 |
| | | 7.21. | Angka kematian ibu | AKI/ 100. 000KH | 67,80 |
| | | 7.22. | Persentase balita gizi buruk. | % | 0,09 |
| | | 7.23 | Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun). | % | 72,43 |
| | | 7.24 | Rasio dokter per satuan penduduk | Rasio | 1:702 |
| | | 7.25 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | Rasio | 1: 268. 342 |
| | | 7.26 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk. | Rasio | 1:720 |
| | | 7.27 | Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI). | % | 99,00 |
| | | 7.28 | Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan | Puskesmas | 1 |
| | | | | | |



| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 7.29 | Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). | % | 78,00 |
| | | 7.30 | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, taman, rekreasi dan tempat hiburan, dan lainnya). | % | 92,00 |
| 8 | Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. | | Kebinamargaan | | |
| | | 8.1. | Panjang jalan Kota dalam kondisi baik. | km | 326,07 |
| | | 8.2. | Persentas Proporsi jalan Kota dalam Kondisi mantap. | % | 90.49 |
| | | 8.3. | Panjang jembatan dalam kondisi baik. | Meter | 921,79 |
| | | 8.4. | Rasio Jembatan Kota dalam kondisi baik/mantap. | % | 95,94 |
| | | | Pengairan/Sumber Daya Air. | | |
| | | 8.5. | Panjang bronjong terbangun. | Meter | 3.200 |
| | | 8.6. | Panjang drainase/ parit beton dibangun | Meter | 3.000 |
| | | 8.7. | Waduk buatan yang terbangun | - | 1 |
| | | 8.8. | Pengurangan luas genangan banjir setiap tahun. | % | 40 |
| | | | Sanitasi dan Air Bersih | | |
| | | 8.9. | Proporsi RT dengan akses air bersih | % | 21,00 |
| | | 8.10. | Cakupan Layanan Air Minum PDAM Tirtasari | % | 35 |
| | | | | | |



| N o | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 8.11. | Cakupan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. | % | 53 |
| | | | Perhubungan | | |
| | | | Jumlah Halte terbangun untuk Pengembangan Moda Transportasi mendukung Trans MEBIDANG (Unit). | Unit | 5 |
| | | | Infrastruktur Pendukung Industri dan Perdagangan | | |
| | | 8.12 | Jumlah Pasar Semi Modren dibangun (Unit) | Pasar | 1 |
| | | | Pengembangan KSN MEBIDANGRO | | |
| | | 8,13 | Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan akses ke ruas Jalan Tol Medan Binjai (M) | Meter | 250 |
| 9 | Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | 9.1. | Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). | Dokumen | 1 |
| 10 | Meningkatnya produktifitas perekonomian kota | | Kondisi Makro Ekonomi | | |
| | | 10.1 | Laju pertumbuhan ekonomi | % | 7,25 |
| | | 10.2 | PDRB ADHB | Triliun Rupiah | 13,929 |
| | | 10.3 | PDRB ADHK | Triliun Rupiah | 8,564 |
| | | 10.4 | PDRB/Kapita (ADHB) Tahun Dasar 2010 | Juta Rupiah | 49,72 |
| | | 10.5 | Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini). | % | 0,2216 |



| No | Sasaran Strategis | | Sasaran Strategis | Satuan | Target |
|----|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Meningkatnya produktifitas perekonomian kota | | Kondisi Makro Ekonomi | | |
| | | 10.1 | Laju pertumbuhan ekonomi | % | 7,25 |
| | | 10.2 | PDRB ADHB | Triliun Rupiah | 13,929 |
| | | 10.3 | PDRB ADHK | Triliun Rupiah | 8,564 |
| | | 10.4 | PDRB/Kapita (ADHB) Tahun Dasar 2010 | Juta Rupiah | 49,72 |
| | | 10.5 | Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini). | % | 0,2216 |
| | | 10.6 | Ketimpangan Regional (Indeks Williamson). | % | 0,0394 |
| | | 10.7 | APBD | Rp / Triliun | 1,192 |
| | | 10.8 | ICOR | Rp./ Triliun | 2,75 |
| | | | Daya Saing Daerah | | |
| | | 10.9 | Lama proses perijinan (hari kerja setelah berkas lengkap | Hari | 7 |
| | | 10.10 | Nilai Investasi (PMTB) | Rp/Triliun | 29,25 |
| | | | Ketahanan Pangan | | |
| | | 10.11 | Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi | - | - |
| | | 10.12 | Beras. | Ton | 21,15 |
| | | 10,13 | Jagung | Ton | 7.250 |
| | | 10.14 | Kedelai | Ton | 125 |
| | | 10.15 | Persentase Swasembada | % | 29,94 |



| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 10.16 | Konsumsi kalori Kota Binjai | kalori | 2.105 |
| | | 10.17 | Penurunan konsumsi beras. | % | 117 |
| | | 10.18 | Penurunan Jumlah Keluarga Rawan Pangan. | KK | 12.000 |
| | | 10.19 | Persentas Pola Pangan Harapan. | % | 87,00 |
| | | | Perindustrian/ Perdagangan. | | |
| | | | | | |
| | | 10.20 | Kontribusi sektor Industri pengelolaan terhadap PDRB | % | 11,43 |
| | | 10.21 | Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran ; Reparasi Mobil dan dan sepeda motor terhadap PDRB. | % | 28,14 |
| | | 10.22 | Kontribusi Sektor Jasa (Jasa Perusahaan, Jasa Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. | % | 13,74 |
| | | | Informasi dan Komunikasi. | | |
| | | | Persentase Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB | % | 2,85 |



| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 10.24 | Tersedianya akses hotspot internet gratis (WiFi) pada pusat-pusat ekonomi dan sosial masyarakat (unit) | Unit | 2 |
| | | 10.25 | Persentase penduduk yang menggunakan Hp/Telepon | % | 0,025 |
| 11 | Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan. | 11.1 | Persentase Koperasi Aktif. | % | 64,04 |
| | | 11.2 | Jumlah UKM non BPR/LKM. | UKM | 3824 |
| 12 | Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan | | Lingkungan | | |
| | | 12.1 | Tersedia alat ukur pengendali pencemaran udara. | Unit | 1 |
| | | 12.2 | Jumlah taman publik/Kawasan Bottanical Garden/hutan kota/terbangun. | Taman | 1 |
| | | 12.3 | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. | % | 46 |
| 13 | Pengurangan tingkat resiko akibat bencana. | 13.1 | Penanganan Bencana Daerah | | |
| | | | Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 100 |



| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 13.2 | Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. | % | 86 |
| 14 | Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan | | Dimensi Keadilan Sosial | | |
| | | 14.1 | Tingkat Kemiskinan | % | 5,52 |
| | | 14.2 | Tingkat Pengangguran Terbuka. | % | 7,11 |
| | | 14.3 | Penciptaan Wirausahawan baru. | Orang | 2.000 |
| | | 14.4 | Rasio ketersediaan daya listrik. | % | 54,63 |
| | | 14.5 | Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat. | % | 100 |
| | | 14.5 | Rerata lama sekolah penduduk umur 15 Tahun + | % | 11,84 |
| | | 14.6 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial. | % | 100 |
| | | 14.7 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 94 |
| | | | Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih | % | 21 |



| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 14.7 | Persentase rumah tinggal bersanitasi. | % | 20,91 |
| | | 14,8 | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan Rehabilitasi Social Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH). | % | 65,00 |
| | | | Dimensi Keadilan Ekonomi. | | |
| | | 14.9 | Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan (layak huni). | % | 88 |
| | | 14.9 | Persentase penduduk usia 15 Tahun keatas yang bekerja. | % | 62,07 |
| | | 14.5 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 100,00 |
| | | 14.6 | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | Unit | 5 |
| | | 14.7 | Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha. | Orang | 130 |
| | | 14.8 | Anak terlantar dan anak jalanan yang terbina. (Orang) | Orang | 246 |
| | | | | | |



| No | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dimensi Keamanan , Kenyamanan dan Ketertiban | | |
| | | 14.9 | Penurunan angka Kriminal (%) | (%) | 0,0013 |
| | | 4.10. | Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketemteraman masyarakt (%) | (%) | 83 |
| | | 14.11 | Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat. | % | 3,23 |
| | | 14.12 | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. | Rasio | 3,40 |
| | | 14.13 | Jumlah Linmas per 10.000 penduduk. | per 10.000 penduduk . | 1,81 |

| No | Program | Anggaran | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 116.213.990.636,00 | |
| 2 | Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp. 107.080.618.100,00 | |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin | Rp. 4.505.750.500,00 | |
| 4. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 2.115.539.885,00 | |
| 5. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. | Rp. 16.203.630.700,00 | |
| 6. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rp 4.138.069.000,00 | |
| 7. | Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Rp. 43.572.321.796,00 | |
| 8. | Pendidikan Non Formal | Rp. 455.441.000,00 | |
| 9. | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp. 1.996.635.500,00 | |



| No | Program | Anggaran | Ket |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 10. | Pencegahan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular | Rp. 1.227.790.100,00 | |
| 11. | Jaminan Pemeliharaan Masyarakat | Rp. 20.793.900.000,00 | |
| 12. | Kesehatan Lingkungan/Sanitasi | Rp. 1.062.044.700,00 | |
| 13. | Kesehatan Rujukan dan Khusus | Rp. 290.000.000,00 | |
| 14. | Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan | Rp. 1.499.359.319,00 | |
| 15. | Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit | Rp.376753000 | |
| 16. | Obat dan Perbekalan Kesehatan | 3320116000 | |
| 17. | Upaya Kesehatan Masyarakat | 9161721000 | |
| 18. | Pengawasan Obat dan Makanan | 306971500 | |
| 19. | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 918457889 | |
| 20. | Perbaikan Gizi Masyarakat | 1794899673 | |
| 21. | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 2087357174 | |
| 22. | Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 821253700 | |
| 23. | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 133590000 | |
| 24. | Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | 46556690098 | |
| 25. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 110000000 | |
| 26. | Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 62601000 | |
| 27. | Upaya Kesehatan Masyarakat | 12646721000 | |
| 28. | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 3315000000 | |



| No | Program | Anggaran | Ket |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 29. | Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Rp. 150.000.000,00 | |
| 30. | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit mata | Rp. 500.000.000,00 | |
| 31. | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit mata | Rp 1.936.6945.874,00 | |
| 32. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit mata | Rp. 965.000.000,00 | |
| 33. | Peningkatan Pelayanan BLUD | Rp. 33.600.000.000,00 | |
| 34. | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp 98.040.000.000,00 | |
| 35. | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong | Rp. 11.525.000.000,00 | |
| 36. | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp. 4.000.000.000.00 | |
| 37. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong | Rp. 4.000.000.000,00 | |
| 38., | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rp. 8.350.000.000.00 | |
| 39. | Pengendalian Banjir | Rp. 16.925.000.000,00 | |
| 40. | Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gedung | Rp. 6.000.000.000,00 | |
| 41. | Perencanaan Tata Ruang | Rp. 1.340.000.000,00 | |
| 42. | Pengembangan perumahan | Rp. 436.940.000,00 | |
| 43. | Lingkungan Sehat Perumahan | Rp. 23.216.674.355,00 | |
| 44. | Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Rp. 52.720.000,00 | |
| 45. | Pembinaan dan penataan bangunan | Rp. 9.358.280.201,00 | |
| 46. | Pengelolaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | Rp. 10.151.140.000,00 | |



| No | Program | Anggaran | Ket |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 47. | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Rp. 226.100.000,00 | |
| 48. | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rp 9.368.280.201,00 | |
| 49. | Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Rp. 6.139.923.000,00 | |
| 50. | Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Rp. 2.471.089.400,00 | |
| 51. | Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Rp. 978.051.000,00 | |
| 52. | Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | Rp. 1.424.486.000,00 | |
| 53. | Pendidikan Politik Masyarakat | Rp. 575.000.000,00 | |
| 54. | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Rp. 14.000.000,00 | |
| 55. | Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Rp. 674.000.000,00 | |
| 56. | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Rp. 14.000.000,00 | |
| 57. | Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Rp. 596.050.000,00 | |
| 58. | Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Rp. 2.950.000.000,00 | |
| 59. | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Rp .239.700.000,00 | |
| 60. | Pembinaan Anak Terlantar | Rp. 563.300.000,00 | |
| 61. | Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | Rp. 160.000.000,00 | |
| 62. | Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Nrkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) | Rp. 940.000.000,00 | |
| 63. | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Rp. 1.815.000.000,00 | |
| 64. | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp. 160.000.000,00 | |
| 65. | peningkatan kesempatan kerja | Rp. 1.794.100.000,00 | |



| No | Program | Anggaran | Ket |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 66. | Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan | Rp. 239.646.982,00 | |
| 67. | Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Rp. 2.487.850.000,00 | |
| 68. | Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Rp. 3.340.000.000,00 | |
| 69. | Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Rp. 2.600.000.000,00 | |
| 70. | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Rp. 1.153.360.000,00 | |
| 71. | Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Rp. 695.810.000,00 | |
| 72. | Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan | Rp. 350.000.000,00 | |
| 73. | Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan | Rp. 458.061.280,00 | |
| 74. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | Rp. 327.361.940,00 | |
| 75. | Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan | Rp. 871.742.977,00 | |
| 76. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Rp.23.926.700.389,00 | |
| 77. | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Rp. 3.699.965.000,00 | |
| 78. | Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Rp. 3.249.265.000,00 | |
| 79. | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Rp. 130.000.000,00 | |
| 80. | Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan, Program Nasional Adiwiyata | Rp. 20.000.000,00 | |
| 81. | Program Peningkatan disiplin aparatur | Rp .903.648.000,00 | |
| 82. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Rp. 6.103.500.000,00 | |
| 83. | Peningkatan Pelayanan Angkutan | Rp.13.957.500.000,00 | |
| 84. | Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | Rp. 8.351.550.000,00 | |



| 85. | Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa | Rp. 947.900.000,00 | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| No | Program | Anggaran | Ket |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 86. | Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | Rp. 1.870.240.000,00 | |
| 87. | Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | Rp. 1.105.100.000,00 | |
| 88. | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Rp. 2.515.000.000,00 | |
| 89. | Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah | RP. 885.500.000,00 | |
| 90. | Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah | Rp. 2.806.500.000,00 | |
| 91. | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Rp. 1.982.718.300,00 | |
| 92. | Pendaftaran dan Perizinan | Rp. 50.000.000,00 | |
| 93. | Peningkatan Jaringan Koperasi | Rp. 170.500.000,00 | |
| 94. | Pengembangan Sistem Pendukung bagi kelembagaan dan koperasi | Rp. 275.000.000,00 | |
| 95. | Peningkatan promosi dan kerjasama investasi | Rp. 490.000.000,00 | |
| 96. | Peningkatan Pelayanan Perizinan | Rp. 125.200.000,00 | |
| 97. | Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat | Rp. 570.000.000,00 | |
| 98. | Peningkatan peran Serta kepemudaan | Rp. 2.155.000.000,00 | |
| 99. | Pembinaan dan permasyarakatan olahraga | Rp. 2.552.615.000,00 | |
| 100. | Peningkatan sarana dan prasarana olahraga | Rp. 2.782.700.000,00 | |
| 101. | Pengelolaan keragaman budaya | Rp. 1.844.757.000,00 | |
| 102. | Pengembangan pemasaran pariwisata | Rp. 3.008.613.000,00 | |
| 103. | Pengembangan Destinasi Pariwisata | Rp. 307.836.000,00 | |
| 104. | Pengembangan Kemitraan | Rp. 735.500.000,00 | |



| 105. | Peran serta masyarakat dalam pemasaran pariwisata | Rp. 100.000.000,00 | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| No | Program | Anggaran | Ket |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 106. | Pengembangan budidaya perikanan | Rp. 3.191.100.000,00 | |
| 107. | Peningkatan kesejahteraan petani | Rp. 3.245.750.000,00 | |
| 108. | Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | Rp. 190.000.000,00 | |
| 109. | Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | Rp. 1.189.000.000,00 | |
| 110. | Peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Rp. 100.000.000,00 | |
| 111. | Peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Rp. 420.000.000,00 | |
| 112. | Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | Rp. 210.000.000,00 | |
| 113. | Peningkatan produksi hasil peternakan | Rp. 117.800.000,00 | |
| 114. | Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | Rp. 1.283.000.000,00 | |
| 115. | Peningkatan produksi peternakan | Rp. 95.000.000,00 | |
| 116. | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Rp. 4.840.340.000,00 | |
| 117. | Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp. 150.000.000,00 | |
| 118. | peningkatan kebersihan lingkungan | Rp. 1.995.932.000,00 | |
| 119. | Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan/kelurahan | Rp. 612.000.000,00 | |
| 120. | Pembinaan keagamaan | Rp. 1.203.000.000,00 | |
| 121. | Pembinaan pemuda dan olahraga | Rp. 311.000.000,00 | |
| 122. | Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perencanaan pembangunan daerah | Rp. 34.000.000,00 | |
| 123. | Pembinaan dan pemyarakatan olahraga | Rp. 50.000.000,00 | |
| 124. | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Rp. 3.858.975.631,00 | |



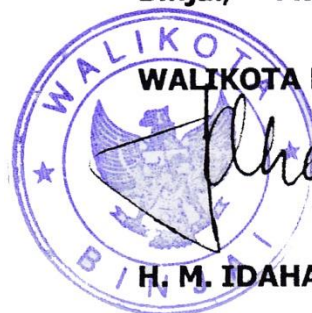

| | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 125. | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Rp. 96.416.535,00 | |
| No | Program | Anggaran | |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 126. | Pengembangan Data/Informasi | Rp. 1.834.276.000,00 | |
| 127. | Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | Rp. 370.000.000,00 | |
| 128. | Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 1.053.000.000,00 | |
| 129. | Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Rp. 195.600.000,00 | |
| 130. | Perencanaan Sosial dan Budaya | Rp. 589.614.300,00 | |
| 131. | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 6.330.000.000,00 | |
| 132. | Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Rp. 1.421.960.000,00 | |
| 133. | Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Rp. 141.318.960,00 | |
| 134. | Pengembangan wilayah perbatasan | Rp. 590.000.000,00 | |
| 135. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Otonomi Daerah | Rp. 421.920.000,00 | |
| 136. | Pembinaan keagamaan | Rp. 5.790.000.000,00 | |
| 137. | Peringatan Hari-Hari Besar | Rp. 940.000.000,00 | |
| 138. | Penataan Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 740.450.000,00 | |
| 139. | Kerjasama Informasi dengan Mengikuti Pameran Regional/Nasional | Rp. 896.211.183,00 | |
| 140. | Penataan kelembagaan daerah | Rp. 160.000.000,00 | |



*Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Pemerintah Kota Binjai*

| | | | |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------|----|
| 141. | Kerjasama Informasi Dengan Mas Media | Rp. 2.128.400.000,00 | |
| No | Program | Anggaran | |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 142 | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Rp. 55.000.000,00 | |
| Jumlah | | Rp. 892.972.708.788,00 | |

Binjai, Maret 2019


WALIKOTA BINJAI,

H. M. IDAHAM, SH. M.Si.



PEMERINTAH KOTA BINJAI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA
Jalan Veteran No. 2 Telp. 8821860
BINJAI-20714

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Binjai untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Binjai. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Binjai, Maret 2019

INSPEKTUR DAERAH KOTA BINJAI



Disy. HASPIAN, M.AP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19611205 198301 1 001

FORMULIR CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN 2018

| No | Pernyataan | | Penjelasan | Checklist | | |
|----|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| I | Format | 1 | LKj sudah menyajikan : | | | |
| | | | - Uraian singkat organisasi | Y | | |
| | | | - Rencana & target kinerja telah ditetapkan | Y | | |
| | | | - Pengukuran Kinerja | Y | | |
| | | | - Evaluasi & analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan & kondisi terakhir yang seharusnya terwujud | Y | | |
| | | 2 | LKj telah menyajikan informasi target kinerja | LKj telah menyajikan ringkasan/ikhtisar PK tahun yang bersangkutan | Y | |
| | | 3 | LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai | - LKj telah menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi | Y | |
| | | | | - Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang memadai (kriteria telah terlampir) | Y | |
| | | | | - Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan | Y | |
| | | 4 | Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan | - Minimal telah menyajikan form pengukuran kinerja dan lainnya yang terkait | Y | |
| | | 5 | Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan | - Dalam Bab IV sudah diuraikan ringkasan tentang upaya perbaikan ke depan khususnya terdapat sasaran yang tidak berhasil mencapai | Y | |
| | | 6 | Telah menyajikan akuntabilitas keuangan | LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja | Y | |
| II | Mekanisme Penyusunan | 1 | LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu | LKj disusun sesuai Tupoksi Organisasi penyusun atau Tim yang dibentuk dengan SK | Y | |
| | | 2 | Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai | Untuk setiap sasaran yang disajikan didukung dengan data resmi dari masing-masing SKPD pelaksana | Y | |
| | | 3 | Telah mendapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj | Adanya SOP atau Surat Edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj | Y | |
| | | 4 | Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja | Adanya Surat Keputusan KDH tentang penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja khususnya yang berkaitan dengan penyusunan LKj | Y | |
| | | 5 | Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya | Data yang disajikan dalam LKj telah didukung dengan data resmi dari SKPD terkait | Y | |
| | | 6 | Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja | Analisis/penjelasan dalam LKj bersumber dari data kinerja unit kerja terkait | Y | |
| | | 7 | LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya | | | |
| | | 1 | Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja | | Y | |
| | | | 2 | Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis | | Y |
| | | | 3 | Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | | |

| No | Pernyataan | | Penjelasan | Checklist |
|-----|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| III | Substansi | 4 | Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja | Y |
| | | 5 | Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama | Y |
| | | 6 | Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | |
| | | 7 | Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat | Y |
| | | 8 | IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran | Y |
| | | 9 | Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai | |
| | | 10 | IKU dan IK telah SMART | Y |



INSPEKTORAT DAERAH KOTA BINJAI

Drs. H. ASPIAN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611205 198301 1 001